

Dr. Marien Pinontoan, M.Pd.



# Konsep Dasar Kemiskinan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Suatu Kajian Teoretis, Pragmatis dan Holistik



**Konsep Dasar Kemiskinan  
dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat**  
Suatu Kajian Teoretis, Pragmatis dan Holistik

Copyright © 2020  
PENERBITAN

**KUTIPAN PASAL 72:  
Ketentuan Pidana Undang-Undang Republik  
Indonesia  
Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dr. Marien Pinontoan, M.Pd.

**Konsep Dasar Kemiskinan  
dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat**  
Suatu Kajian Teoretis, Pragmatis dan Holistik



Pekalongan - Indonesia

# Konsep Dasar Kemiskinan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Suatu Kajian Teoretis, Pragmatis dan Holistik  
Copyright © 2020

**Penulis:**

Dr. Marien Pinontoan, M.Pd.

**Editor:**

Moh. Nasrudin  
(SK BNSP: No. Reg. KOM.1446.01749 2019)

**Setting Lay-out & Cover:**

Tim Redaksi

Diterbitkan oleh:

**PT Nasya Expanding Management**  
(Penerbit NEM - Anggota IKAPI)

Jl. Raya Wangandowo, Bojong  
Pekalongan, Jawa Tengah 51156  
Telp. (0285) 435833, Mobile: 0853-2521-7257  
[www.penerbitnem.com](http://www.penerbitnem.com) / [penerbitnem@gmail.com](mailto:penerbitnem@gmail.com)

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.  
Dilarang memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Cetakan ke-1, Juli 2020

**ISBN: 978-623-423-770-2**

## **Prakata**

Pujian dan syukur diucapkan ke hadirat Tuhan yang Maha Pengasih karena anugerahNya buku yang berjudul **“Konsep Dasar Kemiskinan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat : Suatu Kajian Teoretis, Pragmatis dan Holistik”** ini dapat dirampungkan. Secara keseluruhan materi buku ini terdiri dari 5 (lima) bab yang diuraikan secara garis besar yaitu: Pendahuluan; Konsep Dasar dan Teori Kemiskinan; Pembangunan Ekonomi Kerakyatan; Pemberdayaan Masyarakat; dan Pendidikan Mata Pencaharian sebagai Alternatif Pengentasan Kemiskinan.

Buku ini nantinya menjadi referensi bagi dosen dan mahasiswa yang menekuni bidang ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar dalam mata kuliah Konsep Dasar IPS, Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, serta bidang ilmu Ekonomi dan kewirausahaan.

Dengan rampungnya buku ini penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu mengakses buku rujukan sebagai referensi karya ilmiah dalam bentuk buku ini. Semoga buku ini berkenan bagi dosen dan mahasiswa yang terkait untuk meningkatkan kualitas proses dan isi pembelajaran bidang ilmu yang ditekuni.

Tondano, Juli 2020

**Penulis**

# Daftar Isi

PRAKATA \_\_ v

DAFTAR ISI \_\_ vi

**BAB 1 PENDAHULUAN \_\_ 1**

**BAB 2 KONSEP DAN TEORI KEMISKINAN \_\_ 5**

- A. Konsep Dasar Kemiskinan \_\_ 5
- B. Dimensi dan Indikator Kemiskinan \_\_ 14
- C. Paradigma Kemiskinan \_\_ 21
- D. Kondisi Kemiskinan di Indonesia \_\_ 28
- E. Strategi Pemecahan Masalah Kemiskinan \_\_ 55
- F. Potret Pembangunan Asia \_\_ 63

**BAB 3 PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN \_\_ 68**

- A. Konsep Dasar Pembangunan Ekonomi Kerakyatan \_\_ 68
- B. Strategi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan \_\_ 71
- C. Indikator Keberhasilan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan \_\_ 81

**BAB 4 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT \_\_ 90**

- A. Konsep Dasar Pemberdayaan \_\_ 90
- B. Kelompok Lemah dan Ketidakberdayaan \_\_ 93
- C. Indikator Keberdayaan \_\_ 97
- D. Strategi Pemberdayaan \_\_ 102

**BAB 5 PENDIDIKAN MATA PENCAHARIAN  
ALTERNATIF PENGENTASAN KEMISKINAN \_\_ 108**

- A. Latar Kontekstual Potensi Kemiskinan \_\_ 108
- B. Konsep Belajar Pendidikan Mata Pencaharian bagi  
Orang Dewasa \_\_ 111
- C. Pendidikan Kewirausahaan \_\_ 116
- D. Motivasi Berwirausaha \_\_ 119
- E. Praktek Berwirausaha \_\_ 137

**DAFTAR PUSTAKA \_\_ 168**

**TENTANG PENULIS**

Copyright © 2020  
PENERBIT NEM



## *Bab 1*

# **PENDAHULUAN**

Kemiskinan merupakan suatu kondisi realita dalam kehidupan masyarakat baik di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan. Kondisi kemiskinan ini tercipta ketika pribadi, keluarga maupun komunitas masyarakat tertentu terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup setiap harinya. Kondisi kemiskinan ini sangat rentan dengan lapangan pekerjaan, ekonomi keluarga, tingkat pendidikan anggota keluarga, terpenuhinya tingkat kesehatannya, kondisi budaya lokal serta kondisi keamanan masyarakat. Perkembangan pertumbuhan penduduk yang semakin cepat akan sangat berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan masyarakat. Data terkini jumlah penduduk Indonesia 270,2 juta jiwa dimana 27,54 juta jiwa di antaranya hidup di bawah garis kemiskinan, dimana prosentasi sebarannya 13,10% berada di daerah pedesaan, sementara 7,9% berada di daerah perkotaan (Mozes M. Wullur, 2019). Ketika dipelajari lebih lanjut adanya kecenderungan terdapat sebagian keluarga masing-masing memiliki 4 orang yang terdiri dari suami, isteri dan dua orang anak dan hanya memiliki satu tenaga kerja yaitu suami atau isteri. Pekerjaannya pun sebagai buruh tani, buruh bangunan, pembantu rumah tangga atau pun pekerja serabutan dengan rentangan upah sekitar Rp.100.000.- sampai dengan Rp.150.000.- Jika upah kerja ini hanya untuk memenuhi

kebutuhan dasar makan minum keluarga setiap harinya dalam kondisi terbatas dapat dikatakan cukup. Namun ketika upah ini diperuntukan dengan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dampak sosial dalam masyarakat (kebutuhan organisasi keagamaan dan organisasi suka duka dalam masyarakat), maka dapat dipastikan kepala keluarga akan semakin berat tanggungannya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup keluarga. Kondisi ini belum termasuk pengeluaran ekstra kepala keluarga terkait dengan kebutuhan rokok, transport dan sejenisnya.

Tuntutan kebutuhan yang terus meningkat memacu dan memicu keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan ini untuk terus berusaha keluar dari lingkaran kondisi tersebut difasilitasi oleh pemerintah dan masyarakat melalui sejumlah program pendidikan khususnya pendidikan luar sekolah. Program-program tersebut telah dan sedang bahkan akan terus dilaksanakan dalam bentuk Pendidikan Mata Pencaharian (PMP) oleh semua instansi lintas sektoral yang terkait antara lain melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Kabupaten/Kota, Propinsi bahkan tingkat pusat, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Perguruan Tinggi, dan lembaga-lembaga organisasi sosial kemasyarakatan. Kegiatan-kegiatan ini dalam bentuk penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, kursus-kursus keterampilan khusus, serta program Pengabdian Kepada Masyarakat bagi perguruan tinggi. Demikian halnya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat telah ditempuh melalui sejumlah program antara lain Koperasi Usaha Tani (KUT), Kekesra/Takesra, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kelompok Belajar Paket A, B, C, Kejar Usaha,

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan sejumlah kegiatan sejenisnya. Semua kegiatan ini memiliki kecenderungan pada orientasi proyek (Project Oriented) melalui perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan pertanggung jawaban kegiatan sesuai dengan luaran jumlah peserta dan belum pada orientasi dampak kegiatan atau (Out come) yang berorientasi pada kebermanfaatannya. Jika hal ini terus berlanjut yang tidak disertai dengan upaya untuk menciptakan adanya kesadaran yang terinternalisasi oleh warga masyarakat untuk merubah pola pikir yang inovatif produktif melalui transformasi pendidikan baik pendidikan formal, pendidikan informal, maupun pendidikan non formal maka akan sangat sulit bagi masyarakat untuk keluar dari zona ketidak berdayaan dalam kondisi kehidupan dibawah garis kemiskinan.

Tujuan untuk mengkaji teori kemiskinan ini ialah membuka wawasan bagi ilmuwan dan pada pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan untuk membedah secara konseptual dan data empirik yang menggejala guna menyatukan pandangan bersama untuk mencari solusi alternatif terhadap upaya memperkecil potensi bertambahnya jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan mengkaji teori kemiskinan ini para pembaca akan mendapat gambaran umum profil kondisi kemiskinan ini berdasarkan hasil-hasil penelitian lapangan serta pembahasannya secara ilmiah pemecahan permasalahan kemiskinan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Sasaran untuk mengkaji teori kemiskinan ini ialah masyarakat ilmiah di semua perguruan tinggi yang terkait dengan substansi permasalahan ini di seluruh tanah air serta para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan

dalam hal ini pemerintah di semua jenjang dan tingkatan yang memiliki kewenangan di wilayah kerja masing-masing untuk mengkaji dan berupaya mengambil kebijakan dalam bidang pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi di wilayah kerja masing-masing.

Untuk mempermudah pemahaman keseluruhan isi materi pembahasan ini, maka para pembaca dituntun melalui ruang lingkup kajian teori kemiskinan dalam buku ini yang meliputi: Bab I sebagai Bab Pendahuluan yang membahas tentang landasan konseptual teori kemiskinan, tujuan dan sasaran kajian teori kemiskinan, serta ruang lingkup kajian teori kemiskinan. Bab II membahas tentang teori pembangunan yang berisikan konsep dasar teori pembangunan, nilai-nilai filosofis dalam pembangunan, serta tujuan dan tahapan pembangunan. Bab III Membahas tentang Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang berisikan konsep dasar pembangunan ekonomi kerakyatan, strategi pembangunan ekonomi kerakyatan, serta indikator keberhasilan pembangunan ekonomi kerakyatan. Bab IV membahas tentang kemiskinan dan strategi pemecahannya yang berisikan konsep dasar kemiskinan, dimensi dan indikator kemiskinan, paradigma kemiskinan,, kondisi kemiskinan di Indonesia, serta strategi pemecahan masalah kemiskinan. Bab V membahas tentang pemberdayaan masyarakat yang berisikan konsep dasar pemberdayaan, indikator ketidak berdayaan, dan strategi pemberdayaan. Bab VI yang membahas tentang Pendidikan Mata Pencaharian Alternatif Pengentasan Kemiskinan yang berisikan Pendidikan kewirausahaan, konsep dan teori kewirausahaan, serta motivasi berwirausaha.

## **KONSEP DAN TEORI KEMISKINAN**

### **A. Konsep Dasar Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan konsep dan fenomena yang berwahyu wajah, bermantra Multidimensional. SMERU, misalnya menunjukkan kemiskinan memiliki beberapa ciri (Suharto et al., 2004:7-7):

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan).
2. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun masal.
5. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam.
6. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian sumber alam.
8. Ketidak mampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

Dengan menggunakan perspektif yang lebih luas lagi, David Cox (2004:1-6) membagi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi:

1. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan yang kalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju. Sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan persyaratan global.
2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan).
3. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak dan kelompok minoritas.
4. Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar si miskin seperti konflik bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

Konsepsi kemiskinan yang bersifat multidimensional ini kiranya lebih tepat jika digunakan sebagai pisau analisis dalam mendefinisikan kemiskinan dan merumuskan kebijakan penanganan kemiskinan di Indonesia. Sebagaimana akan dikemukakan pada pembahasan berikutnya, konsepsi kemiskinan ini juga sangat dekat dengan perspektif pekerjaan sosial yang menfokuskan pada konsep keberfungsian sosial dan senantiasa melihat manusia dalam konteks lingkungan dan situasi sosialnya.

Ellis (1984:242-245) menyatakan bahwa dimensi kemiskinan menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial priskologis. Secara ekonomi kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumber daya dalam konteks ini menyangkut tidak hanya aspek finansial, melainkan pula semua jenis kekayaan (*wealth*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Berdasarkan konsepsi ini, maka kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumberdaya yang dimiliki (*povertyline*). Cara seperti ini sering disebut dengan metode pengukuran kemiskinan absolut. Garis kemiskinan yang digunakan BPS sebesar 2,100 kalori per orang per hari yang disetarakan dengan pendapatan tertentu atau pendekatan Bank Dunia yang menggunakan 1 dolar AS per orang per hari adalah contoh pengukuran kemiskinan absolut.

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis kemiskinan nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi serta aneka barang dan jasa lainnya (BPS dan Depsos, 2002:4).

Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi ekonomi, khususnya pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non material

yang diterima oleh seseorang. Namun demikian, secara luas kemiskinan juga kerap didefinisikan sebagai kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan; kekurangan pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat (SMERU dalam Suharto et al., 2004). Definisi kemiskinan dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar seperti ini diterapkan oleh Depsos, terutama dalam mendefinisikan fakir miskin. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak layak (BPS dan Depsos, 2002:3). Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan (Depsos, 2001). Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok dalam definisi ini meliputi kebutuhan akan makanan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan, dan pendidikan.

Secara politik kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (*power*). Kekuasaan dalam pengertian ini mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya. Ada tiga pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan akses terhadap kekuasaan ini, yaitu (a) bagaimana orang dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada dalam masyarakat, (b) bagaimana orang dapat turut ambil bagian dalam pembuatan keputusan penggunaan sumberdaya yang tersedia, dan (c) bagaimana kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Dalam konteks politik berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan



kemasyarakatan. Dalam konteks politik ini Friedman mendefinisikan kemiskinan dalam kaitannya dengan ketidaksamaa kesempatan dalam mengakumulasikan basis kekuasaan sosial yang meliputi: (a) modal produktif atau asset (tanah, perumahan, alat produksi, kesehatan), (b) sumber keuangan (pekerjaan, kredit), (c) organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, partai politik, organisasi sosial), (d) jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang dan jasa, (e) pengetahuan dan keterampilan, dan (f) informasi yang berguna untuk kemajuan hidup (Friedman dalam Suharto et al., 2004).

Kemiskinan secara sosial psikologis menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. Dimensi kemiskinan ini juga dapat diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat yang mencegah atau merintangangi seseorang dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada di masyarakat. Faktor-faktor penghambat tersebut secara umum meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal datang dari dalam diri si miskin itu sendiri, seperti rendahnya pendidikan atau adanya hambatan budaya. Teori "kemiskinan budaya" (*cultural poverty*) yang dikemukakan Oscar Lewis, adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan sebagainya. Faktor eksternal datang dari luar kemampuan orang yang bersangkutan, seperti birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat menghambat seseorang dsalam memanfaatkan sumberdaya. Kemiskinan model ini seringkali diistilahkan dengan kemiskinan struktural. Menurut pandangan ini, kemiskinan

terjadi bukan dikarenakan “ketidakmampuan” sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja.

Beberapa permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat banyak sekali, terkait dengan kemiskinan, pengangguran, urbanisasi, kriminalitas dan masih banyak lagi lainnya, dan semua itu harus diupayakan pemecahannya. Terkait dengan kemiskinan sendnatiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademisi maupun para praktisi, serta pemerhati terhadap masalah kemiskinan untuk para praktisi, serta pemerhati terhadap masalah kemiskinan untuk mencari jalan keluar untuk mengatasinya. Berbagai teori, konsep dan pendekatan pun terus menerus dikembangkan untuk mengungkap misteri tabir permasalahan kemiskinan yang membelenggu dan menjadi penyakit masyarakat. Di bawah ini dikemukakan pendapat para ahli mengenal konsep dan karakteristik sebagai berikut, yaitu:

Levitan (1980) mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Schiller (1979) mengemukakan kemiskinan adalah ketidak sanggupan untuk mendapatkan barang-barang, pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Camber (1987) mengemukakan bahwa kemiskinan sebenarnya terletak pada apa yang disebut perangkat kemiskinan (*deprivation trap*). Secara rinci deprivation trap terdiri dari lima unsur yaitu:

1. Kemiskinan itu sendiri
2. Kelemahan fisik
3. Keterasingan atau katad isolasi

4. Kerentanan
5. Ketidakberdayaan

Menurut Suharto, et al. (bahwa: kemiskinan merupakan konsep dan fenomena yang berwayuh wajah, bermatra multi dimensional. SMERU, misalnya menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki beberapa ciri sebagai berikut, yaitu:

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan).
2. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun masal.
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam.
6. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil)

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Siagian (2005:80), bahwa penduduk miskin di negara-negara terkebelakang dihadapkan pada “lingkaran setan” yang mengandung komponen sebagai berikut:

1. Pendapatan perkapita rendah.
2. Yang berakibat ketidak mampuan menabung.
3. Yang pada gilirannya berakibat pada tidak terjadinya pembentukan modal (*no capital formation*).
4. Tidak terjadinya pemupukan modal berarti tidak adanya investasi.
5. Tidak ada investasi berarti tidak terjadinya perluasan usaha.
6. Tidak ada perluasan usaha berarti sempitnya perluasan kerja.
7. Sempitnya kesempatan kerja berarti tingginya tingkat pengangguran.
8. Pengangguran berarti tidak adanya penghasilan.
9. Tidak adanya penghasilan berarti pada titik bergesernya posisi seseorang dari bawah garis kemiskinan.

Penerapan the Elizabeth Poor Law di Inggris sebagai strategi menghadapi kemiskinan akibat the great depression tahun 1930-an tercatat sebagai salah satu momentum penting dalam sejarah perkembangan profesi pekerjaan sosial. Secara konseptual pekerjaan sosial memandang bahwa kemiskinan merupakan persoalan-persoalan multidimensional, yang bermatra ekonomi sosial dan individual-struktural. Berdasarkan perspektif ini, ada tiga kategori kemiskinan yang menjadi pusat perhatian pekerjaan sosial, yaitu:

1. Kelompok yang paling miskin (*destitute*) atau yang sering didefinisikan sebagai fakir miskin. Kelompok ini secara absolut memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan (umumnya tidak memiliki sumber pendapatan sama sekali) serta tidak memiliki akses terhadap berbagai pelayanan sosial.

2. Kelompok miskin (*poor*). Kelompok ini memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan namun secara relatif memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar (misalnya, memiliki sumber-sumber finansial, memiliki pendidikan dasar atau tidak buta huruf).
3. Kelompok rentan (*vulnerable group*). Kelompok ini dapat dikategorikan bebas dari kemiskinan, karena memiliki kehidupan yang relative lebih baik ketimbang kelompok destitute maupun miskin. Namun sebenarnya kelompok yang sering disebut "*near poor*" (agak miskin) ini masih rentan terhadap berbagai perubahan sosial disekitarnya. Mereka seringkali berpindah dari statis "*rentan*" menjadi "*miskin*" dan bahkan "*destitute*" bila terjadi krisis ekonomi dan tidak mendapat pertolongan sosial.

Dalam kaitan ini, maka seringkali orang mengklasifikasikan kemiskinan berdasarkan "*status*" atau "*profil*" yang melekat padanya kemudian disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PKKS). Belum ada hasil penelitian yang koprehensif apakah mereka ini tergolong pada kelompok destitute, *poor* atau *vulnerable*. Namun dapat diasumsikan bahwa proporsi jumlah PMKS di antara ketiga kategori tersebut membentuk piramida kemiskinan. Kelompok terbesar diperkirakan berada pada kategori paling miskin, diikuti oleh kategori miskin dan rentan.

Potret kemiskinan sesungguhnya akan lebih buram lagi, jika pengukuran kemiskinan menggunakan garis kemiskinan (*poverty line*) yang lain, yang lebih "*manusiawi*". Alat ukur yang dipergunakan saat ini berdasarkan pada

konsep kemiskinan absolut yang lebih menekankan pemenuhan kebutuhan makanan, yakni sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membeli makanan setara 2,100 kalori per orang per hari. Kebutuhan non makanan, seperti pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa masih belum diperhatikan secara memadai dalam indikator yang sering digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) itu. Walhasil, jika garis kemiskinan dari Bank Dunia sebesar \$2 per hari per orang yang digunakan, jumlah orang miskin di Tanah Air akan lebih membengkak lagi, mirip perut orang yang mengalami busung lapar maupun busung kenyang.

## **B. Dimensi dan Indikator Kemiskinan**

Yang melatar belakangi kemiskinan itu terdapat berbagai aspek, tapi dalam pemahaman sehari-hari bahwa kemiskinan itu hanya dilihat dari aspek pendapatan, sebenarnya kemiskinan dapat dilihat dari aspek pendapatan, sebenarnya kemiskinan dapat dilihat dari aspek politik, psikologis, dan budaya. Ellis (1984:242-245) menyatakan bahwa dimensi kemiskinan menyangkut aspek ekonomi politik dan sosial psikologis, masing-masing dapat dijelaskan dibawah ini.

### **1. Secara Ekonomi**

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumber daya dalam konteks ini menyangkut tidak hanya finansial, melainkan pula semua jenis kekayaan (*wealth*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari arti luas. Berdasarkan

konsep ini, maka kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya yang dimiliki melalui penggunaan standar baku yang dikenal dengan garis kemiskinan (*poverty line*). Cara seperti ini sering disebut dengan metode pengukuran kemiskinan absolut. Garis kemiskinan yang digunakan BPS sebesar 2,100 kalori per orang per hari yang disetarakan dengan pendapatan tertentu atau pendekatan Bank Dunia yang menggunakan 1 dolar AS per orang per hari adalah contoh pengukuran kemiskinan absolut. Standar pengukuran menurut BPS dan Depsos (2002:4) "Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

## 2. Secara Politik

Kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (*power*). Kekuasaan dalam pengertian ini mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya. Ada tiga pertanyaan mendasarkan yang berkaitan dengan akses terhadap kekuasaan ini, yaitu: a) Bagaimana orang dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dalam masyarakat; b) Bagaimana orang dapat turut ambil bagian dalam pembuatan keputusan

penggunaan sumber daya yang tersedia; dan c) Bagaimana kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan,

Dalam konteks politik ini Friedman (dalam Suharto et al., 2004) mendefinisikan kemiskinan dalam kaitannya dengan ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasi basis kekuasaan sosial yang meliputi: (a). Modal produktif atau asset (tanah, perumahan, alat produksi, kesehatan); (b). Sumber keuangan (pekerjaan, kredit); (c). Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, partai politik, organisasi sosial); (d). Jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, dan jasa, Pengetahuan dan keterampilan; dan (e). Informasi yang berguna untuk memajukan hidup.

3. Kemiskinan secara Sosial-Psikologis

Menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. Dimensi kemiskinan ini juga dapat diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat yang mencegah atau merintangikan seseorang dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada di masyarakat. Faktor-faktor penghambat tersebut secara umum meliputi faktor internal dan eksternal.

a. Faktor internal datang dari dalam diri si miskin itu sendiri, seperti rendahnya pendidikan atau adanya hambatan budaya. Teori "kemiskinan budaya" (*cultural poverty*) yang dikemukakan Oscar Lewis, misalnya menyatakan bahwa kemiskinan dapat muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau



kebudayaan yang dianut oleh orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan sebagainya.

- b. Faktor eksternal datang dari luar kemampuan orang yang bersangkutan, seperti birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat menghambat seseorang memanfaatkan sumberdaya. Kemiskinan model ini seringkali diistilahkan dengan kemiskinan terjadi bukan dikarenakan “ketidakmampuan” sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja.

Menurut Cox (2004:1-6) dan Suharto (2005:132-135) dimensi kemiskinan dapat dilihat dengan perspektif dan sudut pandang yang lebih luas lagi, yaitu membagi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi:

1. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi, menghasilkan pemenang dan yang kalah, pemenang umumnya adalah negara-negara maju. Sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan persyarat globalisasi.
2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsistem (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan).
3. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak dan kelompok minoritas.

Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor ekstrnal di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

Dimensi kemiskinan dapat dilihat dari pendekatan keberfungsian sosial dapat menggambarkan karakteristik dan dinamika kemiskinan yang lebih realistis dan komprehensif. Ia dapat menjelaskan bagaimana keluarga miskin merespons dan mengatasi permasalahan sosial-ekonomi yang terkait dengan situasi kemiskinannya. Selaras dengan pekerjaan sosial, yakni *'to help people to help Themselves'*, pendekatan ini memandang orang miskin bukan sebagai objek pasif yang hanya memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang sering digunakannya dalam mengatasi berbagai permasalahan seputar kemiskinannya. Ada empat poin yang diajukan pendekatan keberfungsian sosial dalam studi kemiskinan.

Kemiskinan sebaiknya tidak dilihat hanya dari karakteristik si miskin secara statis, melainkan dilihat secara dinamis yang menyangkut usaha dan kemampuan si miskin dan merespon kemiskinannya, termasuk efektivitas jaringan sosial (lembaga kemasyarakatan dan program-program anti kemiskinan setempat) dalam menjalankan fungsi sosialnya.

1. Indikator untuk mengukur kemiskinan sebaiknya tidak tunggal, melainkan indicator komposit dengan unit analisis keluarga atau rumah tangga dan jaringan sosial (*social network*) yang ada disekitarnya.
2. Konsep kemampuan sosial (*social capabilities*) dipandang lebih lengkap daripada konsep pendapatan (*income*) dalam memotret kondisi sekaligus dinamika kemiskinan.

3. Pengukuran kemampuan sosial keluarga miskin dapat difokuskan pada beberapa key indicators yang mencakup kemampuan keluarga miskin memperoleh mata pencaharian (*livelihood capabilities*), memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs fulfillment*), mengelola asset (*asse management*), menjangkau sumber-sumber (*aces ot resources*), berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan (*aces to social capital*), serta kemampuan dalam menghadapi goncangan dan tekanan (*cope with shocks and stresses*), sedangkan indicator kunci untuk mengukur jaringan sosial dsapat mencakup kemampuan lembaga-lembaga sosial memperoleh sumber daya (SDM dan finansial), menjalankan peran atau fungsi utamanya, pengelola asset, menjangkau sumber, berpartisipasi dalam program anti kemiskinan (misalnya, apakah lembaga-lembaga sosial, jarring pengaman sosial, asuransi kesejahteraan sosial (dan menghadapi goncangan dan tekanan sosial (misalnya bagaimana jaringan sosial yang ada ketika menghadapi krisis ekonomi atau bencana alam) (Suharto, 2005).

Secara umum ciri-ciri penduduk miskin ditandai dengan keterbatasan pendapatan dan modal usaha, memiliki keterbatasan asks berbagai sarana kebutuhan dasar. Secara rinci dapat diuraikan dibawah ini.

1. Mereka hidup dibawah garis kemiskinan, pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal atau keterampilan. Faktor produksi umumnya sedikit, sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.

2. Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan asset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan diperoleh tidak cukup.
3. Tingkat pendidikan golongan miskin pada umumnya rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar. Waktu mereka pada umumnya habis tersita untuk mencari nafkah sehingga tidak ada lagi waktu untuk belajar. Demikian juga dengan anak-anak mereka. Tak dapat menyelesaikan sekolahnya oleh karena itu harus membantu orang tuanya untuk mencari nafkah tambahan.
4. Banyak diantara mereka yang tinggal di pedesaan, dan tidak mempunyai tanah garapan atau walaupun ada relative kecil. Pada umumnya mereka sebagai buruh tani atau pekerja kasar di pertanian, tetapi kesinambungan kerja mereka menjadi kurang terjamin. Banyak diantara mereka lalu menjadi pekerja bebas (*self employed*) yang berusaha apa saja. Akibatnya dalam situasi penawaran tenaga kerja yang besar, maka tingkat upah menjadi rendah sehingga mengurangi mereka selalu hidup di bawah kemiskinan. Didorong oleh kesulitan hidup di desa, maka banyak diantara mereka mencoba berusaha ke kota (urbanisasi) untuk mengadu nasib.
5. Banyak diantara mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan atau skill dan pendidikan. Sedangkan kota sendiri terutama di negara yang sedang berkembang tidak siap mampu menampung urbanisasi. Penduduk desa itu. Apabila di negara maju pertumbuhan sebagai penarik bagi masyarakat desa untuk bekerja di kota, maka proses urbanisasi di negara berkembang tidak disertai proses penyerapan tenaga kerja sehingga penduduk miskin

yang pindah ke kota terdampak dalam kantong-kantong kemelaratan (slumps). Sedangkan Mozes Wullur (2021) berpendapat bahwa Kemiskinan bagi masyarakat harus dikaji secara holistik bahwa kemiskinan dalam masyarakat itu meliputi: (1). Kemiskinan Pendidikan, (2). Lapangan Kerja, (3) Kemiskinan Ekonomi, (4) Kemiskinan Sosial, (5). Kemiskinan Budaya, (6). Kemiskinan Kesehatan, (7). Kemiskinan Hukum, (7). Kemiskinan Psikologis, dan (8). Kemiskinan Keamanan.

Pandangan ini hendak menjelaskan bahwa secara konseptual kemiskinan ini berada pada seluruh lapisan atau strata sosial kemasyarakatan. Dikatakan demikian karena Kemiskinan pendidikan, merupakan embrio dari kemanusiaannya sebagai manusia untuk bereksistensi bagi dirinya sendiri pun terhadap orang lain. Jika tidak memiliki pendidikan.

### C. Paradigma Kemiskinan

Sebagaimana telah diuraikan di depan Mustopadidjaja (2003) mendefinisikan paradig sebagai teori dasar atau cara pandang yang fundamental, dilandasi nilai-nilai tertentu dan berisikan teori pokok, konsep, asumsi, metodologi, atau cara pendekatan yang dipergunakan oleh para teoritis dan praktisi dalam menanggapi suatu permasalahan, baik kaitan pengembangan ilmu ataupun dalam upaya pemecahan permasalahan bagi kemajuan hidup dan kehidupan kemanusiaan.

Ada beberapa teori yang dikaitkan dengan kemiskinan, yakni teori neo liberal dan demokrasi sosial (*social democracy*). Dua teori ini dapat digunakan dalam

menganalisis kemiskinan maupun merumuskan kebijakan dan program-program mengatasi kemiskinan.

#### 1. Teori Neo-Liberal

Suharto (2005:138) mengatakan bahwa theory neo liberal berakar pada karya politik klasik yang ditulis oleh Thomas Hobbes, John Lock dan John Stuart Mill. Intinya menyerukan bahwa komponen penting dari sebuah masyarakat adalah kebebasan individu. Dalam bidang ekonomi, karya monumental Adam Smith, *The Wialth of Nation* (1776) dan Frederick Hayek, *The Road To serfdom* (1944), dipandang sebagai rujukan kaum neo-liberal yang mengedepankan azas liaaez faire, yang oleh Cheyne, O'Brien dan Belgrave (1998:72) disebut sebagai ide yang mengunggulkan "mekanisme pasar bebas" dan "mengusulkan (*the almost complete absence of state's intervention in the economy*)".

Shannon (1991); Spicker, (1995) Cheyne O'Brien dan Belgrave (1998) mengatakan bahwa para pendukung neoliberal berargument bahwa kemiskinan merupakan persoalan individual yang disebabkan oleh kelemahan-kelemahan dan/atau pilihan-pilihan individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya. Secara langsung strategi penanggulangan kemiskinan harus bersifat "residual", sementara, dan hanya melibatkan keluarga, kelompok-kelompok swadaya atau lembaga-lembaga keagamaan. Peran negara hanyalah sebagai "penjaga malam" yang harus boleh ikut campur manakala lembaga-lembaga di atas tidak mampu lagi menjalankan tugasnya. Penerapan *program-program structural adjustment*, seperti program jaringan pengaman sosial (JPS).

## 2. Teori Demokrasi-Sosial

Mendasarkan pada analisis Karl Marx dan Frederick Engels, pendukung demokrasi sosial (Theory Social-Democracy) menyatakan bahwa *“a free market did not lead to greater social wealth, but to greater poverty and exploitation... a society is just when people’s needs are met, and when inequality and exploitation in economic and social relations are eliminated”* (Cheyne, O’Brien, dan Belgrave, 1998:91-97 dan Suharto, 2005).

Teori demokrasi sosial memandang bahwa kemiskinan bukanlah persoalan individu, melainkan struktural. Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses-akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber-sumber kemasyarakatan. Teori ini berporos pada prinsip-prinsip ekonomi campuran (*mixed economics*) gaya Keynesian yang muncul sebagai jawaban terhadap depresi ekonomi yang terjadi pada tahun 1920an dan awal 1930-an.

Sistem negara kesejahteraan (*welfare state*) yang menekankan pentingnya manajemen dan pendanaan negara dalam pemberian pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan, perumahan dan jaminan sosial) bagi seluruh warga negara dipengaruhi oleh pendekatan ekonomi Keynesian. Meskipun kaum demokrasi sosial mengkritik sistem pasar bebas, mereka tidak memandang sistem jauh. Sistem kapitalis masih dipadang sebagai bentuk pengorganisasian ekonomi yang paling efektif. Hanya saja, kapitalisme perlu dilengkapi dengan sistem negara kesejahteraan agar lebih berwajah manusiawi. *“The welfare state acts as the human face of capitalism”*.

Demikian menurut Cheyne, O'Brien dan Belgrave, (1998:79).

### 3. Perubahan Paradigma

Meskipun pembahasan kemiskinan pernah mengalami tahap kejenuhan pada pertengahan 1980-an, upaya pengentasan kemiskinan kini semakin mendesak kembali untuk dikaji ulang. Beberapa alasan yang mendasari pendapat ini antara lain adalah:

- a. Konsep kemiskinan masih didominasi oleh perspektif tunggal, yakni “kemiskinan pendapatan” (“*income-poverty*”), (Chambers, 1997). Pendekatan ini banyak dikritik oleh para pakar ilmu sosial sebagai pendekatan yang kurang bisa menggambarkan potret kemiskinan secara lengkap. Kemiskinan seakan-akan hanyalah masalah ekonomi yang di tunjukkan oleh rendahnya pendapatan seseorang atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b. Jumlah orang miskin di Indonesia senantiasa menunjukkan angka yang tinggi, baik secara absolut maupun relative, di pedesaan maupun perkotaan. Meskipun Indonesia pernah dicatat sebagai salah satu negara berkembang yang sukses dalam mengentaskan kemiskinan, ternyata masalah kemiskinan kembali menjadi isu sentral di Tanah Air karena bukan saja jumlahnya yang kembali meningkat, melainkan dimensinya pula semakin kompleks seiring dengan menurunnya kualitas hidup masyarakat akibat terpaan krisis ekonomi sejak tahun 1997.
- c. Kemiskinan mempunyai dampak negatif yang bersifat menyebarkan (*multiplier effects*) terhadap



tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh. Berbagai peristiwa konflik di Tanah air yang terjadi sepanjang krisis ekonomi, misalnya menunjukkan bahwa ternyata persoalan kemiskinan bukanlah semata-mata mempengaruhi ketahanan ekonomi yang ditampilkan oleh rendahnya daya beli masyarakat, melainkan pula mempengaruhi ketahanan sosial masyarakat dan ketahanan nasional. Banyak studi menunjukkan bahwa kemiskinan juga merupakan muara dari masalah sosial lainnya. Masalah anak jalanan, perlakuan salah terhadap anak (*child abuse*), kekerasan dalam rumah tangga, rumah kumuh, kejahatan, alkoholisme, kebodohan dan pengangguran terkait dengan masalah kemiskinan.

Suharto (2002) mengatakan hamper semua pendekatan dalam mengkaji kemiskinan masih berporos pada teori neoliberalisme yang dimotori oleh Bank Dunia dan didasari oleh teori-teori modernisasi yang sangat mengagungkan pertumbuhan ekonomi dan produksi (*the production-centred mode*). Sejak pendapatan nasional (GNP) mulai dijadikan indikator pembangunan tahun 1950-an, para ilmu sosial selalu merujuk pada pendekatan tersebut manakala berbicara masalah kemiskinan satu negara, banyak ahli menunjukkan kelemahan pendekatan ini. Haq (1995), misalnya menyatakan bahwa GNP merefleksikan harga-harga pasar dalam bentuk nilai uang. Harga-harga tersebut mampu mencatat kekuatan ekonomi dan daya beli dalam sistem tersebut. Namun demikian, harga-

harga dan nilai uang tidak dapat mencatat distribusi, karakter atau kualitas pertumbuhan ekonomi. GNP juga mengesampingkan segala aktivitas yang tidak dapat dinilai dengan uang, seperti pekerjaan rumah tangga, pertanian subsistem, atau pelayanan-pelayanan yang tidak dibayar.

Menurut Satterhwaite (1997) sedikitnya ada tiga kelemahan pendekatan income poverty:

- a. Kurang memberi perhatian pada dimensi sosial dan bentuk-bentuk kesengsaraan orang miskin.
- b. Tidak mempertimbangkan keterlibatan orang miskin dalam menghadapi kemiskinannya.
- c. Tidak menerangkan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan.

Karena pendekatan GNP dan income poverty memiliki kelemahan dalam memotret kemiskinan, sejak tahun 1970-an telah kombinasi garis kemiskinan dan distribusi pendapatan yang dikembangkan Sen (1973) Sosial accounting Matrix (SAM) oleh Pyatt dan Round (1977), dan Physical Quality of Life Index (PQLI) oleh Morris (1977). Dibawah ini kepemimpinan ekonomi asal Pakistan, Mahbub Ul Haq, pada tahun 199-an UNDP memperkenalkan pendekatan Human Development yang diformulasikan dalam bentuk indeks Pembangunan (*Human Development Index*) dan Index Kemiskinan Mansia (*Human Poverty Index*). Pendekatan ini relative lebih komprehensif dan mencakup faktor ekonomi, sosial dan budaya si miskin. Berporos pada ide-ide heterodox dari paradigm popular development, pendekatan ini memadukan model kebutuhan dasar

(*basic needs model*) yang digagas Paul Streeten dan konsep kapabilitas (*capability*) yang dikembangkan pemenang Nobel Ekonomi 1998, Amartya Sen.

#### 4. Paradigma Baru

Bila mencermati, semua paradigma kemiskinan terdahulu masih tetap menyimpan kelemahan. Konsepsinya masih melihat kemiskinan sebagai kemiskinan individu dan kurang memperhatikan kemiskinan structural. Akibatnya, aspek actor atau pelaku kemiskinan serta sebab-sebab yang mempengaruhinya belum tersentuh secara memadai. Sistem pengukuran dan indikator yang digunakannya terfokus pada kondisi atau keadaan kemiskinan berdasarkan faktor-faktor ekonomi yang dominan. Orang miskin hanya dipandang sebagai orang yang serba tidak memiliki". Tidak memiliki pendapatan tinggi, tidak terdidik, tidak sehat dan sebagainya. Metodanya masih berpijak pada outcome indicators sehinggabelum menjangkau variable-variabel yang menunjukkan dinamika kemiskinan. Si miskin dilihat hanya sebagai "korban pasif" dan objek penelitian. Bukan sebagai manusia (human being) yang memiliki "sesuatu" yang dapat digunakan baik dalam mengidentifikasi kondisi kehidupannya maupun usaha-usaha perbaikan yang dilakukan mereka sendiri.

Kelemahan paradig lama di atas menuntut perubahan pada focus pengkajian kemiskinan, khususnya menyangkut kerangka konseptual dan metodologi pengukuran kemiskinan. Paradigm demokrasi sosial

dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kembali konsep keberfungsian sosial sebagai paradigma baru yang lebih sejalan dengan misi dan prinsip pekerjaan.

#### **D. Kondisi Kemiskinan di Indonesia**

Masalah kemiskinan merupakan isu sentral di Tanah air, terutama setelah Indonesia dilanda krisis multi-dimensional yang memuncak pada periode sampai dengan September 2019 berjumlah 24.79 juta orang, setelah dalam kurun waktu 1976-1996 tingkat kemiskinan menurun secara spektakuler dari 40,1 persen menjadi 11,13 persen, jumlah orang miskin meningkat kembali dengan tujuan, terutama selama krisis ekonomi. Studi yang dilakukan oleh BPS, UNDP dan UNSFIR menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada periode 1996-1999 meningkat dengan tajam dari 22,5 juta jiwa (11,3%) menjadi 49,5 juta jiwa (24,2%) atau bertambah sebanyak 27,0 juta jiwa (BPS, 1999). Sementara itu, international Labour Organisation (ILO) memperkirakan jumlah orang miskin di Indonesia pada akhir tahun 1999 mencapai 129,5 juta atau sekitar 66,3% dari seluruh penduduk (BPS, 1999)

Data dari BPS (1999) juga memperlihatkan bahwa selama periode 1996-1998, telah terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin hampir sama di wilayah pedesaan dan perkotaan, yaitu menjadi sebesar 62,72% untuk wilayah pedesaan dan 61% untuk wilayah perkotaan. Secara agregat, presentasi peningkatan penduduk miskin terhadap total populasi memang lebih besar di wilayah pedesaan (7,78%) dibandingkan dengan diperkotaan (4,72%). Akan tetapi, selama dua tahun terakhir ini secara absolut jumlah orang miskin meningkat sekitar 140% atau 10,4 juta jiwa di wilayah

perkotaan, sedangkan di pedesaan sekitar 105% atau 16,6 juta jiwa (Remi dan Tjiptoherijanto, 2002).

Berdasarkan definisi kemiskinan dan fakir miskin dari BPS dan Depsos (2002), jumlah penduduk miskin pada tahun 2002 mencapai 35,7 juta jiwa dan 15,6 juta jiwa (43%) diantaranya masuk kategori fakir miskin. Secara keseluruhan, prosentase penduduk miskin dan fakir miskin terhadap total penduduk Indonesia adalah sekitar 17,6 persen dan 7,7 persen. Ini berarti bahwa secara rata-rata jika ada 100 orang Indonesia berkumpul, sebanyak 18 orang diantaranya adalah orang miskin yang terdiri dari 10 orang bukan fakir miskin dan 8 orang fakir miskin (Suharto, 2003).

Selain kelompok di atas, terdapat juga kecenderungan dimana krisis ekonomi telah meningkatkan jumlah orang yang bekerja di sector informal. Merosotnya pertumbuhan ekonomi dilikuidasinya sejumlah kantor swasta dan pemerintah, dan dirampingkannya struktur industry formal telah mendorong orang untuk memasuki sector informal yang lebih fleksibel, Studi ILO (1998) memperkirakan bahwa selama periode krisis antara tahun 1997 dan 1998, pemutusan hubungan kerja terhadap 5,4% pekerja pada sector industry modern telah menurunkan jumlah pekerja formal dari 35% menjadi 30 persen.

Menurut Tambunan (2000), sedikitnya setengah dari para penganggur baru tersebut diserap oleh sekttor informal dan industri kecil dan rumah tangga lainnya pada sector informasi perkotaan khususnya yang menyangkut kasus pedagang kaki lima peningkatannya bahkan lebih dramatis lagi. Di Jakarta dan Bandung misalnya, pada periode akhir 1996-1999) pertumbuhan pedagang kaki lima mencapai 300% (kompas 23 Nov 1998) Pikiran Rakyat, 11 Oktober 1999)

dilihat dari jumlah dan potensinya, pekerja sector informa ini sangat besar. Namun demikian, seperti halnya dua kelompok masyarakat di atas, kondisi sosial ekonomi pekerja sektor informal masih berada dalam kondisi miskin dan rentan.

Data di atas mengindikasikan bahwa krisis telah membuat penderitaan penduduk perkotaan lebih parah ketimbang penduduk pedesaan. Menurut Thorbecke (1999) setidaknya ada dua penjelasan atas hal ini:

1. Krisis cenderung memberi pengaruh lebih buruk pada beberapa sector ekonomi utama di perkotaan, seperti perdagangan, perbankan dan konstruksi. Sektor ini membawa dampak negatif dan memperparah pengangguran di perkotaan.
2. Pertambahan harga bahan makanan kurang berpengaruh terhadap penduduk pedesaan, karena mereka masih dapat memenuhi kebutuhan dasarnya melalui sistem produksi subsisten yang dihasilkan dan dikonsumsi sendiri. Hal ini tidak terjadi pada masyarakat perkotaan di mana sistem produksi subsisten, khususnya yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan makanan, tidak terlalu dominan pada masyarakat perkotaan.

Angka kemiskinan ini akan lebih besar lagi jika dalam kategori kemiskinan dimasukkan "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang kini jumlahnya mencapai lebih dari 21 juta orang PMKS meliputi gelandang, pengemis, anak jalanan, yatim piatu, jompo terlantar, dan penyandang cacat yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan namun tidak cukup memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara umum kondisi PMKS lebih

memprihatinkan ketimbang orang miskin. Selain memiliki kekurangan pangan, sandang dan papan, kelompok rentan (*vulnerable group*) ini mengalami pula ketelantaran psikologis, sosial dan politik.

Masalah kemiskinan ini merupakan isu sentral di Tanah Air, terutama setelah Indonesia dilanda krisis multidimensional yang memuncak pada periode (1997-1999). Setelah dalam kurun waktu 1976-1996 tingkat kemiskinan menurun secara spektakuler dari 40,1 persen menjadi 11,3 persen, jumlah orang miskin meningkat kembali dengan tajam, terutama selama krisis ekonomi. Studi yang dilakukan BPS, UNDP dan UNSFIR menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada periode 1996-1998, meningkat dengan tajam dari 22,5 juta jiwa (11,3%) menjadi 49,6 juta jiwa (24,2%) atau bertambah sebanyak 27,0 juta jiwa (11,3%) menjadi 49,5 juta jiwa (24,2%) atau bertambah sebanyak 27,0 juta jiwa (BPS, 1999). Sementara itu, International Labour Organisation (ILO) memperkirakan jumlah orang miskin di Indonesia pada akhir tahun 1999 mencapai 129,6 juta atau sekitar 66,3 persen dan seluruh jumlah penduduk (BPS, 1999).

Data dari BPS (1999) juga memperlihatkan bahwa selama periode 1996-1998, telah terjadi Peningkatan jumlah penduduk miskin secara hampir sama di wilayah pedesaan dan perkotaan, yaitu menjadi sebesar 62,72% untuk wilayah pedesaan dan 61,1% untuk wilayah perkotaan. Secara agregat, presentasi peningkatan penduduk miskin terhadap total populasi memang lebih besar di wilayah pedesaan (7,78%) dibandingkan dengan di perkotaan (4,72%). Akan tetapi, selama dua tahun terakhir ini secara absolut jumlah orang miskin meningkat sekitar 140% atau 10,4 juta jiwa di

wilayah perkotaan, sedangkan di pedesaan sekitar 105% atau 16,6 juta jiwa (lihat Remi dan Tjiptoherijanto, 2002).

Berdasarkan definisi kemiskinan dan fakir miskin dari BPS dan Depsos (2002), jumlah penduduk miskin pada tahun 2002 mencapai 35,7 juta jiwa dan 15,6 juta jiwa (43%) diantaranya masuk kategori fakir miskin. Secara keseluruhan prosentasi penduduk miskin dan fakir miskin terhadap total penduduk Indonesia adalah sekitar 17,6 persen dan 7,7 persen. Ini berarti bahwa secara rata-rata jika ada 100 orang Indonesia berkumpul 18 orang diantaranya adalah orang miskin. Yang terdiri dari 10 orang bukan fakir miskin dan 8 orang fakir miskin (Suharto, 2004:3).

Selain kelompok di atas, terdapat juga kecenderungan dimana krisis ekonomi telah meningkatkan jumlah orang yang bekerja di sektor informal. Merosotnya pertumbuhan ekonomi, dilikuidasinya sejumlah antar swasta dan pemerintah, dan dirampingkannya struktur industry formal telah mendorong orang untuk memasuki sector informal yang lebih fleksibel.

Studi ILO (1998) memperkirakan bahwa selama periode krisis antara tahun 1997 dan 1998, pemutusan hubungan kerja terhadap 5,4 juta pekerja pada sector industry modern telah menurunkan jumlah pekerja formal dari 35 persen menjadi 30 persen. Menurut Tambunan (2000), sedikitnya setengah dari pada penganggur baru tersebut diserap oleh sektor informal dan industry kecil dan rumah tangga lainnya. Pada sektor informal perkotaan, bahkan lebih dramatis lagi. Di Jakarta dan Bandung misalnya, pada periode akhir 1996-1999 pertumbuhan pedagang kaki lima mencapai 300 persen (Kompas, 23 November 1998); Pikiran Rakyat, 11 Oktober 1999. Dilihat dari jumlah dan potensinya,



pekerja sector informal ini sangat besar. Namun demikian, seperti halnya dua kelompok masyarakat di atas, kondisi sosial ekonomi pekerja sektor informal masih berada di atas kondisi sosial ekonomi pekerja sector informal masih berada dalam kondisi miskin dan rentan. Sedangkan perkembangan data terkini, berdasarkan Pusat Statistik Pusat (BPS, 2020), jumlah penduduk Indonesia 270,2 Juta jiwa, dimana 27,54 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan dengan prosentasi sebaran 7,9% di Kota dan 13,10% di pedesaan (M. Wullur, 2021).

Data di atas mengindikasikan bahwa krisis telah membuat penderitaan penduduk pedesaan lebih parah ketimbang penduduk perkotaan. Menurut Thorbecke (1999) setidaknya ada dua penjelasan atas hal ini:

1. Krisis cenderung memberi pengaruh lebih buruk pada beberapa sector ekonomi utama di perkotaan, seperti perdagangan, perbankan dan konstruksi. Sektor-sektor ini membawa dampak negatif dan memperparah pengangguran di perkotaan.
2. Pertambahan harga bahan makanan kurang berpengaruh terhadap penduduk pedesaan, karena mereka masih dapat memenuhi kebutuhan dasarnya melalui sistem produksi subsiten yang dihasilkan dan dikonsumsi sendiri. Hal ini tidak terjadi pada masyarakat perkotaan dimana sistem produksi subsiten, khususnya yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan makanan, tidak terlalu dominan pada masyarakat perkotaan.

Angka kemiskinan ini akan lebih besar lagi jika dalam kategori kemiskinan dimasukkan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang kini jumlahnya mencapai

lebih dari 21 Juta orang, PMKS meliputi gelandangan, pengemis, anak jalanan, yatim piatu, jompo terlantar, dan penyandang cacat yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan namun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara umum kondisi PMKS lebih memperhatikan ketimbang orang miskin. Selain memiliki kekurangan pangan, sandan dan papan, kelompok rentan (*vulnerable grup*) ini mengalami pada ketelantaran psikologis, sosial dan politik.

Kemiskinan pada hakekatnya merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Hingga saat ini belum ditemukan suatu rumusan maupun formula penanganan kemiskinan yang dianggap paling jitu dan sempurna. Tidak ada konsep tunggal tentang kemiskinan. Strategi penanganan kemiskinan masih harus terus menerus dikembangkan. Terdapat banyak sekali teori dalam memahami kemiskinan. Bila dipetakan, literature mengenai kebijakan sosial dan pekerjaan sosial menunjukkan dua paradigma atau teori besar (*grand theory*) mengenai kemiskinan: yakni paradigm neoliberal dan demokrasi-sosial (*social democracy*). Dua paradigma atau pandangan ini kemudian menjadi cetak biru (*blueprint*) dalam menganalisis kemiskinan maupun merumuskan kebijakan dan program-program anti kemiskinan.

#### 1. Teori Neo-Liberal

Teori neo-liberal berakar pada karya politik klasik yang ditulis oleh Thomas Hibbesm John Lock dan John Stuart Mill. Intinya menyerukan bahwa komponen penting dari sebuah masyarakat adalah kebebasan individu. Dalam bidang ekonomi, karya monumental Adam Smith, *The Wealth of Nation* (1776) dan Frederick

Hayek, *The Road to Serfdom* (1944), dipandang sebagai rujukan kaum neo-liberal yang mengedepankan azas *laissez faire*, yang oleh Cheyne, O'Brien dan Belgrave (1998:72) disebut sebagai ide yang mengunggulkan "mekanisme pasar bebas: dan mengusulkan '*the almost complete absence of state's intervention in the economy*'"

**Tabel 2.1**  
Teori Neo-liberal dan Demokrasi-Sosial  
tentang Kemiskinan

Paradigma	Neo-Liberal	Demokrasi-sosial
Landasan Teoretis	Individual	Struktural
Konsepsi dan indikator kemiskinan	Kemiskinan Absolut	Kemiskinan Relatif
Penyebab kemiskinan	Kelemahan dan pilihan-pilihan individu; lemahnya pengaturan pendapatan; lemahnya kepribadian (malas, pasrah, bodoh)	Ketimpangan struktur ekonomi dan politik, ketidakadilan sosial
Strategi penanggulangan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyaluran pendapatan terhadap orang miskin secara selektif</li> <li>- Memberi pelatihan keterampilan pengelolaan keuangan melalui inisiatif masyarakat dan LSM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyaluran pendapatan dasar secara universal</li> <li>- Perubahan fundamental dalam pola-pola pendistribusian pendapatan melalui intervensi negara dan kebijakan sosial</li> </ul>

Sumber: dikembangkan dari Cheyne, O'Brien dan Belgrave (1998:176)

Para pendukung neo liberal berargumen bahwa kemiskinan merupakan persoalan individual yang disebabkan oleh kelemahan-kelemahan dan atau pilihan-pilihan individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang dengan sendirinya jika kekuatan-kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya. Secara langsung, strategi penanggulangan kemiskinan harus bersifat "residual", sementara dam hanya melibatkan keluarga, kelompok-kelompok swadaya atau lembaga-lembaga keagamaan. Peran negara hanyalah sebagai "penjaga malam" yang baru boleh ikut campur manakala lembaga-lembaga di atas tidak mampu lagi menjalankan tugasnya (Shannon, 1991; Spicker, 1995; Cheyne, O'Brien dan Belgrave, 1998). Penerapan program-program structural adjustment, seperti program jaringan pengaman sosial (JPS) di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sesungguhnya merupakan contoh kongkrit dari pengaruh neo-liberal dalam bidang penanggulangan kemiskinan itu.

## 2. Teori Demokrasi Sosial

Keyakinan yang berlebihan terhadap keunggulan mekanisme pasar dan pertumbuhan ekonomi yang secara alamiah dianggap akan mampu mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan sosial mendapat kritik dari kaum demokrasi sosial, berpijak pada analisis Karl Marx dan Frederic Engels, pendukung demokrasi sosial menyatakan bahwa *"a free market did not society is just when peoples needs are met, and when inequality and exploitation in economic and social relations are eliminated"* (Cheyne, O'Brien dan Belgrave, 1998: 91 dan 97).

Teori demokrasi sosial memandang bahwa kemiskinan bukanlah persoalan individual, melainkan structural. Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses-akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber-sumber kemasyarakatan.

Sistem negara kesejahteraan (*welfare state*) yang menekankan pentingnya manajemen dan pendanaan negara dalam pemberian pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan, perumahan dan jaminan sosial) bagi seluruh warga negara dipengaruhi oleh pendekatan ekonomi Keysnesian. Meskipun kaum demokrasi sosial mengkritik sistem pasar bebas, mereka tidak memandang sistem ekonomi kapitalis sebagai evil yang harus dimusuhi dan dibuang jauh. Sistem kapitalis masih dipandang sebagai bentuk pengorganisasian sistem negara kesejahteraan agar lebih berwajah manusiawi/*the welfare, state acts as the human face of capitalism*, demikian menurut Cheyne, O.Brien dan Belgrave (1998:79).

Pendukung demokrasi sosial berpendapat bahwa kesetaraan merupakan prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan.

Pencapaian kebebasan hanya dimungkinkan jika semua orang memiliki atau mampu menjangkau sumber-sumber seperti pendidikan, kesehatan yang baik dan pendapatan yang cukup. Kebebasan lebih dari sekedar bebas dari pengaruh luar; melainkan pula bebas dalam menentukan pilihan-pilihan (*choices*). Dengan kata lain kebebasan berarti memiliki kemampuan (*capabilities*) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya,

kemampuan menghindari kematian dini, kemampuan menghindari kekurangan gizi, kemampuan dalam menjamin bahwa setiap orang dapat berpartisipasi dalam transaksi-transaksi kemasyarakatan yang memungkinkan mereka menentukan pilihan-pilihannya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Menyerahkan sepenuhnya penanganan kemiskinan kepada masyarakat dan LSM bukan saja tidak akan efektif, melainkan pula mengingkari kewajiban negara dalam melindungi warganya.

### 3. Perubahan Paradigma

Sadar bahwa isu kemiskinan merupakan masalah yang senantiasa actual, pengkajian konsep kemiskinan merupakan upaya positif guna menghasilkan pendekatan dan strategi yang tepat dalam menanggulangi masalah krusial yang dihadapi Bangsa Indonesia dewasa ini. Meskipun pembahasan kemiskinan pernah mengalami kini semakin mendesak kembali untuk dikaji ulang. Beberapa alasan yang mendasari pendapat ini antara lain adalah:

- a. Konsep kemiskinan masih didominasi oleh perspektif tunggal, yakni kemiskinan pendekatan ini banyak dikritik oleh para pakar ilmu sosial sebagai pendekatan yang kurang bisa menggambarkan potret kemiskinan secara lengkap. Kemiskinan seakan-akan hanyalah masalah ekonomi yang ditunjukkan oleh rendahnya pendapatan seseorang atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b. Jumlah orang miskin di Indonesia senantiasa menunjukkan angka yang tinggi, baik secara absolut

maupun relative, di pedesaan maupun di perkotaan. Meskipun Indonesia pernah dicatat sebagai salah satu negara berkembang yang sukses dalam mengentaskan kemiskinan, ternyata masalah kemiskinan kembali menjadi issue sentral di Tanah Air karena bukan saja jumlahnya yang kembali meningkat, melainkan dimensinya semakin kompleks seiring dengan menurunnya kualitas hidup masyarakat akibat terpaan krisis ekonomi sejak tahun 1997.

- c. Kemiskinan mempunyai dampak negatif yang bersifat menyebar (*multiplier effects*) terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh. Berbagai peristiwa konflik di Tanah Air yang terjadi sepanjang krisis ekonomi, misalnya, menunjukkan bahwa ternyata persoalan kemiskinan bukanlah semata-mata mempengaruhi ketahanan ekonomi yang ditampilkan oleh rendahnya daya beli masyarakat, melainkan pula mempengaruhi ketahanan sosial masyarakat dan ketahanan nasional. Banyak studi menunjukkan bahwa kemiskinan juga merupakan muara terhadap anak (*child abuse*), kekerasan dalam rumah tangga, rumah kumuh, kejahatan alkoholisme, kebodohan, dan pengangguran terkait dengan masalah kemiskinan.

Menurut Hardiman dan Midgley (1982) dan Jones (1990) pekerjaan sosial di Dunia ketiga seharusnya lebih menfokuskan pada penanganan masalah sosial yang bersifat makro, seperti kemiskinan. Karena merupakan masalah dominan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Sayangnya dalam perancangan kebijakan

dan program anti kemiskinan para pekerja sosial di Indonesia masih belum mampu memberikan kontribusi. Khususnya dalam merumuskan konsep dan indikator kemiskinan yang genuine dan sesuai dengan paradig pekerjaan sosial. Penyebabnya adalah karena para teoritis dan praktisi pekerjaan sosial di Tanah Air belum mampu menformulasikan kemiskinan sejalan dengan konsep keberfungsian sosial (*social functioning*), focus pertolongan profesi ini hingga sekarang konsep ini masih belum dikembangkan lebih jauh untuk pekerja sosial lebih confident jika memakai konsep-konsep milik profesi lain. padahal konsep keberfungsian sosial merupakan "harta terpendam" yang dapat digali untuk mendekati dan mengukur kemiskinan.

#### 4. Paradigma Lama

Hampir semua pendekatan dalam mengkaji kemiskinan masih berporos pada paradigma neo-liberal yang dimotori oleh Bank Dunia dan didasarkan oleh teori-teori modernisasi yan sangat mengagungkan pertumbuhan ekonomi dan produksi (*the production-centred model*) (Suharto, 2002). Sejak pendapatan nasional (GNP) mulai dijadikan indikator pembangunan tahun 1950-an, para ilmu sosial selalu merujuk pada pendekatan tersbut manakala berbicara masalah kemiskinan satu negara. Pengukuran kemiskinan kemudian sangat dipengaruhi oleh perspektif income poverty yang menggunakan pendapatan sebagai satu-satunya indikator "garis kemiskinan".

Meskipun GNP dapat dijadikan ukuran untuk menelaah performa pembangunan suatu negara, banyak



ahli menunjukkan kelemahan pendekatan ini. Haq (1995) misalnya menyatakan bahwa GNP merefleksikan harga-harga pasar dalam bentuk nilai uang. Harga-harga tersebut mampu mencatat kekuatan ekonomi dan daya beli dalam sistem tersebut. Namun demikian, harga-harga pasar dalam bentuk nilai uang. Harga-harga tersebut mampu mencatat kekuatan ekonomi dan daya beli dalam sistem tersebut mampu mencatat kekuatan ekonomi dan daya beli dalam sistem tersebut. Namun demikian harga-harga dan nilai uang tidak dapat mencatat distribusi, karakter atau kualitas pertumbuhan ekonomi. GNP juga mengesampingkan segi aktivitas yang tidak dapat dinilai dengan uang. Seperti pekerjaan rumah tangga, pertanian subsisten, atau pelayanan-pelayanan yang tidak dibayar. Dan yang lebih serius lagi, GNP memiliki, dimensi tunggal dan karenanya ia gagal menangkap aspek budaya, sosial, politik dan pilihan-pilihan yang dilakukan manusia. Haq (1995:46) menyatakan: *GNP reflects market prices in monetary terms. Those prices quietly register the prevailing economic and purchasing power in the system but they are silent about the distribution, character or quality of economic growth. GNP also leaves out all activities that are not monetised household work, subsistence agriculture, unpaid services. And what is more serious, GNP is one dimensional: it fails to capture the cultural, social, political and many other choices that people make.*

Seperti halnya GNP, pendekatan income poverty juga memiliki beberapa kekurangan. Menurut Satterthwaite (1997) sedikitnya ada tiga kelemahan pendekatan *income poverty*:

- a. Kurang memberi perhatian pada dimensi sosial dan bentuk-bentuk kesengsaraan orang miskin.
- b. Tidak mempertimbangkan keterlibatan orang miskin dalam menghadapi kemiskinannya.
- c. Tidak menerangkan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan.

Karena pendekatan GNP dan income poverty memiliki kelemahan dalam memotret kemiskinan, sejak tahun 1970-an telah dikembangkan sebagai pendekatan alternatif. Diantaranya adalah kombinasi garis kemiskinan dan distribusi pendapatan yang dikembangkan Sen (1973); *Sosial Accounting Matrix (SAM)* oleh Pyatt dan Round (1977) dan *Physical Quality of Life Index (PQLI)* oleh Morris (1977). Di bawah kepemimpinan ekonomi asal Pakistan, Mahbub Ul Haq, pada tahun 1990an. UNDP memperkenalkan pendekatan Human Development yang diformulasikan dalam bentuk Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) dan Indeks Kemiskinan Manusia (*Human Development Index*). Pendekatan ini relative lebih komprehensif dan mencakup faktor ekonomi, sosial dan budaya si miskin. Berporos pada ide-ide heterodox dari paradigm popular development, pendekatan ini memadukan model kebutuhan dasar (basic, needs model) yang digagas Paul Streeten dan konsep kapabilitas (capability) yang dikembangkan Pemenang Nobel Ekonomi 1998), Amartya Sen.

## 5. Paradigma Baru

Bila dicermati, semua paradigma kemiskinan terdahulu masih tetap menyimpan kelemahan. Konsepnya melihat kemiskinan sebagai kemiskinan individu dan kurang memperhatikan kemiskinan structural. Akibatnya, aspek aktor atau pelaku kemiskinan serta sebab-sebab yang mempengaruhinya belum tersentuh secara memadai. Sistem pengukuran dan indicator yang digunakannya terfokus pada "kondisi" atau "keadaan" kemiskinan berdasarkan faktor-faktor ekonomi yang dominan. Orang miskin hanya dipandang sebagai orang yang serba tidak memiliki: tidak memiliki pendidikan tinggi, tidak terdidik, tidak sehat, dan sebagainya. Metodanya masih berpijak pada outcome indicators sehingga belum menjangkau variabel-variabel yang menunjukkan dinamika kemiskinan. Si miskin dilihat hanya sebagai "korban pasif" dan objek penelitian. Bukan sebagai "manusia" (human being) yang memiliki "sesuatu" yang dapat digunakannya baik dalam mengidentifikasi kondisi kehidupannya maupun usaha-usaha perbaikan yang dilakukan mereka sendiri.

Kelemahan paradigma lama di atas menuntut perubahan pada focus pengkajian kemiskinan, khususnya menyangkut kerangka konseptual dan metodologi pengukuran kemiskinan. Paradigma demokrasi-sosial dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kembali konsep keberfungsian sosial sebagai paradigm baru yang lebih sejalan dengan misi dan prinsip pekerjaan sosial.

## 6. Keberuntungan Sosial

Keberfungsian sosial mengacu pada acara yang dilakukan individu-individu atau kelompok-kelompok dalam melaksanakan tugas kehidupan dan memenuhi kebutuhannya. Konsep ini pada intinya menunjuk pada "kapabilitas" (*capabilities*) individu, keluarga atau masyarakat dalam menjalankan peran-peran sosial dilingkungannya. Baker, Dubois dan Miley (1992) menyatakan bahwa keberfungsian sosial berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar diri dan keluarganya, serta dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Konsepsi ini mengedepankan nilai bahwa manusia memiliki kemampuan dan potensi yang dapat dikembangkan dalam proses pertolongan. Bahwa manusia memiliki dan/atau dapat menjangkau, memanfaatkan, dan memobilisasi asset dan sumber-sumber yang ada di sekitar dirinya.

Pendekatan keberfungsian sosial dapat menggambarkan karakteristik dan dinamika kemiskinan yang lebih realistis dan komprehensif. Ia dapat menjelaskan bagaimana keluarga miskin merespon dan mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang terkait dengan situasi kemiskinannya. Selaras dengan adagium pekerjaan sosial, yakni '*to help people to help themselves*' pendekatan ini memandang orang miskin bukan sebagai objek pasif yang hanya dicirikan oleh kondisi dan karakteristik kemiskinan. Melainkan orang yang memiliki seperangkat pengetahuan keberfungsian sosial dalam studi kemiskinan.

- a. Kemiskinan sebaiknya tidak dilihat hanya dari karakteristik si miskin secara statis, melainkan dilihat secara dinamis yang menyangkut usaha dan kemampuan si miskin dalam merespon kemiskinannya, termasuk efektivitas jaringan sosial (lembaga kemasyarakatan dan program-program anti kemiskinan setempat) dalam menjalankan fungsi sosialnya.
- b. Indikator untuk mengukur kemiskinan sebaiknya tidak tunggal, melainkan indikator komposit dengan unit analisis keluarga atau rumah tangga dan jaringan sosial (*social network*) yang ada disekitarnya.
- c. Konsep kemampuan sosial (*social capabilities*) dipandang lebih lengkap daripada konsep pendapatan (*income*) dalam memotret kondisi sekaligus dinamika kemiskinan.
- d. Pengukuran kemampuan sosial keluarga miskin dapat difokuskan pada beberapa key indicators yang mencakup kemampuan keluarga miskin memperoleh mata pencaharian (*livelihood capabilities*), memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs fulfillment*), mengelola asset (*asset management*) menjangkau sumber-sumber (*access to resources*), berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan (*access to social capital*), serta kemampuan dalam menghadapi guncangan dan tekanan (*cope with shocks and stresses*). Sedangkan indikator kunci untuk mengukur jaringan sosial dapat mencakup kemampuan lembaga-lembaga sosial memperoleh sumberdaya (SDM dan finansial) menjalankan peran atau fungsi utamanya, mengelola asset, menjangkau sumber, berpartisipasi dalam

program anti kemiskinan (misalnya, apakah lembaga-lembaga sosial yang ada terlibat dalam program perlindungan sosial, jaringan pengaman sosial, asuransi kesejahteraan sosial) dan menghadapi goncanga dan tekanan sosial (misalnya bagaimana jaringan sosial yang ada ketika menghadapi krisis ekonomi atau bencana alam).

Penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa kemiskinan tidaklah statis. Orang miskin bukanlah orang yang pasif. Ia adalah manajemen seperangkat asset yang ada diseputar diri dan lingkungannya. Keadaan ini terutama terjadi pada orang miskin yang hidup di negara yang tidak menerapkan sistem negara kesejahteraan (*welfare state*). Sistem yang dapat melindungi warganya menghadapi kondisi-kondisi yang buruk yang tidak mampu ditangani oleh dirinya sendiri. Kelangsungan hidup individu dalam situasi ini terjadi seringkali tergantung pada keluarga yang secara bersama-sama dengan jaringan sosial membantu para anggotanya dengan pemberian bantuan keuangan, tempat tinggal dan bantuan-bantuan mendesak lainnya.

Pendekatan kemiskinan yang berkembang selama ini perlu dilengkapi dengan konsep keberfungsian sosial yang lebih bermatra demokrasi sosial ketimbang neo liberalisme. Rebounding atau pelurusan kembali makna keberfungsian sosial ini akan lebih meperjelas analisis mengenai bagaimana orang miskin menghadapi kemiskinannya, serta bagaimana struktur rumah tangga, keluarga, kekerabatan dan jaringan sosial mempengaruhi kehidupan orang miskin. Paradigma

baru lebih menekankan pada “apa yang dimiliki si miskin”, ketimbang “apa yang tidak dimiliki si miskin”.

## 7. Pekerjaan Sosial dan Kemiskinan

Sejak kelahirannya sekian abad lalu, pekerjaan sosial (*social work*) telah terlibat dalam penanggulangan kemiskinan. Perkembangan pekerjaan sosial berikutnya, khususnya dari kegiatan karikatif menjadi sebuah profesi, juga tidak dapat dilepaskan dari penanganan kemiskinan. Penerapan the Elizabeth Poor Law di Inggris sebagai strategi menghadapi kemiskinan akibat the Great Depression tahun 1930-an tercatat sebagai salah satu momentum penting dalam sejarah perkembangan profesi pekerjaan sosial.

Secara konseptual pekerjaan sosial memandang bahwa kemiskinan merupakan persoalan-persoalan multidimensional, yang bermatra ekonomi sosial dan individual-struktural. Berdasarkan perspektif ini, ada tiga kategori kemiskinan yang menjadi pusat perhatian pekerjaan sosial, yaitu:

- a. Kelompok yang paling miskin (*destitute*) atau yang sering didefinisikan sebagai fakir miskin. Kelompok ini secara absolut memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan (umumnya tidak memiliki sumber pendapatan sama sekali) serta tidak memiliki akses terhadap pelayanan sosial.
- b. Kelompok miskin (*poor*). Kelompok ini memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan namun secara relative memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar (misalnya, masih memiliki sumber-

sumber finansial, memiliki pendidikan dasar atau tidak buta huruf).

- c. Kelompok rentan (*vulnerable group*). Kelompok ini dapat dikategorikan bebas dari kemiskinan, karena memiliki kehidupan yang relative lebih baik ketimbang kelompok destitute maupun miskin. Namun sebenarnya kelompok yang sering disebut "*near poor*" (agak miskin, ini masih seringkali berpindah dsari status "rentan" menjadi "miskin" dan bahkan "*destitute*" bila terjadi krisis ekonomi dan tidak mendapat pertolongan sosial

Secara tegas, memang sulit mengkategorikan bahwa sasaran garapan pekerjaan sosial melihat bahwa kelompok sasaran dalam menangani kemiskinan harus mencakup tiga kelompok miskin secara simultan. Dalam kaitan ini, maka seringkali orang mengklasifikasikan kemiskinan berdasarkan "status" atau "profil" yang melekat padanya yang kemudian disebut penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Belum ada hasil penelitian yang komprehensif apakah mereka ini tergolong pada kelompok destitute, poor atau vulnerable. Namun dapat diasumsikan bahwa proporsi jumlah PMKS diantara ketiga kategori tersebut membentuk piramida kemiskinan. Kelompok terbesar diperkirakan berada pada kategori paling miskin, dikuti oleh kategori miskin dan rentan.

Pekerjaan sosial adalah profesi pertolongna kemanusiaan yang bertujuan untuk membantu individu, keluarga, kelompok dan masyarakat agar mampu



menjalankan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan peranannya. Sebagaimana halnya profesi kedokteran berkaitan dengan konsepsi kesehatan, psikolog dengan konsepsi perilaku adekwat, guru dengan konsepsi pendidikan, dan pengacara dengan konsepsi keadilan, maka keberfungsian sosial merupakan konsepsi yang penting bagi pekerjaan sosial karena merupakan pembeda antara profesi pekerjaan sosial dengan profesi lainnya.

Maka. Pendekatan pekerjaan sosial dalam menjalani kemiskinan juga pada dasarnya harus diarahkan untuk meningkatkan keberfungsian sosial (*social functioning*) masyarakat miskin yang dibantunya.

Konsep keberfungsian sosial pada intinya menunjuk pada kapabilitas (*capabilities*) individu, keluarga atau masyarakat dalam menjalankan peran-peran sosial di lingkungannya. Konsepsi ini mengedepankan nilai bahwa klien adalah subyek pembangunan; bahwa klien memiliki kapabilitas dan potensi yang dapat dikembangkan dalam proses pertolongan, bahwa klien memiliki dan/atau dapat menjangkau, memanfaatkan, dan memobilisasi asset dan sumber-sumber yang ada di sekitar dirinya. Morales dan Sheafox (1989:18) menyatakan: *Social functioning is a helpful conceot because it takes into consideration both the environment characteristics of the person and the forces from the environment. It suggests that a person brings to the situation a set of behaviors, needs, and beliefs that are the result of his or her unique experiences from birth. Yet it also recognizes the whatever is brought to the situation must be related to the world as the person confronts it. It is in the*

*transactions between the person and the parts of that person's world that the quality of life can be enhanced or damaged. Herein lies the uniqueness of social work.*

Strategi penanganan kemiskinan pekerjaan sosial terfokus pada peningkatan kemampuan orang miskin dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan sesuai dengan statusnya. Namun, karena tugas-tugas kehidupan dan status merupakan konsepsi yang dinamis dan multi wajah, maka intervensi pekerjaan sosial senantiasa melihat sasaran perubahan (orang miskin) tidak terpisah dari lingkungan dan situasi yang dihadapinya. Prinsip ini dikenal dengan pendekatan "*person-in-environment* dan "*person-in-situation*". Dianalogikan dengan strategi pemberian ikan dan kail, maka strategi pengentasan kemiskinan tidak hanya bermatra individual, yakni dengan memberi ikan dan memberi kail kepada si miskin. Lebih jauh lagi, pekerjaan sosial berupaya untuk mengubah struktur-struktur sosial yang tidak adil, dengan:

- a. Memberi keterampilan memancing
- b. Menhilangkan dominasi kepemilikan kolam ikan oleh kelompok-kelompok elit dalam masyarakat dan
- c. Mengusahakan perluasan akses pemasaran bagi penjualan ikan hasil memancing tersebut.

Berdasarkan analogi tersebut, maka ada dua pendekatan pekerjaan sosial yang satu sama lain saling terkait. Pendekatan pertama melihat penyebab kemiskinan dan sumber-sumber penyelesaian kemiskinan dalam kaitannya dengan lingkungan di mana si miskin tinggal,

baik dalam konteks keluarga, kelompok pertemanan (*peer group*), maupun masyarakat didasari oleh pertimbangan ini. Pendekatan kedua melihat si miskin dalam konteks situasinya, *strategy* pekerjaan sosial berpijak pada prinsip-prinsip *individualization* dan *self determinism* yang melihat si miskin secara individual yang memiliki masalah dan kemampuan unik. Program anti atau masalah-masalah yang dihadapinya. Beberapa bentuk program penanganan kemiskinan yang didasari dua pendekatan ini antara lain:

- a. Pemberian bantuan sosial dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh panti-panti sosial.
- b. Program jaminan, perlindungan dan asuransi kesejahteraan sosial.
- c. Program pemberdayaan masyarakat meliputi pemberian modal usaha, pelatihan usaha ekonomi produktif. Pembentukan sosial dan koperasi, pelatihan dan pembinaan keluarga muda mandiri, pembinaan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan anak dan remaja.
- d. Program kedaruratan, misalnya, bantuan uang, barang dan tenaga bagi korban bencana alam
- e. Program 'penanganan bagian yang hilang'. Strategi yang oleh Caroline Moser disebut sebagai 'the missing piece strategy', ini meliputi program-program yang dianggap dapat memutuskan rantai kemiskinan melalui penanganan salah satu aspek kunci kemiskinan yang kalau "disentuh" akan membawa dampak pada aspek-aspek lainnya. Misalnya, pemberian kredit, pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE), bantuan stimulant untuk usaha-usaha ekonomis produktif skala mikro.

## 8. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial

Indonesia adalah negara besar dalam banyak hal. Selain memiliki luas wilayah, jumlah penduduk, dan utang yang besar, Indonesia memiliki penduduk yang miskin besar pula. Jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini yang hamper mencapai 40 juta orang jauh melampaui keseluruhan jumlah penduduk di Selandia Baru (sekitar 4 juta orang), serta Australia dan Malaysia dengan penduduk masing-masing berjumlah sekitar 10 juta dan 24 juta jiwa.

Lebih miris lagi jika kita menyaksikan kasus busung lapar yang menerpa Indonesia sejak lama. Fenomena busung lapar yang saat ini menggegerkan Indonesia, terutama kasus yang terjadi di NTT dan NTB; adalah puncak gunung es dari gunung masalah kemiskinan yang paling ekstrim dan purba, yakni kelaparan. Bagi kita yang terbiasa makan ayam goreng di KFC atau McDonald, menyantap pizza, spaghetti atau fulisi di Pizza Hut, atau setidaknya jajan bakso dan bakwan goren di kaki lima rasanya masalah kelaparan kelewat parah untuk Indonesia jaman kini. *'hari gini masing busun lapar...?* Adalah pertanyaan dalam Bahasa gaul yang sesungguhnya teramat getir.

Potret kemiskinan di atas sesungguhnya akan lebih buram lagi, jika pengukuran kemiskinan menggunakan garis kemiskinan (*poverty line*) yang lain yang lebih "manusiawi". Alat ukur yang dipergunakan saat ini berdasarkan pada konsep kemiskinan absolut yang lebih menekankan pemenuhan kebutuhan makanan, yakni sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membeli makanan setara 2,100 kalori per

orang perhari. Kebutuhan non makanan, seperti pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa masih belum diperhatikan secara memadai dalam indicator yang sering digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) itu. Walhasil, jika garis kemiskinan dari Bank Dunia sebesar \$2 per hari per orang yang digunakan, jumlah orang miskin di tanah air akan lebih membengkak lagi, mirip perut orang yang mengalami busung lapar maupun busung kenyang.

Salah satu strategi penanggulangan kemiskinan yang sangat erat kaitannya dengan perspektif pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial adalah perlindungan sosial (*social protection*). Setiap manusia, kaya maupun miskin, tinggal di negara maju maupun negara berkembang senantiasa dihadapkan pada resiko yang mengancam kehidupannya setiap saat, setiap detik. Perlindungan sosial adalah skema untuk melindungi anggotanya dari berbagai resiko dalam kehidupannya, maupun yang timbul dari lingkungannya (menganggur, bencana alam/sosial). Secara konseptual, perlindungan sosial mencakup:

a. Bantuan sosial

Skema jaminan sosial (*social security*) yang berbentuk tunjangan uang, barang atau pelayanan kesejahteraan yang umumnya diberikan berdasarkan “test kemiskinan” tanpa memperhatikan kontribusi sebelumnya (*prior contribution*). Tunjangan kesejahteraan bagi keluarga miskin, penganggur, anak-anak penyandang cacat lanjut usia merupakan beberapa contoh bantuan sosial.

b. Asuransi sosial

Skema jaminan sosial yang hanya diberikan kepada para peserta sesuai dengan kontribusinya, yakni berdasarkan premi atau tabungan yang dibayarkannya. Sistem asuransi kesehatan dan pension adalah dua bentuk asuransi sosial yang banyak diterapkan di banyak negara.

c. Kebijakan-kebijakan pasar kerja (*labour market policies*)

Pekerjaan adalah bentuk perlindungan sosial yang berkelanjutan. Kebijakan pasar kerja merupakan kebijakan publik untuk meregulasi dunia kerja yang dapat menstabilkan hukum penawaran dan permintaan kerja, serta melindungi tenaga kerja dari resiko-resiko di tempat kerja. Kebijakan ini umumnya terdiri dari kebijakan pasar kerja aktif (penciptaan kesempatan kerja, peningkatan kapasitas SDM, mediasi antara pemberi dan pencari kerja) dan kebijakan pasar kerja pasif (perbaikan sistem pendidikan, penetapan standar upah minimum, pembayaran pesangon bagi yang terkena PHK, keamanan dan keselamatan kerja).

d. Mekanisme dan jaring pengaman sosial berbasis masyarakat

Sejak berabad-abad lalu, Indonesia sudah kaya dengan budaya dan inisiatif lokal dalam merespon masalah dan kebutuhan rakyat kecil. Di pedesaan dan perkotaan, terdapat kelompok pengajian, kelompok dana kematian yang secara swadaya,

partisipatif, egaliter menyelenggarakan pelayanan sosial. Depsos menyebut sistem perlindungan sosial semacam ini dengan istilah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM).

Dengan demikian, konsepsi tentang perlindungan sosial sejalan dengan perspektif pengembangan (*developmental perspective*) sebagaimana dibahas pada Bab I, yang memadukan pandangan neo liberal dan demokrasi sosial. Karena, selain mencakup program-program sosial yang bersifat residual perlindungan sosial, menurut konsepsi pekerjaan sosial, dapat dilihat pada berikut ini.

**Tabel 2.2**  
Perlindungan Sosial dalam Konsepsi Pekerjaan Sosial

Jenis Perlindungan Sosial	Ideologi	Pendekatan	Aktor
Bantuan sosial	Neo-liberal	Residual	Negara, Orsos, LSM
Asuransi Sosial	Demokrasi Sosial	Institusional	Negara, Swasta
Kebijakan Pasar Kerja	Demokrasi Sosial	Institusional	Negara
Jaring Pengaman Sosial Berbasis Masyarakat	Neo - Liberal	Residual	Institusi Lokal

### E. Strategi Pemecahan Masalah Kemiskinan

Dalam upaya mengatasi dan memecahkan masalah kemiskinan banyak pakar dan ahli mengungkapkan berbagai pendapat dan kebijakan yang harus ditempuh oleh

pemerintah. Pendapat para pakar tersebut dapat dilihat dalam uraian dibawah ini.

Adam, Hauff dan John (2002) dengan tegas menyatakan bahwa aktor utama yang harus menjalankan perlindungan sosial adalah negara, khususnya yang menyangkut skema jaminan sosial (bantuan sosial dan asuransi sosial) dan kebijakan pasar kerja. Menurutnya: “... *the critical task of establishing and designing a system of social security is the responsibility of the state.*” “*This system has to protect the population against social risks and to ensure an adequate standard of living*” (dalam, Hauff dan John, 2002:17).

Selanjutnya disebutkan oleh Hauff dan John (2002:17). Banyak orang memberikan penilaian bahwa perlindungan sosial yang dilakukan negara bersifat mahal, boros dan karenanya kontradiktif dengan pembangunan ekonomi. Karenanya pernyataan bahwa perlindungan sosial yang berbasis negara tidak bermanfaat bagi pembangunan ekonomi adalah asumsi yang kelirum, karena tidak didasari landasan teori dan penelitian empiris. Kebijakan jaminan sosial negara yang diterapkan di negara maju dan berkembang telah:

1. Memberi kontribusi penting bagi pencapaian tujuan ideal bangsa, seperti keadilan sosial dan kebebasan individu, dan karenanya mendukung kedamaian dan keamanan sosial.
2. Mencegah atau memberi kompensasi terhadap dampak negatif yang timbul dan sistem produksi ekonomi swasta, seperti perusahaan bisnis dan asuransi swasta, dan
3. Menciptakan modal manusia (human capital) dan pra kondisi bagi penguatan produktivitas ekonomi mikro



dan makro, dan karenanya memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan (Adam, Hauff dan John 2002: 18).

Senada dengan temuan di atas, Lampert dan Althammer (2001:436) juga menyatakan bahwa banyak kritik telah salah menilai dan mengesampingkan bukti-bukti sejarah yang menunjukkan betapa jaminan sosial negara telah membangun dan merealisasikan masyarakat yang humanis dan tingkat kesejahteraan sosial yang tinggi, Abramovitz (1981:2), memberi bukti yang lebih jelas lagi, ketika menyatakan perluasan peran ekonomi pemerintah, termasuk dukungannya terhadap pencapaian pencapaian pendapatan minimal, perawatan kesehatan, asuransi sosial dan elemen-elemen lain dari sistem negara kesejahteraan, telah sampai pada satu kesimpulan bahwa jaminan sosial negara adalah bagian dari proses produksi itu sendiri.

Suharto, (2005) mengungkapkan bahwa strategi penanganan kemiskinan pekerjaan sosial terfokus pada peningkatan kemampuan orang miskin dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan sesuai dengan statusnya. Namun, karena tugas-tugas kehidupan dan status merupakan konsepsi yang dinamis dan multi wajah, maka intervensi pekerjaan sosial senantiasa melihat sasaran perubahan (orang miskin) tidak terpisah dari lingkungan dan situasi yang dihadapinya. Prinsip ini dikenal dengan pendekatan "*person in environment dan person in situasion*". Dianalogikan dengan strategi pemberian ikan dan kail, maka strategi pengentasan kemiskinan tidak hanya bermatra individual, yakni dengan memberi kain kepada si miskin. Lebih jauh

lagi, pekerjaan sosial berupaya untuk mengubah struktur-struktur sosial yang tidak adil, dengan:

1. Memberi keterampilan memancing
2. Menghilangkan dominasi kepemilikan kolam ikan oleh kelompok-kelompok elit dalam masyarakat dan
3. Mengusahakan perluasan akses pemasaran bagi penjualan ikan hasil memancing tersebut.

Berdasarkan analogi tersebut, maka ada dua pendekatan pekerjaan sosial yang satu sama lain saling terkait. Pendekatan pertama melihat penyebab kemiskinan dan sumber-sumber penyelesaian kemiskinan dalam kaitannya dengan lingkungan dimana si miskin tinggal, baik dalam konteks keluarga, kelompok pertemanan (*peer group*), maupun masyarakat. Penanganan kemiskinan yang bersifat kelembagaan (*institutional*) biasanya didasari oleh pertimbangan ini. Pendekatan kedua melihat si miskin dalam konteks situasinya, strategi pekerjaan sosial berpijak pada prinsip-prinsip *individualization* dan *self determinism* yang melihat si miskin dalam konteks situasinya, strategi pekerjaan sosial berpijak pada prinsip-prinsip *individualization* dan *self determinism* yang melihat si miskin secara individual yang memiliki masalah dan kemampuan unik. Program anti kemiskinan dalam kaca mata ini disesuaikan dengan kejadian-kejadian dan/atau masalah-masalah yang dihadapinya. Beberapa bentuk program penanganan kemiskinan yang didasari dua pendekatan ini antara lain:

1. Pemberian bantuan sosial dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh panti-panti social
2. Program jaminan, perlindungan dan asuransi kesejahteraan sosial.

3. Program pemberdayaan masyarakat yang meliputi pemberian modal usaha, pelatihan usaha, pelatihan usaha ekonomi produktif, pembentukan pasar sosial dan koperasi, pelatihan dan pembinaan keluarga muda mandiri, pembinaan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan anak dan remaja.
4. Program kedaruratan. Misalnya bantuan uang, barang dan tenaga bagi korban bencana alam.
5. Program “penanganan bagian yang hilang”. Strategi yang oleh Caroline Moser disebut sebagai “*the missing piece strategy*” ini meliputi program-program yang dianggap dapat memutuskan rantai kemiskinan melalui penanganan salah satu aspek kunci kemiskinan yang kalau “disentuh” akan membawa dampak pada aspek-aspek lainnya. Misalnya, pemberian kredit, pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE), bantuan stimulant untuk usaha-usaha ekonomis produksi skala mikro.

Disisi lain Suharto (2005) mengungkapkan tanggungjawab negara dalam membangun dan mengembangkan sistem perlindungan sosial juga dilandasi konstitusi, baik pada aras internasional maupun nasional. Kematian anak-anak akibat busung lapar di NTT atau gizi buruk lainnya di NTT, Lampung dan daerah lain, sangat berkaitan dengan kemiskinan dan lemahnya perlindungan sosial. Kejadian itu harus diakui sebagai akibat penelantaran dan pengabaian yang dilakukan oleh negara (*state neglect*). Pemerintah dan perangkatnya, termasuk Pemda dan DPRD tidak melaksanakan mandat, *state obligation* sebagaimana diamanatkan konvensi internasional, maupun konstitusi

nasional. Negara tidak menerapkan kebijakan dan menerapkan langkah-langkah efektif untuk memenuhi (*to fulfill*), melindungi (*to protect*) dan menghargai (*to respect*) hak-hak sosial, ekonomi dan budaya warga.

Deklarasi Universal HAM pasal 25 ayat 1 menyatakan "Setiap" orang berhak atas standar hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya". Konvenan International Hak-Hak Ekonomi, sosial, budaya (Ekosob) Pasal 11 menyatakan "Negara-negara penandatangan Konvenan mengakui hak setiap orang atas standar hidup yang layak untuk diri dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian dan perumahan. Dalam konstitusi Indonesia, hak atas standar hidup layak telah diakui sebagai HAM. Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 Amandemen II menetapkan "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan "UU No. 39 tahun 1999, tentang HAM pasal 11 menyatakan "Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tubuh dan berkembang secara layak". Hak-hak sosial di atas merupakan kewajiban negara sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 ayat 4 Amandemen II yang menyatakan "Perlindungan pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak azasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah". Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi dan menghapuskan kemiskinan, antara lain merumuskan standar garis kemiskinan dan menyusun kantong-kantong kemiskinan. Di samping itu banyak program yang disusun untuk dilaksanakan di lapangan seperti terus memacu pertumbuhan ekonomi nasional, menyediakan fasilitas

kredit bagi masyarakat miskin antara lain melalui pemberian bantuan dana IDT, program Takesra, Kukesra membangun infrastruktur di pemukiman kumuh, pengembangan model kawasan terpadu, termasuk pelaksanaan dan meningkatkan kualitas program pembangunan dan lain-lain. Kalaupun sebagian besar rakyat, misalnya di NTB, NTT dan daerah lain miskin, adalah kewajiban negara untuk secara aktif mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah progresif membebaskan warganya dari kelaparan. Program JPS, RAskin dan dana kompensasi BBM telah terbukti gagal merespon problema sosial dimasyarakat lokal.

Menurut Todaro (2000:223-224) ada empat elemen pokok dalam intervensi kebijakan pemerintah untuk memerangi kemiskinan dan pemerataan pendapatan yang diuraikan sebagai berikut yaitu:

1. Distribusi Fungsional

Elemen ini adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan tingkat hasil yang diterima dari hasil faktor-faktor produksi tenaga kerja, tanah dan modal. Semua ini sangat dipengaruhi dari harga relative dari masing-masing faktor produksi tersebut, tingkat pendayagunaannya dan bagian prosentasi dari pendapatan nasional yang diperoleh masing-masing faktor tersebut.

2. Distribusi Ukuran

Elemen ini berkaitan dengan suatu distribusi pemilikan dan penguasaan asset produksi, seperti faktor-faktor produksi non manusia atau sumberdaya fisik dan faktor manusia yang terpusat dan tersebar kelapisan masyarakat. Distribusi kepemilikan asset dan keterampilan pada akhirnya yang menentukan merata tidaknya distribusi pendapatan secara perseorangan.

3. Program Redistribusi Pendapatan

Elemen ini ditempuh dengan cara pengambilan sebagian pendapat golongan masyarakat yang berpenghasilan tinggi melalui pajak serta proporsional terhadap pendapatan dan kekayaan pribadi. Hasil pengambilan pajak ini selanjutnya dipergunakan untuk mengangkat kesejahteraan lapisan penduduk paling miskin. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemiskinan dari hasil pajak, seperti misalnya digunakan untuk berbagai program bantuan pelayanan sosial dan peningkatan kesejahteraan dan peningkatan pendapatan kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah.

4. Peningkatan Distribusi Pendapatan Langsung

Elemen ini terutama ditujukan kelompok-kelompok masyarakat yang berpenghasilan paling rendah. Sumber dana peningkatan produksi secara langsung diambilkan dari anggaran pemerintah yang berasal dari pemasukan pajak. Program peningkatan pendapatan secara langsung dari masyarakat miskin dikenal dengan pembayaran transfer (*transfer payment*). Selain itu elemen ini dilakukan melalui penciptaan subsidi pendidikan. Cara ini ditempuh agar masyarakat dapat memiliki daya beli tinggi dari pada tingkat pendapatan sebelumnya yang masih dilingkupi mekanisme pasar. Selanjutnya menurut Todaro (2000:225-226) perwujudan dari elemen tersebut, maka negara memiliki banyak pilihan alternatif kebijakan terhadap elemen-elemen yang dapat dilakukan intervensi dengan program peningkatan program

sebagai berikut: Perbaikan distribusi pendapatan fungsional melalui serangkaian kebijakan yang secara khusus dirancang untuk mengubah harga faktor-faktor produksi. Kebijakan ini berangkat dari asumsi yang dimiliki oleh tokoh-tokoh ekonomi tradisional. Pendapat tokoh ini mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat miskin maka segala macam kebijakan yang mengatur harga-harga faktor.

#### **F. Potret Pembangunan Asia**

Berdasarkan penelitian mendalam di beberapa negara di Asia Tenggara dan Asia Timur, yang kemudian dihimpundalam buku *Social Protection in Southeast and East Asia*, Erfried Adam, Michael Von Hauff dan Marei John (2002) menunjukkan bahwa lemahnya sistem perlindungan sosial telah memperburuk ketahanan negara-negara di kawasan itu dalam menghadapi krisis ekonomi yang menerpa tahun 1997. Keajaiban ekonomi yang dialami oleh negara-negara itu ternyata menjadi sangat rapuh karena tidak ditopang oleh kebijakan sosial yang pro perlindungan sosial. Dibandingkan dengan negara-negara tetangganya di ASEAN saja, Indonesia adalah negara yang sangat, untuk tidak mengatakan paling, ketinggalan dalam menerapkan program-program anti kemiskinan yang bernuasa perlindungan sosial. Tabel dibawah memperlihatkan potret pembangunan Asia berdasarkan beberapa indikator, termasuk pengeluaran nasional untuk jaminan social, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.3**

Potret Pembangunan ASIA Berdasarkan Beberapa Indikator

Negara	GDP per kapita dalam US\$ (2002)	Rangking Human Development Index (2002)	Pengeluaran Nasional untuk Jaminan Sosial (% GDP)	Pengeluaran Pendidikan (% GDP 1999-2001)	Pengeluaran Kesehatan (% GDP 2001)
Singapura	20,886	25	1,68 (1996)	Non data	1,3
Malaysia	3,905	59	0,15 (1993)	7,9	2,0
Thailand	2,060	76	0,12 (1993)	5,0	2,1
Cina	989	94	2,55 (1993)	2,3 (1990)	2,0
Philipina	975	83	3,01 (1993)	3,2	1,5
Indonesia	817	111	0,05 (196)	1,3	0,6

Sumber: Adam, Hauff dan John (2002), UNDP (2004)

### Tanggung Jawab Negara: Landasan Faktual

Adam, Hauff dan John (2002) dengan tegas menyatakan bahwa aktor utama yang harus menjalankan perlindungan sosial adalah negara, khususnya yang menyangkut skema jaminan sosial (bantuan sosial dan asuransi sosial) dan kebijakan pasar kerja. Menurut: "... *the critical task of establishing and designing a system of social security is the responsibility of the state. This system has to protect the population against social risks and to ensure an adequate standard of living*" (Adam, Hauff dan John, 2002:17).

Banyak orang memberikan penilaian bahwa perlindungan sosial yang dilakukan negara bersifat mahal, boros dan karena kontradiktif dengan pembangunan ekonomi. Buku berbasis riset setebal 408 halaman yang ditulis Adam, Hauff dan John (2002) itu menunjukkan hal sebaliknya '*... it is often forgotten in this context that social security can also make positive contribution to the economic development of an industrialized or developing nation.... Social security should therefore always be a central component of*



*economic development policy* (hlm. 17). Karenanya, pernyataan bahwa perlindungan sosial yang berbasis negara tidak bermanfaat bagi pembangunan ekonomi adalah asumsi yang keliru, karena tidak didasari landasan teori dan penelitian empiris. Kebijakan jaminan sosial negara yang diterapkan di negara maju dan berkembang telah:

1. Memberi kontribusi penting bagi pencapaian tujuan idela bangsa, seperti keadilan sosial dan kebebasan individu, dan karenanya mendukung kedamaian dan keamanan sosial;
2. Mencegah atau memberi kompensasi terhadap dampak-dampak negatif yang timbul dari sistem produksi ekonomi swasta, seperti perusahaan bisnis dan asuransi swasta; dan
3. Menciptakan modal manusia (*human capital*) dan pra kondisi bagi penguatan produktivitas ekonomi mikro dan makro, dan karenanya memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan (Adam, Hauff dan John, 2002:18)

Senada dengan temuan di atas, Lampert dan Althammer (2001:436) juga menyatakan banyak kritik telah salah menilai dan mengesampingkan bukti-bukti sejarah yang menunjukkan betapa jaminan sosial negara telah mampu membangun dan merealisasikan masyarakat yang humanis dan tingkat kesejahteraan sosial yang tinggi. Abramovitz (1981:2). Memberi bukti yang lebih jelas lagi, ketika menyatakan : perluasana peran ekonomi pemerintah, termasuk dukungannya terhadap pencapaian pendapatan minimal, perawatan kesehatan, asuransi sosial, dan elemen-elemen lain dari sistem negara kesejahteraan, telah sampai

pada satu kesimpulan bahwa jaminan sosial negara adalah bagian dari proses produksi itu sendiri.

### **Tanggungjawab Negara: Landasan Konstitusional**

Tanggung jawab negara dalam membangun dan mengembangkan sistem perlindungan sosial juga dilandasi konstitusi, baik pada aras internasional maupun nasional. Kematian anak-anak akibat busung lapar dan NTB atau gizi buruk lainnya di NTT, Lampung dan daerah lain, sangatterkait dengan kemiskinan dan lemahnya perlindungan sosial. Kejadian itu harus diakui sebagai akibat penelantaran dan pengabaian yang dilakukan oleh negara (*state neglect*). Pemerintah dan perangkatnya, termasuk Pemda dan DPRD tidak melaksanakan *mandate state obligation* sebagaimana diamanatkan konvensi internasional, maupun konstitusi nasional. Negara tidak menerapkan kebijakan dan menerapkan langkah-langkah efektif untuk memenuhi (*to fulfill*), melindungi (*to protect*) dan menghargai (*to respect*) hak-hak sosial, ekonomi dan budaya warganya.

Deklarasi Universal HAM Pasal 25 ayat 1 menyatakan “Setiap orang berhak atas standar hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya.” Konven Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial Budaya (Ekosob) Pasal 11 menyatakan “Negara-negara penandatanganan Konvenan mengakui hak setiap orang atas standar hidup yang layak untuk diri dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, dan perumahan.... “

Dalam konstitusi Indonesia, ha katas standar hidup layak telah diakui sebagai HAM. Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 Amademen II menetapkan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggi, dan

mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 11 menyatakan “Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang selayak.”

Hak-hak sosial di atas merupakan kewajiban negara sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 ayat 4 Amandemen II yang menyatakan “*Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak azasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah*”. Walaupun sebagian besar rakyat NTB dan NTT miskin, adalah kewajiban negara untuk seara aktif mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah progress membebaskan warganya dari kelaparan. Program JPS, Raskin dan dana kompensasi BBM telah terbukti gagal merespon problem sosial di masyarakat lokal.

~oOo~

## **PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN**

### **A. Konsep Dasar Pembangunan Ekonomi Kerakyatan**

Istilah pembangunan ekonomi (*economic development*) digunakan sebagai nama lain atau sinonim dari istilah “pertumbuhan ekonomi” (*economic growth*) atau bahkan: kemajuan ekonomi (*economic progress*) secara umum (Sen, 1998). Tolak ukurnya adalah tingkat ekspansi atau penambahan produk domestik bruto (GDP: Gross Domestic Product) per kapita. Di sini kesulitannya tidak terletak pada penentuan makna istilah atau pengukurannya dalam statistik nasional agregat (secara keseluruhan), melainkan bagaimana menguasai apa yang disebut pembangunan ekonomi: misalnya bagaimana caranya mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang menentukan laju peningkatan pendapatan per kapita. Ada perselisihan yang tajam antara berbagai teori atau pendekatan pembangunan ekonomi mulai dari yang neo-klasik, institusi-analisis, Keynesian (dipelopori oleh John Maunard Keysnes), dualis, ketergantungan hingga ke neo liberal (Thirwall, 1986; Todaro, 1985; Bardhan, 1988).

Namun sejak beberapa tahun terakhir ini, kemantapan konsep pembangunan ekonomi mulai mengikis, karena makna yang sesungguhnya dari konsep pembangunan semakin dipertanyakan Handbook of Development Economics (1988, 1989). Ada pendapat yang menolak pengertian sederhana dari istilah pembangunan ekonomi karena, menurut pendapat itu,

“pembangunan ekonomi” mengacu ke suatu yang lebih sekedar pertumbuhan endapatan per kapita nasional. Ada yang mencoba memasukkan lebih banyak indikator kesejahteraan ke dalam konsep tersebut; pendapat ini dilontarkan oleh aliran pemikiran yang disebut pendekatan indikator sosial (*social indicator approach*).

Penyampaian sederhana (pertumbuhan ekonomi = pembangunan ekonomi) juga mulai digugat, karena peningkatan pendapatan secara nasional tidak identic dengan meningkatnya kesejahteraan rata-rata penduduk; tidak jarang peningkatan pendapatan disertai dengan melebarnya kesenjangan kaya-miskin. Yang terakhir, sementara pengamat menghendaki disingkirkannya sisa-sisa bisa nilai yang terkandung dalam konsep pembangunan ekonomi maupun pertumbuhan ekonomi, hanya saja, mereka tidak beruntung karena segala jerih payah mereka melakukan pembangunan ekonomi justru mengakibatkan kondisi mereka makin buruk. Apa yang disebut sebagai pembangunan ekonomi oleh sistem dunia kapitalis belum tentu cocok untuk kawasan dunia lainnya, tidak selamanya cara-cara yang mereka tempuh mampu memperbaiki kondisi, ekonomi negara yang menempuhnya (Streeten, 1972, Teye; 1987; Lewis, 1989; Sen 1998; Syrquin, 1988).

Tidaklah sulit untuk mendapatkan referensi yagn mendudukan pembangunan ekonomi sebagai kunci kemajuan manusia, uraian berikut ini.

1. Sebagian besar para ahli pasti setuju bahwa pembangunan itu menyiratkan lebih dari sekedar kenaikan pendapatan riil nasional. Agar peningkatan pendapatan riil dapat terus berlangsung, maka sikap dan kebiasaan sosial juga harus disesuaikan guna

mendukungnya. Jika pemikiran ini diterima, maka kesempatan atas makna pembangunan seketika itu juga berakhir (Thirwall, 1983:85).

2. Pembangunan harus dilihat sebagai proses multidimensional yang melibatkan perubahan besar-besaran atas struktur sosial, sikap masyarakat, institusi-institusi nasional, serta akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanggulangan ketimpangan pendapatan, serta penghapusan kemiskinan absolut (Todaro, 1985:85).

Apa yang harus dikerjakan sekarang adalah merumuskan kembali makna yang sesungguhnya dari “pembangunan ekonomi”, tanpa perlu membakukannya. Kita perlu mengadakan pembedaan maknanya sebagai: (a) tingkat pertumbuhan total GDP atau GDP per kapita; (b) tingkat perubahan serangkaian indikator sosial yang mengukur kesejahteraan rata-rata individu, dan sebagai (c) distribusi pendaspatan atau kekayaan, serta keterkaitan antara satu makna dengan makna-makna lainnya.

Selanjutnya kita bisa menjajaki sifat problematis yang terkadang dalam konsep pembangunan ekonomi, dalam pengertiannya sebagai upaya peningkatan pendapatan perkapita nasional serta sebagai peningkatan kesejahteraan rata-rata atau pemerataan pendapatan secara lebih adil. Pendapatan tradisional atas pembangunan ekonomi ternyata mengabaikan kenyataan sederhana, yakni peningkatan GDP tidak selalu identic dengan penurunan kemiskinan, karena peningkatan pendapatan nasional itu memang tidak selalu digunakan untuk memberantas kemiskinan, melainkan untuk keperluan lain, misalnya memperbesar kekuatan militer, membangun proyek-proyek simbolis atau keperluan

konsumtif lainnya. Dalam membahas pembangunan ekonomi seara terbuka, artinya kita menampung semua pendapat tanpa tergesa-gesa menentukan penilaian secara sepihak. Dalam *The Odyssey of Rationality* (1989).

Albert Lauterbach (1989:221) merangkum perdebatan mengenai konsep pembangunan di bidang ekonomi sebagai berikut: meskipun makna pembangunan secara umum mengalami perubahan dari waktu ke waktu, mungkin definisi konsep pembangunan ekonomi berikut ini dapat menjembatani berbagai pendapat yang berlainan: pembangunan ekonomi merupakan suatu upaya menciptakan kondisi yang lebih baik bagi rakyat suatu upaya menciptakan makna pembangunan; sekarang secara eksplisit faktor-faktor sosial diakui arti pentingnya. Untuk lebih menyempurnakannya mungkin kita harus selalu mengaitkan analisis pembangunan ekonomi dengan teori-teori pertumbuhan yang sudah mapan. Dalam *Growth and Development* (1986). A.P. Thirwall berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bisa dibahas tanpa selalu menyertakan pembahasan mengenai pembangunan ekonomi dalam waktu bersamaan; namun secara awam pun agak sulit dimengerti bahwa suatu proses pembangunan ekonomi bisa berlangsung tanpa didasarkan pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, pengaitan antara pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bukan lagi sekedar anjuran, tapi sudah merupakan keharusan.

## **B. Strategi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan**

Kiranya mudah untuk menerima pendapat bahwa tidak ada satu pun strategi pembangunan ekonomi yang cocok digunakan oleh semua negara berkembang yang ingin

meningkatkan kesejahteraan materiil para warganya. Dikatakan demikian karena strategi yang mungkin dan tepat ditempuh dipengaruhi oleh banyak faktor seperti seperti, yaitu:

1. Persepsi para pengambil keputusan tentang prioritas pembangunan yang berkaitan dengan sifat keterbelakangan yang dihadapi oleh masyarakat.
2. Luasnya wilayah kekuasaan negara
3. Jumlah penduduk
4. Tingkat pendidikan masyarakat
5. Topografi wilayah kekuasaan negara-apakah negara kepulauan atau daratan (landlocked country)
6. Jenis dan jumlah kekayaan alam yang dimiliki, dan
7. Sistem politik yang berlaku di negara yang bersangkutan.

Berbeda halnya dengan beberapa dekade yang lalu, dewasa ini kategorisasi negara-negara terkebelakang dan sedang membangun sudah berbeda berkat pembangunan ekonomi yang sudah dilaksanakan selama ini. Kategorisasi dimaksud ialah:

1. Negara-negara terkebelakang yang masih ditandai oleh perekonomian yang agraris sifatnya.
2. Sebaliknya negara-negara yang sedang berkembang ada yang sudah mulai melakukan industrialisasi meskipun baru pada tahap permulaan dengan objek-objek yang masih sangat terbatas seperti di bidang agrobisnis.
3. Beberapa negara sudah digolongkan sebagai "*Newly Industrializing/countries*" *NIC's*, karena tahap industrialisasinya sudah demikian jauh sehingga banyak sector perekonomian yang sudah menerapkan teknologi tinggi. Di benua Asia, khususnya Negara-negara tersebut terakhir ini adakalanya dikenal dengan istilah



“Macam Asia” seperti Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia.

Dengan menyimak kategorisasi seperti yang dikemukakan di atas dan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang dihadapi, dapat disimpulkan adanya dua bentuk strategi pembangunan yang biasa ditempuh oleh negara-negara sedang berkembang ialah modernisasi pertanian dan industrialisasi.

Modernisasi pertanian. Pentingnya modernisasi pertanian harus dipandang paling sedikit dari dua sisi. Sisi yang pertama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri sendiri, terutama bahan pangan. Sisi kedua menyangkut penumbuhan dan pengembangan agrobisnis yang menghasilkan berbagai komoditi untuk ekspor.

Mengenai sisi yang pertama yaitu pemuasan kebutuhan dalam negeri sendiri dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut yang ingin dihilangkan ialah ketergantungan suatu negara kepada negara-negara lain untuk memenuhi berbagai jenis kebutuhannya. Menghilangkan segala bentuk ketergantungan merupakan sasaran yang sangat penting karena apabila tidak, akibatnya dalam berbagai bidang lain seperti bidang politik, persejataan, pinjman luar negeri, teknologi, dan berbagai bidang lain pasti muncul. Dalam kaitan itulah mengapa sebagaian besar negara-negara terbelakang dan sedang membangun pernah terlibat dengan apa yang dikenal dengan “revolusi hijau” (*green revolution*). Seperti dimaklumi, revolusi hijau pada dasarnya bertitik tolak dari dan berorientasi pada peningkatan produksi pangana. Semangat tinggi untuk terlibat dalam revolusi ini didorong oleh keinginan kuat dari negara-negara yang tersebut untuk

paling sedikit mengurangi ketergantungannya pada negara-negara lain untuk penyediaan bahan pokok tersebut dengan sasaran akhir swasembada. Hasilnya memang sangat mengembirakan bahkan dapat dikatakan mengagumkan. Ada beberapa negara yang demikian suksesnya melaksanakan revolusi tersebut sehingga negara-negara yang tadinya harus mengimpor sebagai bahan pangan yang dibutuhkannya, dapat mencukupi kebutuhannya dan bahkan ada yang sudah mampu mengekspor ke negara lain. Akan tetapi meskipun demikian, masalah yang dihadapi di sector pertanian cukup banyak dan rumit.

Telah pernah disinggung dalam buku ini bahwa struktur perekonomian dari negara-negara terbelakang bersifat agraris sentris. Hal ini berarti bahwa sebagian besar penduduk adalah masyarakat tani yang pada umumnya tinggal di daerah pedesaan. Telah dicatat pula bahwa sebagian petani tersebut masih menggunakan cara-cara bertani yang tradisional karena cara-cara itu sudah mereka kuasai dan diwarisinya secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Cara-cara demikian terbukti tidak produktif antara lain sebagai berikut, yaitu:

1. Bibit yang digunakan tidak tinggi mutunya
2. Cara mengolah tanah yang kurang baik
3. Sistem irigasi tidak memadai
4. Penggunaan pupuk terbatas pada pupuk alami
5. Kurangnya penggunaan insektisida dan pestisida untuk memberantas hama, dan
6. Kegiatan pasca panen yang berakibat pada tidak sedikitnya hasil produksi yang terbuang.

Faktor-faktor itulah yang menuntut harus terjadinya modernisasi pertanian. Dalam kaitan ini harus ditekankan bahwa hambatan yang sering dihadapi dalam modernisasi pertanian bukan semata-mata masalah penguasaan teknik bertani secara mutakhir. Bukan pula hanya karena kemampuan ekonomi yang rendah. Yang jauh lebih penting untuk mendapat perhatian ialah menemukan cara yang paling tepat untuk merubah sikap mental dari para petani tersebut.

Para pakar pertanian sering mengemukakan paling sedikit tujuh hal yang harus menjadi perhatian dalam upaya modernisasi pertanian seperti di bawah ini:

1. Memperkenalkan cara bertani yang modern seperti penggunaan mesin-mesin yang sesuai dengan topografi wilayah pertanian tertentu. Misalnya traktor dalam pengelolaan tanah, alat penuai masinal, dan alat penyemprot hama. Hal ini sering dikenal dengan istilah mekanisasi pertanian.
2. Menggunakan bibit unggul yang telah dikembangkan melalui penelitian yang dilakukan oleh para peneliti pertanian dan telah terbukti membuahkan hasil yang jauh lebih memuaskan dibandingkan dengan bibit yang selama ini dikenal oleh para petani. Pada dekade enam puluhan dan tujuh puluhan, misalnya. Di sektor pertanian tadi, ditemukan dan dikembangkan PB5 dan PB8 oleh "*International rice Research Institute*" di Los Banos, Filipina yang ternyata menghasilkan padi dalam jumlah yang jauh lebih besar perhektar dibandingkan dengan bibit-bibit yang digunakan oleh para petani di berbagai negara Asia. Dewasa ini upaya untuk menemukan dan mengembangkan varietas unggul lain terus berlanjut

sebagai bagian dari revolusi hijau tersebut di muka yang memungkinkan hasil pertanian lebih besar lagi.

3. Penggunaan insektisida dan pestisida untuk memberantas hama yang sering merusak tanaman dan pada gilirannya menurunkan produksi hasil pertanian. Ternyata melakukannya jauh lebih sulit daripada membicarakan. Para petani di negara-negara agraris menghadapi paling sedikit tiga jenis masalah dalam kaitan ini, yaitu:
  - a. Kemampuan ekonomi yang rendah yang tidak memungkinkan mereka untuk secara mudah menyisihkan dana untuk membeli obat-obat tersebut dan oleh karena itulah pemerintah di berbagai negara berkembang memberikan subsidi kepada para petani.
  - b. Para petani sering kurang pengetahuan tentang manfaat penggunaan dan pemerintah berusaha untuk menyediakan tenaga-tenaga penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para petani tersebut, dan
  - c. Juga ternyata bahwa hasil pertanian menjadi terkontaminasi dengan bahan-bahan pemberantas hama pasti tidak baik untuk kesehatan manusia.
4. Penggunaan sistem irigasi yang lebih baik agar tanaman memperoleh air yang diperlukannya untuk tumbuh dengan baik dan memberikan hasil yang diharapkan. Masalah irigasi pun bukanlah sesuatu yang mudah untuk diatasi. Masalah irigasi bukanlah masalah yang mudah untuk diatasi. masalah irigasi bukanlah masalah yang berdiri sendiri, akan tetapi berkaitan dengan masalah erosi, penebangan kayu di hutan secara tidak bertanggung jawab, berkembang pesatnya penduduk yang memerlukan lebih banyak lahan untuk pemukiman

dan bahkan memerlukan lebih banyak lahan untuk pemukiman bahkan juga “terambilnya” tanah pertanian yang produktif untuk kepentingan industry, bahkan juga untuk kegiatan olah raga kaum mapan seperti golf. Akan tetapi terlepas dari itu, sistem irigasi tetap merupakan aspek penting dari modernisasi pertanian.

5. Penggunaan pupuk yang lebih intesif. Berbagai jenis pupuk, termasuk pupuk kimiawi dan pupuk alam, diperlukan baik untuk kepentingan mempertahankan kesuburan tanah maupun untuk meningkatkannya. Masalah kemampuan ekonomi dan sikap timbul lagi dalam hal ini seperti tampak pada segi-segi lain dari modernisasi pertanian
6. Intensifikasi pertanian. Jika hal-hal yang telah disinggung di muka terlaksana dengan baik, salah satu hasilnya ialah kemungkinan intensifikasi. Pada dasarnya intensifikasi berarti pertanian yang meningkatkan produktivitas tanah perhektar misalnya dengan tetap menanam satu jenis tanaman andalan tertentu, apakah itu tanaman pangan untuk konsumsi dalam negeri atau tanaman lain untuk diekspor.
7. Diverifikasi dan ekstensifikasi. Kiranya telah umum diketahui bahwa yang dimaksud dengan diversifikasi dan ekstensifikasi pertanian ialah upaya yang sistematis untuk menganekaragamkan jenis-jenis tanaman pertanian yang tidak terpukau hanya pada satu tanaman andalan. Sasarannya pun bermacam-macam seperti penyuburan tanah, peningkatan produktivitas, dan peningkatan penghasilan petani.

Di muka telah disinggung bahwa masalah modernisasi pertanian tidak berkisar pada posisi ekonomi para petani yang rencah yang tidak serta merta memungkinkan mereka menggunakan pupuk, obat hama, dan mekanisasi pertanian. Masalah-masalah tersebut memang merupakan masalah nyata. Akan tetapi tidak kalah pentingnya ialah mengatasi masalah rendahnya pengetahuan dan keterampilan pertanian modern, yang pada umumnya mengarah kepada masalah sikap mental yang berkisar pada kecenderungan menolak perubahan. Empat masalah yang tampaknya menonjol ialah: Masalah tradisi dan adat istiadat yang demikian mengakarnya sehingga menjadi penghalang bagi peningkatan produktivitas petanian. Yang dimaksud ialah bahwa pada umumnya di negara-negara terbelakang dan sedang membangun, tanah milik seseorang dipandang sebagai wujud kekayaan dan symbol status yang sangat penting. Demikian pentingnya status tanah sebagai wujud kekayaan seseorang sehingga suatu keluarga akan berupaya keras agar tanah dimilikinya jangan sampai berkurang dan bahkan jika mungkin bertambah. Orang tua tidak akan puas jika tidak mewariskan sebidang tanah kepada anaknya yang sudah menikah. Memang luas tanah milik seseorang akan kecil karena orang tua mewariskan tanah miliknya kepada semua anak-anaknya. Berkurangnya luas tanah yang dimiliki dianggap wajar akan tetapi terdapat satu implikasi pewarisan tanah yang tidak menguntungkan bagi modernisasi pertanian, yaitu sulitnya melakukan mekanisasi pertanian yang merupakan salah satu sebab turunnya produktivitas pertanian.

1. Harus diakui bahwa hasil pertanian termasuk hasil perkebunan, perikanan, dan peternakan untuk ekspor dari negara-negara terbelakang dan sedang membangun sebagian besar merupakan komoditi lemah dalam pasaran internasional dan sering tidak mampu bersaing dengan negara-negara maju yang juga mengeksport produk pertaniannya. Misalnya, dengan ditemukannya karet sintesis, karet alam menghadapi persaingan yang sangat berat di pasaran internasional. Demikian juga halnya dengan kopra dan kelapa sawit (Crude Palm Oil -CPO) yang merupakan bahan baku utama untuk berbagai jenis produk jadi seperti minyak goreng, mentega, sabun, dan lain-lain. Seperti dimaklumi, kini terdapat bahan baku substitusi untuk membuat produk-produk tersebut. Untuk minyak goreng dan mentega misalnya, kacang-kacangan dan biji-bijian makin banyak orang karena kandungan lemak dan kolesterol yang lebih rendah ketimbang kopra, dan kelapa sawit. Sabun pun makin banyak berupa detergen. Oleh karena itu, meskipun secara kuantitatif para dirinya berakibat pada peningkatan penghasilan riil para petani. Mereka dihadapkan kepada masalah peningkatan mutu dan pengetahuan tentang pemasaran karena hanya dengan demikianlah produk tersebut dapat dipasarkan, baik di dalam negeri dalam rangka swasembada maupun untuk kepentingan ekspor.
2. Kalaupun para petani bersedia untuk merubah sikap dan caranya bertani, mereka menghadapi kendala dalam bentuk ketidakadaan modal yang diperlukan untuk modernisasi pertanian. Memang benar di berbagai negara terdapat lembaga keuangan dan perbankan

tempat dimana para petani dapat meminta kredit. Akan tetapi memperoleh kredit bukanlah hal yang mudah dan sederhana karena sebagai organisasi yang mencari laba, lembaga tersebut ingin memperoleh kepastian bahwa kredit yang diberikan akan kembali pada waktunya, dalam arti pinjaman dan bunganya. Seperti dimaklumi, bank pada umumnya menggunakan lima “C” dalam mempertimbangkan mengabulkan atau tidak permohonan kredit dari para nasabahnya termasuk para petani yaitu *Capital, Character, Capability, Condition, dan Collateral*, disamping itu, para petani pada umumnya belum “bank-minded”. Pemerintah memang membantu dalam mengatasi permasalahan ini, antara lain melalui pemberian subsidi dan kebijaksanaan perkreditan yang ditujukan untuk mempermudah para petani memperoleh kredit, seperti misalnya meniadakan keharusan memberikan agunan (*Collateral*).

3. Sering di negara-negara terbelakang dan sedang berkembang tuan tanah menguasai areal tanah pertanian yang luas sedangkan para petani hanya sekedar sebagai penggarap. Di samping itu, para tengkulak yang pada umumnya terdiri dari para pedagang besar hasil pertanian yang tinggal di kota memaksakan sistem ijon. Jelas bahwa kedua sistem tersebut sangat merugikan para petani. Untuk menghilangkan atau paling sedikit mengurangi dampak negatif dari kedua sistem tersebut hampir semua negara terbelakang dan sedang berkembang melaksanakan landreform. Seperti diketahui dua sasaran utamanya ialah: (a) membagasi jumlah areal tanah yang dimiliki oleh seseorang, dan (b) agar para petani memiliki tanah yang



memungkinkannya memperoleh penghasilan yang wajar dari kegiatan pertanian yang ditekuninya.

Dari pembahasan di muka kiranya jelas bahwa meskipun banyak masalah yang dihadapi dalam proses modernisasi pertanian, alternative ini tetap merupakan alternatif yang pantas untuk ditempuh mengingat sebagian besar penduduk di negara-negara terbelakang dan sedang membangun tinggal di daerah pedesaan dan hidup dari kegiatan pertanian.

### **C. Indikator Keberhasilan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan**

Pernyataan bahwa pembangunan ekonomi menempati skala teratas dalam keseluruhan kebijaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan nasional, sebenarnya secara implisit sesungguhnya berarti bahwa pembangunan ekonomi suatu negara bangsa harus berhasil. Berikut ini disajikan berbagai alasan fundamental untuk mengatakan demikian.

#### **1. Mengentaskan Kemiskinan**

Jika diterima pendapat bahwa masih banyak warga masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan tersebut. Mengentaskan kemiskinan antara lain berarti bahwa tidak ada warga negara yang tidak mampu memuaskan berbagai kebutuhan primernya secara wajar. Akan tetapi perlu pula diperhatikan bahwa tidak cukup untuk melihat pengentasan kemiskinan semata-mata sebagai upaya peningkatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan fisik yang bersifat materiil. Jika hanya terbatas hanya pada hal itu saja, berarti yang dibicarakan hanya peningkatan taraf hidup orang per

orang. Dengan kata lain, pengentasan kemiskinan harus pula berarti peningkatan mutu hidup. Peningkatan mutu hidup menyangkut berbagai segi lain yang bukan berupa segi ekonomisnya, seperti peningkatan kemampuan untuk menunaikan kewajiban sosial, menyekolahkan anak, pengobatan dalam hal seseorang dan anggota keluarganya diserang penyakit, tersedianya dana untuk rekreasi, serta peningkatan kemampuan menabung, singkatnya menjadikan para warga negara menjadi insan yang mandiri

## 2. Menghilangkan Kesenjangan Sosial

Merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkal bahwa di masyarakat bangsa, terdapat segelintir manusia yang (sangat) kaya raya disamping para warga negara yang tergolong tidak mampu. Berarti adanya kesenjangan sosial. Pembangunan ekonomi harus berhasil untuk menghilangkan atau paling sedikit memperkecil kesenjangan tersebut. Berbagai cara yang dapat ditempuh untuk mengurangi kesenjangan sosial antara lain ialah sebagai berikut:

### a. Penciptaan lapangan kerja

Para usahawan yang berhasil memupuk kekayaan yang melimpah berkat penguasaan dan pemilikan berbagai perusahaan dalam bentuk konglomerat dan sejenisnya, tidak sepatasnya hanya berpikir untuk terus melebarkan sayap usahanya dan memupuk kekayaan yang lebih besar lagi. Memang tidak ada yang salah jika mereka berpikir dan bertindak demikian. Akan tetapi

disamping itu, mereka harus menyadari adanya tanggungjawab sosial yang harus dipikulnya. Salah satu bentuk tanggung jawab sosial tersebut ialah dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga negara lain yang memerlukan pekerjaan. Memikul tanggung jawab demikian antara lain berarti bahwa para usahawan besar jangan hendaknya berpikir semata-mata untuk menekan biaya menjalankan usaha biaya produksi, pemasaran, promosi, dan lain sebagainya misalnya dengan semaksimal mungkin memanfaatkan teknologi canggih yang pada gilirannya akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Dengan kata lain, orientasi penyelenggaraan bisnis hendaknya tidak semata-mata padat modal karya. Dengan demikian dunia usaha turut berperan aktif dalam kesenjangan sosial termasuk dengan cara menggunakan tenaga kerja yang bermukim di sekitar perusahaan jika tersedia tenaga kerja setempat yang memenuhi persyaratan organisasi atau perusahaan.

b. Peningkatan mutu kehidupan karyawan

Mengurangi kesenjangan sosial tidak hanya dengan penyediaan lapangan kerja. Bagi mereka yang berusaha meningkatkan mutu hidupnya dengan jalan bekerja bagi yang lain, berkarya tidak sekedar untuk mencari nafkah akan tetapi sebagai upaya untuk mengangkat harkat dan martabatnya sebagai insan yang terhormat. Oleh karena itu, mereka ingin diperlakukan secara manusiawi di tempat pekerjaan. Para pengusaha dapat menjalankan perlakuan demikian dengan:

- 1) Penyeliaan (supervise) yang simpatik dengan menggunakan gaya manajerial yang sesuai dengan kepribadian para bawahannya.
  - 2) Kondisi fisik yang menjamin kesehatan dan keselamatan kerja di tempat tugas
  - 3) Pemberdayaan di tempat pekerjaan dalam arti pemberian kesempatan dan kewenangan untuk mengambil keputusan yang menyangkut pekerjaan dan karier serta penghasilannya.
  - 4) Pekerjaan yang menuntut rasa tanggung jawab yang lebih besar.
  - 5) Jenis dan sifat pekerjaan yang memungkinkan pemanfaatan berbagai jenis pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.
  - 6) Sistem imbalan yang efektif berdasarkan prinsip keadilan, kewajaran, kesetaraan dengan imbalan orang lain yang melakukan tugas pekerjaan sejenis dan tanggung jawab yang sama yang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.
- c. Peningkatan kepedulian sosial

Proses pengurangan kesenjangan sosial dapat dipercepat apabila para warga negara mampu menunjukkan sikap kepedulian sosial yang tinggi. Berbagai bentuknya antara lain ialah penyediaan fasilitas umum, turut serta membiayai pendirian rumah-rumah ibadah, mendirikan pusat-pusat kesehatan masyarakat, partisipasi dalam perayaan hari-hari besar nasional yang diselenggarakan rakyat setempat, pemberian beasiswa kepada anak-anak karyawan dan masyarakat sekitar yang berprestasi, dan mungkin bentuk-bentuk lain yang menunjukkan

bahwa perusahaan merupakan bagian dari masyarakat lingkungannya dan bukan suatu masyarakat yang bersifat eksklusif.

d. Pasokan bahan secara lokal

Dalam menghasilkan barang atau jasa tertentu perusahaan pasti memerlukan bahan, baik berupa bahan mentah maupun bahan baku. Sepanjang dimungkinkan dalam arti memenuhi persyaratan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pemasokan menggunakan pasokan secara lokal dapat pula mengurangi kesenjangan karena para pemasok dapat meningkatkan kegiatan ekonominya dan dengan demikian juga penghasilannya. Bahkan mungkin turut serta menciptakan lapangan kerja bagi orang lain, meskipun tidak dalam jumlah yang besar.

e. Sistem perpajakan yang progresif

Tidak sedikit bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan rakyat yang menjadi tanggungjawab pemerintah, seperti memelihara anak-anak terlantar, memelihara orang-orang lanjut usia, jaminan sosial, mendirikan gedung-gedung sekolah, pengadaan tenaga pengajar, penyediaan fasilitas, klinik rumah sakit beserta peralatannya tenaga medis dan para medis, analisis, laboratorium, dan lain sebagainya. Bahkan pemerintah menyelenggarakan sangat banyak fungsi dan tugas dalam rangka pengaturan termasuk pemeliharaan ketertiban dan keamanan nasional. Kesemuanya itu memerlukan dana yang besar karena bidang-bidang tersebut harus pula dibangun sebagai bagian integral pembangunan nasional. Jelas bahwa makin maju suatu masyarakat bangsa, makin

besar dana yang diperlukan oleh pemerintah. Salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai berbagai kegiatan dimaksud adalah pajak. Disoroti khusus dari segi pengurangan kesenjangan antara berbagai kelompok di masyarakat, pajak mempunyai “fungsi pemerataan dan keadilan”. Artinya, para warga negara yang mampu dikenakan pajak secara progresif lebih tinggi dan digunakan untuk meningkatkan mutu hidup warga masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, kesediaan para warga negara yang mampu dan kaya untuk membayar berbagai jenis pajaknya seperti pajak kekayaan, pajak tanah, dan bangunan, pajak penghasilan perorangan, pajak penghasilan badan, pajak pertambahan nilai, pajak, barang-barang mewah dengan jujur dan tepat waktu akan mempunyai arti yang sangat penting dalam memperkecil kesenjangan tersebut.

Jika kesemuanya itu dilakukan oleh dunia usaha, akan terwujudlah solidaritas sosial yang pada gilirannya akan mempunyai dampak positif dalam bidang-bidang kehidupan lainnya.

### 3. Tersedianya Dana untuk Pembangunan Bidang-bidang Lain

Siapa pun akan menerima pandangan bahwa penyelenggaraan kegiatan pembangunan yang mencakup seluruh segi kehidupan dan penghidupan suatu masyarakat bangsa memerlukan dana yang besar. Di bidang politik, misalnya, dana dalam jumlah besar diperlukan untuk berbagai kepentingan seperti

pembiayaan kegiatan lembaga-lembaga konstitusional, melaksanakan pendidikan politik menyelenggarakan pemilihan umum secara berkala. Melaksanakan politik luar negeri, dan lain sebagainya. Di bidang pertahanan dan keamanan diperlukan dana yang tidak kecil untuk membangun angkatan bersenjata yang andal karena keada angkatan bersenjatalah tugas penjagaan keamanan umum, keutuhan wilayah, eksistensi negara, dan keselamatan nasional dipercayakan. Dana tersebut diperlukan bukan hanya untuk membayar gaji personel angkatan bersenjata dan keluarganya, akan tetapi juga untuk pemeliharaan peralatan, perlengkapan dan persenjataannya yang secara berkala perlu pula dimukhtahirkan. Hal senada dapat dikatakan tentang pembangunan di bidang sosial budaya seperti pendidikan dengan berbagai tingkatannya, keluarga berencana, jaminan sosial, kesehatan, pengembangan budaya nasional termasuk Bahasa dan berbagai sub bidang dan sector lainnya.

Pembangunan ekonomi harus berhasil karena dengan peningkatan kegiatan ekonomi, semakin banyak sumber dana yang dapat digarap dan dimanfaatkan. Peranan berbagai sumber dana yang dapat digarap dan dimanfaatkan. Peranan berbagai sumber dana tersebut semakin penting karena suatu negara bangsa bertekad untuk mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam upaya mencapai tujuan nasionalnya. Memang benar bahwa melalui kerja sama luar negeri, suatu negara mungkin memperoleh bantuan berupa hibah dan pinjaman. Jika dana bantuan seperti itu berupa bantuan tidak mengikat (*untied aid*) pemerintah penerima bantuan

dapat menggunakan untuk kepentingan yang dipandanginya paling tepat. Akan tetapi ada pula bantuan yang hanya boleh digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tertentu yang sudah disepakati bersama. Penting pula untuk disadari bahwa dalam hal mengusahakan pinjaman, suatu pemerintah biasanya sangat hati-hati sepanjang menyangkut jumlahnya, bunganya, dan waktu pengembaliannya dan persyaratan-persyaratan lainnya. Kehati-hatian itu mutlak diperlukan agar beban yang harus dipikul oleh masyarakat bangsa, baik sekarang maupun di masa depan berada dalam batas-batas kemampuan memikulnya.

#### 4. Terpeliharanya Ketertiban Umum

Dikalangan aparat keamanan sering terdapat persepsi bahwa berkurangnya, apalagi hilangnya, kesenjangan sosial akan melicinkan jalan untuk terpeliharanya ketertiban umum yang mantap. Semata-mata dilihat dari sudut pandang makin banyaknya warga negara yang mampu mempertahankan tingkat dan mutu hidup yang layak bagi manusia dengan harkat dan martabatnya semakin berkurang, pula alasan untuk menampilkan perilaku yang disfungsi. Disorot dan sudut pandang itu saja, kemutlakan keberhasilan pembangunan ekonomi merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar.

Dalam pada kenyataan di hamper semua negara di dunia, termasuk di negara-negara industry paling maju sekalipun, menunjukkan bahwa berbagai jenis kejahatan dan tindakan kriminal bukan hanya pada skala kecil seperti pencopet, pencurian, penipuan dan perampokan



yang selalu terjadi. Bentuk-bentuk dan jenis-jenis tindakan criminal dan kejahatan makin canggih seperti “predikatnya” pun makin beraneka ragam seperti kejahatan terorganisasi (*organized crime*) oleh mafia dan gang dan tidak kejahatan orang berdasi (*white, collar crime*) dengan berbagai bentuk seperti pemalsuan kartu kredit, transfer, dana kadang-kadang dalam jumlah besar dengan menggunakan “PIN” orang kaubm perdagangan senjata gelap, penjualan obat-obat terlarang, dan sebagainya.

Dengan perkataan lain, akan selalu ada warga masyarakat yang ingin menempuh jalan pintas untuk memperoleh uang. Untuk kepentingan seperti itulah kemampuan aparat keamanan, terutama polisi, harus ditingkatkan. Meskipun anggaran untuk kepentingan seperti itu pasti tersedia, jumlahnya akan dapat diperbesar jika pembangunan ekonomi berhasil.

Dari contoh-contoh di muka terlihat bahwa memang tidak ada pilihan lain bagi suatu negara kecuali mengerahkan segala kemampuan yang ada dan menggali potensi yang masih terpendam agar tujuan didirikannya negara yang bersangkutan dapat tercapai.

## **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

### **A. Konsep Dasar Pemberdayaan**

Secara konseptual, pemberdayaan atau keberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak vakum terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.

2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan akan kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusannya yang mempengaruhi mereka. Beberapa ahli di bawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses dan cara -cara pemberdayaan (Suharto, 1997:210-224):

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995).
2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, et.al., 1994).

3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 1987).
4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu mengauasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport, 1984).
5. Menurut Ife (1995:1-65), pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:
  - a. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan. Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
  - b. Ide atau gagasannya: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
  - c. Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan.
  - d. Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
  - e. Aktivitas ekonomi: kemampuan, memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.

- f. Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Dengan demikian, pemberdayaan, adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan, kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

## **B. Kelompok Lemah dan Ketidakberdayaan**

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Guna melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan perlu diketahui konsep mengenai kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang dialaminya. Beberapa

kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

1. Kelompok lemah secara structural, baik lemah secara kelas, gender maupun etnis.
2. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.
3. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan/atau keluarga.

Kelompok-kelompok tertentu yang mengalami diskriminasi dalam suatu masyarakat, seperti masyarakat kelas sosial ekonomi rendah, kelompok minoritas etnis, wanita, populasi lanjut usia, serta para penyandang cacat, adalah orang-orang yang mengalami ketidakberdayaan. Keadaan dan perilaku mereka yang berbedsa dari 'keumuman' kerap kali dipandang sebagai vian' (penyimpang). Mereka seringkali kurang dihargai dan bahkan dicap sebagai orang yang malas, lemah, yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Padahal ketidakberdayaan mereka seringkali merupakan akibat dari adanya kekurangadilan dan diskriminasi dalam aspek-aspek kehidupan tertentu.

Menurut Berger dan Nenhau dan Nisbet (Suharto, 1997), struktur-struktur penghubung; (*mediating structures*) yang memungkinkan kelompok-kelompok lemah mengekspresikan aspirasi dan menunjukkan kemampuannya terhadap lingkungan sosial yang lebih luas, kii cenderung melemah. Munculnya industrialisasi yang melahirkan spesialisasi kerja berperan sebagai struktur penghubung antara kelompok masyarakat lemah dengna masyarakat luas. Organisasi-organisasi sosial, lembaga-lembaga keagamaan (masjid, gereja)

dan lembaga keluarga yang secara tradisional merupakan lembaga alamiah yang dapat memberi dukungan dan bantuan informasi, pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan para anggotanya, cenderung semakin melmah peranannya. Oleh karena itu, seringkali sistem ekonomi yang diwujudkan dalam berbagai bentuk pembangunan proyek-proyek fisik, selain di satu pihak mampu meningkatkan kualitas hidup sekelompok orang, juga tidak jarang malah semakin meminggirkan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Sennet dan Cabb (1972) dan Conway (1979) menyatakan bahwa ketidakberdayaan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan pengalaman dalam arena politik, ketiadaan akses terhadap informasi, ketiadaan dukungan finansial, ketiadaan pelatihan-pelatihan dan adanya ketegangan fisik maupun emosional (Suharto, 1997).

Para toirutusum seperti Seeman (1985), Seligman (1972) dan Learner (1986) meyakini bahwa ketidakberdayaan yang dialami oleh sekelompok masyarakat merupakan akibat dari proses internalisasi yang dihasilkan dari interaksi mereka dengan masyarakat. Mereka menganggap diri mereka sebagai lemah, dan tidak berdaya, karena masyarakat memang menganggapnya demikian.

Seeman menyebut keadaan ini dengan istilah 'alienasi'. Sementara Seligman menyebutnya sebagai 'ketidakberdayaan yang dipelajari' (*learned helplessness*), dan Learner menamakannya dengan istilah 'ketidakberdayaan surplus' (*surplus powerlessness*) (Suharto, 1997:212-213).

Learner lebih jauh menjelaskan konsep 'ketidakberdayaan' ini sebagai proses dengan nama orang

merasa tidak berdaya melalui pembentukan seperangkat pikiran emosional, intelektual dan spiritual yang mencegahnya dari pengaktualisasian kemungkinan-kemungkinan yang sebenarnya ada. Sebagai contoh, para penerima Bantuan Sosial Keluarga (AFDC/Aid for Families with Dependent Children) merasa tidak berdaya untuk merubah program dan bentuk-bentuk pelayanan AFDC. Mereka memiliki persepsi bahwa dirinya tidak mampu, tidak berdaya, atau bahkan tidak berhak untuk merubah program-program tersebut. Menurut Kieffer (1984:9), ketidakberdayaan yang dipersepsi ini merupakan hasil dari pembentukan interaksi terus-menerus antara individu dan lingkungannya yang cukup kombinasi antara sikap penyalahan diri sendiri, perasaan tidak dipercaya, keterasingan dari sumber-sumber sosial dengan perasaan tidak mampu dalam perjuangan politik. Soloman (1979) melihat bahwa ketidakberdayaan dapat bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Menurutnya, ketidakberdayaan dapat berasal dari penilaian diri yang negative; interaksi negatif dengan lingkungan, atau berasal dari blockade dan hambatan yang berasal dari lingkungan yang lebih besar (Suharto, 1997:213-214).

Penilaian diri yang negatif. Ketidakberdayaan dapat berasal dari adanya sikap penilaian negatif yang ada pada diri seseorang yang terbentk akibat adanya Penilaian yang negatif dari orang lain. Misalnya wanita atau kelompok minoritas merasa tidak berdaya karena mereka disosialisasikan untuk melihat diri mereka sendiri sebagai orang yang tidak memiliki kekuasaan setara dalam masyarakat.



Interaksi negatif dengan orang lain. Ketidakberdayaan dapat bersumber dari pengalaman negatif dalam interaksi antara korban yang tertindas dengan sistem di luar mereka yang menindasnya. Sebagai contoh wanita atau kelompok minoritas seringkali mengalami pengalaman negatif dengan masyarakat di sekitarnya. Pengalaman pahit kemudian menimbulkan perasaan tidak berdaya, misalnya rendah diri, merasa tidak mampu, merasa tidak patut bergabung dengan organisasi sosial dimana mereka berada.

Lingkungan yang lebih luas. Lingkungan luas dapat menghambat peran dan tindakan kelompok tertentu. Situasi ini dapat mengakibatkan tidak berdayanya kelompok yang tertindas tersebut dalam mengekspresikan atau menjangkau kesempatan-kesempatan yang ada di masyarakat. Misalnya kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok gay atau lesbian dalam memperoleh pekerjaan dan pendidikan.

### **C. Indikator Keberdayaan**

Menurut Kieffer (1981), pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik dan kompetensi partisipatif (Suharto, 1997:215), Parsons et.al (1994:106) juga mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada:

1. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
2. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengenalkan diri dan orang lain.
3. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang

lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan (Parsons et al., 1994:106).

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan. Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai empowerment index atau indeks pemberdayaan, (Suharto, 2004). Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: 'kekuasaan di dalam' (*power within*), 'kekuasaan untuk' (*power to*), 'kekuasaan atas' (*power over*), dan 'kekuasaan dengan' (*power with*). Tabel 4.1 merangkum indikator pemberdayaan.

1. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar, rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
2. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan

- keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampo). Individu dianggap melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
3. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
  4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga; mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk dternak, memperoleh kredit usaha.
  5. Kebebasan relative dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah.
  6. Kesadaran hukum dan politik; mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.

7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes; seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap suami yang memukul istri, mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil penyalagunaan bantuan sosial; atau penyalagunaan kekuasaan dan pegawai pemerintah.
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, aset produksi, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya melalui tabel berikut ini:

**Tabel 4.1**  
Indikator Keberdayaan

Jenis Hubungan Kekuasaan	Kemampuan Ekonomi	Kemampuan Mengakses Manfaat Kesejahteraan	Kemampuan Kultural dan Politis
Kekuasaan di dalam: Meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi positif terhadap kontribusi ekonomi dirinya</li> <li>- Keinginan memiliki kesempatan ekonomi yang setara</li> <li>- Keinginan memiliki kesamaan hak terhadap sumber yang ada pada rumahtangga dan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepercayaan diri dan kebahagiaan</li> <li>- Keinginan memiliki kesejahteraan yang setara</li> <li>- Keinginan membuat keputusan mengenai diri dan orang lain</li> <li>- Keinginan untuk mengontrol jumlah anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assertiveness dan otonomi</li> <li>- Keinginan untuk menghadapi subordinasi gender termasuk tradisi budaya, diskriminasi hukum dan pengucilan politik</li> <li>- Keinginan terlibat dalam proses-proses budaya, hukum dan politik</li> </ul>
Kekuasaan untuk: Meningkatkan kemampuan individu untuk berubah : meningkatkan kesempatan untuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akses terhadap pelayanan keuangan mikro</li> <li>- Akses terhadap pendapatan</li> <li>- Akses terhadap asset-aset produktif dan kepemilikan rumahtangga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterampilan, termasuk kemelekakan huruf</li> <li>- Status kesehatan dan gizi</li> <li>- Kesadaran mengenai dan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mobilitas dan akses terhadap dunia di luar rumah</li> <li>- Pengetahuan mengenai proses hokum, politik dan kebudayaan</li> </ul>

memperoleh akses	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akses terhadap pasar</li> <li>- Penurunan beban dalam pekerjaan domestik, termasuk perawatan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan pelayanan kesejahteraan public</li> </ul>	
Kekuasaan atas: Perubahan pada hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumahtangga, masyarakat dan makro Kekuasaan atau tindakan individu untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrol atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan yang dihasilkannya.</li> <li>- Kontrol atas pendapatan aktivitas produktif keluarga yang lainnya.</li> <li>- Kontrol atas asset produktif dan kepemilikan keluarga</li> <li>- Kontrol atas alokasi tenaga kerja keluarga</li> <li>- Tindakan individu menghadapi diskriminasi atas akses terhadap sumber dan pasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrol atas ukuran konsumsi keluarga dan aspek bernilai lainnya dari pembuatan keputusan keluarga termasuk keputusan keluarga berencana</li> <li>- Aksi individu untuk mempertahankan diri dari kekerasan keluarga dan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aksi individu dalam menghadapi dan mengubah persepsi budaya kapasitas dan hak wanita pada tingkat keluarga dan masyarakat</li> <li>- Keterlibatan individu dan pengambilan peran dalam proses budaya, hukum dan politik</li> </ul>
Kekuasaan dengan: Meningkatnya solidaritas atau tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumahtangga, masyarakat dan makro	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bertindak sebagai model peranan bagi orang lain terutama dalam pekerjaan publik dan modern</li> <li>- Mampu memberi gaji terhadap orang lain</li> <li>- Tindakan bersama menghadapi diskriminasi pada akses terhadap sumber (termasuk hak atas tanah), pasar dan diskriminasi gender pada konteks ekonomi makro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penghargaan tinggi terhadap dan peningkatan pengeluaran untuk anggota keluarga</li> <li>- Tindakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan jaringan untuk memperoleh dukungan pada saat krisis,</li> <li>- Tindakan bersama untuk membela orang lain menghadapi perlakuan salah dalam keluarga dan masyarakat.</li> <li>- Partisipasi dalam gerakan-gerakan menghadapi subordinasi gender yang bersifat kultural, politis, hukum pada tingkat masyarakat dan makro.</li> </ul>

#### D. Strategi Pemberdayaan

Parsons et.al (1994:112-113) menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu-satunya. Satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. Namun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual; meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*); mikro, mezzo dan makro.

##### 1. Aras Mikro

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dan menjalankan tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai Pendekatan yang Berpusat pada Tugas (*task centered proach*).

##### 2. Aras Mezzo

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan

sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

### 3. Aras Makro

Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas, perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi Sistem Besar memandang iklien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan di atas dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan (Suharto, 1997:218-219).

1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. Penguatan: Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dsalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap

kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Dubois dan Miley (1992:211) memberi beberapa atau teknik yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat:

1. Membangun relasi pertolongan yang: (a) merefleksikan respon empati; (b) menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (self-determination); (c) menghargai perbedaan dan keunikan individu; (d) menekankan kerjasama klien (client partnerships).



2. Membangun komunikasi yang: (a) menghormati martabat, dan harga diri klien; (b) mempertimbangkan keragaman individu, (c) berfokus pada klien; (d) menjaga kerahasiaan klien.
3. Terlibat dalam pemecahan masalah yang: (a) memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah; (b) menghargai hak-hak klien; (c) merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar; (d) melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.
4. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui: (a) ketaatan terhadap kode etik profesi; (b) keterlibatan dalam pengembangan profesional, riset, dan perumusan kebijakan; (c) penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik; (d) penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.
5. Prinsip. Pelaksanaan pendekatan di atas berpijak pada pedoman dan prinsip pekerjaan sosial. Menurut beberapa penulis, seperti Solomon (1976), Rappaport (1981, 1984), Pinderhughes (1983), Swift (1984, Swift dan Levin (1987), Weick, Rapp, Sullivan dan Kisthardt (1989), terdapat beberapa prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial (Suharto 1997:216-217).

Dengan demikian Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Karenanya pekerja sosial dan masyarakat harus bekerjasama sebagai partner. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeen dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan. Karenanya masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang

dapat mempengaruhi perubahan, sehingga memiliki kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasan mampu pada masyarakat untuk mendapatkan solusi-solusi, yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut. Karenanya jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang maupun masyarakat untuk harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri dengan tujuan, cara dan hasil yang harus dirumuskan oleh mereka sendiri. Dengan demikian tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan. Di pihak lain pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif sehingga proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif; permasalahan selalu memiliki beragam solusi. Dengan kata lain pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara parallel.

6. Tugas Pekerja Sosial. Schwartz (1961:157-158), mengemukakan 5 (lima) tugas yang dapat dilaksanakan oleh pekerja sosial:
  - a. Mencari persamaan mendasar antara persepsi masyarakat mengenai kebutuhan mereka sendiri dan aspek-aspek tuntutan sosial yang dihadapi mereka.

- b. Mendeteksi dan menghadapi kesulitan-kesulitan yang menghambat banyak orang dan membuat frustrasi usaha-usaha orang untuk mengidentifikasi kepentingan mereka dan kepentingan orang-orang yang berpengaruh (*significant others*) terhadap mereka.
- c. Memberi kontribusi data mengenai ide-ide, fakta, nilai, konsep yang tidak memiliki masyarakat, tetapi bermanfaat bagi mereka dan menghadapi realitas sosial dan masalah yang dihadapi mereka.
- d. Membagi visi kepada masyarakat; harapan dan aspirasi pekerja sosial merupakan investasi bagi interaksi antara orang dan masyarakat dan bagi kesejahteraan individu dan sosial.
- e. Mendefinisikan syarat-syarat dan batasan-batasan situasi dengan mana sistem relasi antara pekerja sosial dan masyarakat dibentuk. Aturan-aturan tersebut membentuk konteks bagi 'kontrak kerja' yang mengikat masyarakat dan lembaga. Batasan-batasan tersebut juga mampu menciptakan kondisi yang dapat membuat masyarakat dan pekerja sosial menjalankan fungsinya masing-masing.



## *Bab 5*

# **PENDIDIKAN MATA PENCAHARIAN ALTERNATIF PENGENTASAN KEMISKINAN**

### **A. Latar Kontekstual Potensi Kemiskinan**

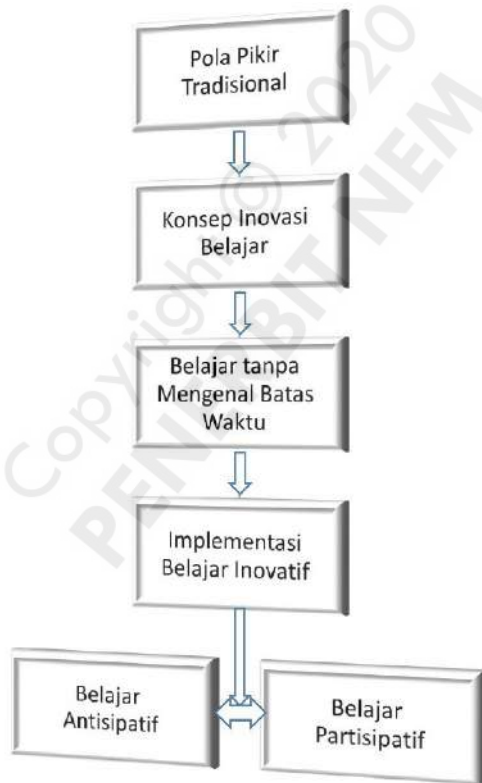
Kajian ini berangkat dari data dan fakta yang menggejala bahwa jumlah penduduk di Indonesia oleh Pusat Statistik Nasional, September 2020 berjumlah 270,2 juta jiwa. 27,54 juta jiwa di antaranya hidup di bawah garis kemiskinan dengan prosentasi sebaran di kota, 7,9 persen dan di pedesaan 13,10 persen. Kemudian data jumlah penduduk Propinsi Sulawesi Utara (2019) 2.507 jiwa dengan jumlah angkatan kerja 1,23 juta jiwa, sementara tenaga kerja yang bekerja berjumlah 1,13 juta jiwa dan 195.850 orang di antaranya hidup di bawah garis kemiskinan (BPS Sulut: September 2020). Data ini menunjukkan gejala bahwa terdapat sejumlah keluarga dalam rumah tangga hanya memiliki suami atau isteri yang bekerja menafkahi isteri atau suami, dan anak-anak dalam hidup berumah tangga. Dikaji dari aspek Ekonomi keluarga dapat dibayangkan dalam satu keluarga terdapat 4 orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua orang anak dimana mereka hidup dengan seorang sumber tenaga kerja sebagai kepala keluarga dan hanya bekerja sebagai buru tani harian, buruh tukang harian, atau pembantu rumah tangga dengan upah Rp.100.000 sd Rp.150.000.-/setiap hari. Jika hanya untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan untuk kebutuhan harian

keluarga secara darurat dapat dinyatakan cukup. Namun, ketika disertai pemenuhan kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan dampak peran sosial dalam masyarakat dapat dipastikan kepala keluarga akan sangat sulit memenuhi kebutuhan keluarga dengan bermodalkan sumber pekerjaan tunggal dalam keluarga. Kondisi ini telah berlangsung lama di Indonesia sehingga mendorong pemerintah untuk mengeluarkan sejumlah kebijakan strategis mulai dari program Kredit Usaha Tani (KUT), Kukesra/Takesra, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pinter (KIP) serta sejumlah program lainnya untuk menekan angka kesulitan biaya pendidikan, kesehatan dan biaya hidup masyarakat.

Menghadapi perkembangan peradaban perubahan yang semakin akseleratif (cepat berubah) sebagai dampak dari era destruktif 4.0 dan 5.0 (*four point zero and vive point zero*) di era teknologi digital saat ini, masyarakat mau tidak mau suka tidak suka wajib untuk mengikuti lajunya perkembangan jika tidak ingin ditinggalkan dan hidup dalam kesengsaraan. Untuk memperkecil ruang lingkup permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan ini, dibutuhkan adanya Intervensi pendidikan termasuk di dalamnya intervensi Pendidikan luar sekolah bagi masyarakat yang umumnya adalah orang dewasa, dengan menggunakan Pendekatan Pendidikan Mata Pencaharian (PMP) sebagai solusi alternatif untuk memacu dan memicu tingkat kelayakan kesejahteraan hidup masyarakat.

Kehadiran Pendidikan Luar Sekolah untuk menciptakan agen-agen pembaharu dalam proses inovasi belajar bagi masyarakat dibutuhkan kemampuan

pemahaman secara konseptual tentang karakteristik dan pola Belajar Inovatif masyarakat dalam menghadapi kompleksitas permasalahan kebutuhan belajar. Kondisi belajar masyarakat yang berangkat dari kecenderungan pola berpikir tradisional seyogiaya kita dikembangkan melalui proses adopsi inovasi dalam pendidikan agar terbentuknya pola belajar inovatif bagi masyarakat sebagaimana digambarkan berikut ini:



(Diadaptasi dari James Botkins, J.W, et al. (1984)

**Gambar 5.1** Pola Belajar Inovatif Masyarakat

Gambar di atas menjelaskan bahwa masyarakat pedesaan pada umumnya memiliki **pola pikir tradisional**

karena pengaruh pendidikan dan budaya lokal, sehingga dibutuhkan adanya konsep inovasi atau pembaharuan melalui intervensi pendidikan di antaranya pendidikan luar sekolah. Dengan adanya intervensi pendidikan ini, diharapkan akan muncul kesadaran yang terinternalisasi untuk terciptanya belajar sebagai kebutuhan yang bermuara terbentuknya konsep dan implementasi belajar tanpa mengenal batas waktu (*no limits to learning*). Dalam implementasi belajar tanpa mengenal batas waktu ini diharapkan akan masuk pada tahapan zona **Belajar Inovatif** (*Inovative Learning*). Setelah masyarakat berada pada kondisi belajar inovatif, maka masyarakat akan diarahkan untuk **Belajar Antisipatif** (*Anticipative learning*) dan belajar partisipatif (*Participatory learning*). Dikatakan belajar antisipatif karena masyarakat diarahkan untuk belajar terkait dengan kecenderungan-kecenderungan yang diperkirakan akan terjadi ke depan, sehingga yang dipelajari benar-benar mengantisipasi kemungkinan kecenderungan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan Belajar partisipatif, masyarakat diajak untuk melakukan tindakan belajar terhadap kebutuhan belajar dan rencana belajar yang telah ditetapkan.

## **B. Konsep Belajar Pendidikan Mata Pencaharian bagi Orang Dewasa**

Konsep belajar pendidikan mata pencaharian sebagai bagian integral proses pendidikan luar sekolah dipahami bahwa warga belajar pendidikan luar sekolah pada umumnya orang dewasa. Orang dewasa belajar menggunakan pendekatan Pendidikan Orang Dewasa (*Andragogy*) dan bukan pendekatan pendidikan bagi anak

didik (*Pedagogy*). Karakteristik pendidikan orang dewasa mempunyai gaya belajar yang unik dan yang lebih bersifat mandiri. Terdapat 5 gaya belajar orang dewasa menurut Stephen Brookfield (2018) yaitu: (1). *Self directed learning*, (2). *Otonomous learning*, (3). *Self teaching*, (4). *independents learning and* (5). *voluntary learning*.

Belajar dengan mengendalikan diri sendiri *Self directed learning*, ini terjadi karena orang dewasa belajar dengan mengendalikan diri sendiri. Artinya dia yang menentukan materi apa yang dia hendak pelajari. Selanjutnya *Otonomous learning* yaitu orang dewasa belajar secara otonom artinya orang dewasa yang menentukan kapan waktunya untuk belajar, dan kapan waktunya untuk berhenti atau selesai belajar. Kemudian *Self teaching* yaitu orang dewasa cenderung mengajar dirinya sendiri baik dari aspek keberhasilannya maupun dari aspek kegagalannya. Sedangkan *independents learning* bahwa Orang dewasa belajar secara mandiri baik melalui korenspondensi, atau mencari dan menemukan sumber dan media belajar secara mandiri dalam jaringan internet. Dan yang terakhir *voluntary learning* dimana orang dewasa pada hakikatnya belajar dengan sukarela dan tidak ada unsur paksaan.

Dari pemahaman karakteristik belajar orang dewasa ini maka dalam proses pendidikan mata pencaharian pendidikan luar sekolah dibutuhkan adanya kemampuan analisis kebutuhan belajar orang dewasa sebagai warga belajar, dan materi belajarnya lebih cenderung kepada pemenuhan kebutuhan untuk menopang atau menciptakan sumber pekerjaan utama yang nantinya menjadi sumber pendapatan keluarga. Dengan demikian, Pendidikan mata pencaharian terbuka untuk semua keterampilan yang siap



dipilih untuk dipelajari, ditekuni, dikembangkan dan dilestarikan.

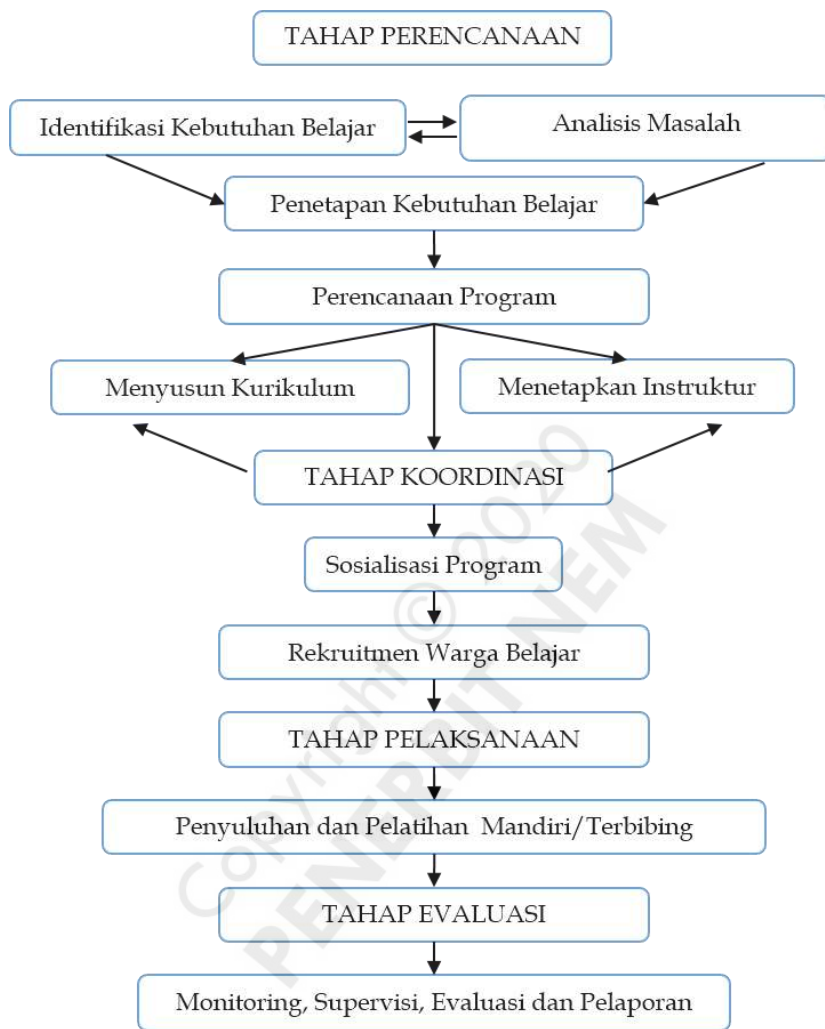
Untuk menjawab sejumlah kebutuhan belajar masyarakat, pemerintah telah dan sedang melaksanakan program pendidikan dan pelatihan melalui sejumlah keterampilan khusus oleh sejumlah instansi teknis terkait bagi masyarakat dengan harapan akan melahirkan inkubator-inkubator baru sebagai pelaku-pelaku usaha baru guna menciptakan jaringan-jaringan belajar (*learning web*) sebagai sumber belajar bagi masyarakat. Hal ini menjadi penting untuk terjadinya kesadaran yang terinternalisasi bagi masyarakat yang menjadikan belajar sebagai kebutuhan dan sekaligus menjadikan belajar sebagai bagian dari kehidupan yang bermuara pada masyarakat gemar belajar (Knowless, 2020). Jika hal ini terwujud maka akan terjadi proses penguatan potensi sumber daya masyarakat (*Empowering process in human reseouces center*).

Kenyataan di lapangan menunjukkan data dan fakta tidak sedikit masyarakat selesai mengikuti pelatihan dan keterampilan kursus tertentu pada gilirannya tidak ditindaklanjuti dengan implementasi pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki di lapangan. Hal ini Menurut Turang (2002) diduga terjadi karena pelaksanaannya lebih berorientasi pada mata anggaran yang tersedia (*Project oriented*), dan bukan pada kebermanfaatan program (*out come oriented*) karena hanya sampai pada tahapan lulusan atau luaran yang tidak disertai dengan pendampingan ke arah kemandirian (Wullur, 2010).

Universitas Negeri Manado sebagai salah satu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan

Perguruan Tinggi yang menghasilkan lulusan ilmu-ilmu murni non kependidikan mengemban tugas dan panggilan mulia menuju Visi UNIMA yang unggul, inovatif berdasarkan Mapalus yaitu berbasis kearifan budaya lokal (*local wisdom*) dan diimplementasikan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terus berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi daerah Provinsi Sulawesi Utara melalui Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada. Unima dengan sejumlah program dan produk penelitiannya sebagian telah diimplementasikan melalui program Pengabdian Kepada Masyarakat melalui pendidikan mata pencaharian dalam bentuk berbagai pelatihan kewirausahaan dan, penyuluhan bagi masyarakat. Untuk suksesnya program ini diperlukan adanya Program pendampingan bagi masyarakat sebagai warga belajar pendidikan mata pencaharian dari aspek perencanaan usaha, permodalan, dan pendampingan pemasaran produksi. Hal ini yang perlu diagendakan dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan desa binaan atau kelompok binaan dengan rancangan program pembinaan tahunan bagi pembangunan masyarakat (*multi years planning program in community development*).

Menyikapi gejala permasalahan tersebut di atas, maka ijin saya menawarkan Model Manajemen Pendidikan Mata Pencaharian bagi Masyarakat sebagai Warga Belajar PLS secara konseptual yang telah diimplementasikan dalam dunia usaha dan industri secara terbatas melalui gambar berikut ini:



Sumber: (M.Wullur, 2021)

**Gambar 5.2** Model Manajemen Pendidikan Mata Pencaharian Warga Belajar PLS

Gambar tersebut dipahami bahwa Tahapan Perencanaan: Warga belajar dipastikan mereka yang mempunyai kebutuhan khusus untuk lapangan pekerjaan sebagai hasil indentifikasi kebutuhan belajar. Dilanjutkan dengan analisis peluang pasar kerja, kebutuhan materi

belajar, sumber belajar dan media belajar, dan sumber biaya sebagai modal usaha. Selanjutnya Tahapan Koordinasi : Pastikan Sumber belajar, materi belajar, media belajar, tempat belajar, waktu belajar dan biaya belajar telah dikoordinasikan secara kolaboratif dengan pihak-pihak terkait. Tahapan Pelaksanaan: Pastikan pelaksanaan pendidikan mata pencaharian bagi warga belajar PLS terkait dengan sumber belajar, materi belajar, media belajar, tempat belajar, waktu belajar dan biaya belajar sesuai dengan perencanaan program. Sedangkan Tahapan Evaluasi program: Pastikan Evaluasi pelaksanaan Pendidikan Mata Pencaharian bagi warga belajar PLS memiliki indikator standar yang terukur yang ditetapkan sebelum dilaksanakan program kegiatan. Pada tahapan ini akan diketahui hasil-hasil yang dicapai dalam kegiatan pendidikan mata pencaharian masyarakat, kelemahan-kelemahan yang dihadapi untuk mendapatkan solusi alternatif pemecahan permasalahannya, maupun untuk mengkaji keunggulan-keunggulan yang dicapai guna pengembangan program selanjutnya.

### **C. Pendidikan Kewirausahaan**

Beberapa puluh tahun lalu banyak orang berpendapat bahwa kewirausahaan tidak dapat diajarkan. Namun dalam dekade terakhir ini kewirausahaan telah menjadi mata pelajaran yang diajarkan di sekolah - sekolah dan menjadi mata kuliah wajib di sebagian besar perguruan tinggi negeri maupun swasta, baik di dalam maupun di luar negeri. Di Indonesia, kewirausahaan juga diajarkan di berbagai kursus, seminar workshop, dan sejenisnya. Di negara-negara maju, baik Eropa maupun Amerika, setiap sepuluh menit lahir

wirausaha baru. Pertumbuhan wirausaha telah membawa peningkatan ekonomi yang luar biasa. Para pengusaha baru itu telah memperkaya pasar dengan berbaai produk dan jasa yang kreatif dan inovatif.

Ada ratusan juta orang, bahkan miliaran orang di dunia yang sudah ada di dunia kerja dan masih ada ratusan juta mahasiswa yang segera memasuki dunia kerja. Dari sekian banyak orang yang sudah ataupun akan memasuki dunia kerja, hanya 2% yang mampu mencapai karier puncak dan benar-benar sukses. Bagaimana dengan 98 % lainnya?

Apakah mereka ingin mencapai puncak karier? Apabila jawabannya adalah ya, apa yang membuat mereka tetap berada di bawah atau di tengah, bukan di puncak? Apakah mereka mengembangkan diri dan memperbesar kesempatan mereka untuk sukses? Buchari Alma menyatakan bahwa pada tahun 1980-an di Amerika Serikat lahir 20 juta wirausaha baru. Mereka menciptakan lapangan kerja baru. Demikian pula di Eropa Timur. Di negeri China yang komunis pun kini mulai membuka diri terhadap lahirnya wirausaha baru dan menerima investasi dari luar. Universitas Beijing menghapuskan mata kuliah Marxis dan menggantinya dengan mata kuliah kewirausahaan (*entrepreneur-ship*).

Transformasi pengetahuan kewirausahaan telah berjalan cepat pada decade terakhir ini. Di Indonesia, kewirausahaan diajarkan di beberapa sekolah menengah atas kejuruan dan berbagai perguruan tinggi. Beberapa diantaranya bahkan dijadikan kurikulum wajib. Pada berbagai kursus bisnis dan koperasi pun kewirausahaan menjadi materi utama, bahkan menjadi salah satu konsentrasi di program studi tertentu.

Kesimpulannya, kewirausahaan merupakan ilmu yang dapat diajarkan, dari tingkat sekolah dasar sampai pendidikan tinggi. Tujuannya adalah agar paradigma berpikir peserta didik berubah dari berorientasi menjadi pegawai menjadi mau dan mampu menjadi wirausaha.

Pengangguran dan kemiskinan terjadi karena perbandingan antara kesempatan kerja tidak sebanding dengan jumlah tenaga. Kesenjangan antara jumlah permintaan dan penawaran tenaga kerja ini perlu kita pikirkan, lebih-lebih untuk tenaga kerja yang tidak terdidik, tidak terampil, dan tenaga kerja berpendidikan rendah. Bila tidak tertampung di lapangan kerja formal, jalan satu-satunya adalah dengan membekali mereka keterampilan berwirausaha agar mereka dapat memperoleh penghasilan dan mencapai kesejahteraan.

Solusi untuk mengatasi hal itu tidak ada lain adalah bahwa setiap lulusan atau tenaga kerja baru, baik yang dihasilkan dari tingkat pendidikan paling bawah (SMP wajib Sembilan tahun) sampai dengan perguruan tinggi, dibekali dan diarahkan untuk tidak berorientasi menjadi pegawai, namun diarahkan untuk menjadi wirausaha, menjadi pengusaha kecil. Dengan begitu mereka dapat menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri, syukur kalau bisa juga untuk orang lain. Pembekalan keterampilan berwirausaha harus menjadi program pemerintah, baik jangka pendek, sedang maupun panjang, guna mensejahterakan rakyatnya.

Dengan diperkenalkannya cara-cara berwirausaha sedini mungkin, lulusan yang dihasilkan oleh setiap level pendidikan akan siap terjun menjadi wirausaha. Kurikulum SMP sebaiknya dibekali dengan mata pelajaran

kewirausahaan sehingga peserta didik tidak hanya bercita-cita menjadi orang gajian, melainkan menjadi pencipta lapangan kerja baru atau sebagai pemberi gaji bagi orang atau pihak lain.

Seorang anak laki-laki yang baru kelas 5 SD Al-Hikmah Surabaya memiliki semangat luar biasa untuk menjadi pebisnis. Anak itu, bernama Rafidh Rabbani, menyebut diri sebagai pebisnis cilik. Sehari-hari khususnya pada saat di sekolah yang menerapkan *full day school*, diwaktu jam istirahat Rafidh selalu menawarkan produk yang dibuatnya seperti *print out* gambar kartun jagoan yang diperolehnya dari browsing di internet. Gambar tersebut ditawarkan ke teman-teman sekelas, bahkan juga ke kelas lain, dengan harga rp. 1.000,- sampai 2.000,- per lebar.

Setiap hari selalu ada teman yang membeli gambarnya. Rafidh mengaku tiap hari bisa memperoleh omzet setiap hari antara Rp. 10.000,- sampai Rp. 60.000,- Anak yang luar biasa ini patut menjadi teladan bagi anak-anak yang lain. ia calon wirausaha muda Indonesia.

#### **D. Motivasi Berwirausaha**

Di negara-negara maju, keinginan seseorang untuk menjadi bos terhadap dirinya sendiri cukup besar. Mereka ingin sukses tanpa berada dibawah perintah orang lain. meskipun perusahaan baru berjalan satu tahun, mereka sudah berusaha keras untuk mewaralabakannya. Hal semacam ini akan dapat terjadi bila pemerintah memfasilitasinya dengan mempermudah pemberian hak cipta (*copyright*) dan sejenisnya.

Dalam aspek lain, keberanian seorang mahasiswa untuk berwirausaha seringkali didorong oleh dosen yang

mampu memberikan mata kuliah kewirausahaan secara praktis dan menarik. Mereka mampu membangkitkan minat mahasiswa untuk mulai berwirausaha, seperti yang terjadi di MIT, Harvard Business School, Institut Bisnis dan Informatika Indonesia, AMIK dan STMIK Raharja Tangerang, dan beberapa perguruan tinggi lain yang memiliki konsentrasi kewirausahaan.

Demi mendorong lahirnya lebih banyak wirausaha muda Indonesia Bank Mandiri, Jumat 22/1/2010) memberikan penghargaan kepada pengusaha muda di Jakarta Convention Center. Para pemenang telah melewati masa penyeleksian selama tiga bulan yang diawali dengan pendaftaran di Sembilan titik pelaksanaan, yaitu Medan, Palembang, Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Makasar, dan Denpasar. Pemberian penghargaan yang dihadiri Wakil Presiden RI Boediono, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad dan Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal tersebut juga dihadiri oleh 4,000 mahasiswa se-Jabodetabek yang sedang mengikuti workshop Wirausaha Mandiri.

Penghargaan terdiri atas tiga kategori bidang usaha, yaitu industry dan jasa, boga, dan kategori kreatif. Dari kategori mahasiswa program sarjana dan diploma, kategori usaha industry dan jasa, pemenang I adalah Ance Trio Marta (IPB), pemenang II Tri Wahyudi (Universitas Diponegoro). Kategori boga, pemenang I yaitu Dymas Tunggul Panuju (Universitas Brawijaya) dan pemenang II adalah Saiqa Ilham Akbar BS (UGM). Sementara untuk kategori kreatif dimenangkan oleh Brian Arfi Faridhi (ITS), pemenang II



Indra Haryadi (UGM). Selanjutnya, untuk kategori alumni dan pascasarjana, di bidang usaha industri dan jasa, pemenang I adalah Agung Nugroho (UGM), pemenang II Rudik Setiawan (Universitas Muhammadiyah). Kategori boga dimenangkan oleh Tririan Arianto (STT Telkom) dan Toni Hadi Putra (Universitas Jenderal Ahmad Yani). Terakhir, pada kategori kreatif, pemenang I yaitu Muhammad Satrianugraha (Institut Teknologi Nasional), dan pemenang II Atthur Sahadewa Widjaja.

Penghargaan kepada para wirausaha muda, terlebih dari kalangan mahasiswa, dimaksudkan sebagai bentuk perhatian pemerintah maupun para pengusaha, dengan harapan semakin banyak lagi generasi muda yang termotivasi untuk menggeluti dunia usaha. Setelah memperoleh kursus atau pendidikan non-gelar melalui koperasi atau koperasi kredit, bahkan setelah mendengarkan cerita sukses pengalaman bisnis yang dimiliki orang-orang sekitar, terkadang seseorang menjadi terpicu untuk menjadi wirausaha yang berhasil. Motivasi untuk menjadi wirausahaan biasanya muncul dengan sendirinya setelah seseorang merasa memiliki bekal yang cukup untuk mengelola usaha dan uga telah siap mental secara total.

Secara umum motivasi seseorang untuk menjadi wirausaha antara lain:

1. Laba: Dapat menentukan berapa laba yang dikehendaki, keuntungan uang diterima, dan berapa yang akan dibayarkan kepada pihak lain atau pegawainya.
2. Kebebasan: Bebas mengatur waktu, bebas dari supervise, bebas aturan main yang menekan atau intervensi orang lain, bebas dari aturan budaya organisasi atau perusahaan.

3. Impian personal: Bebas mencapai standar hidup yang diharapkan, lepas dari rutinitas kerja yang membosankan karena harus mengikuti visi, misi, dan impian orang lain. dapat menentukan nasib/bisi, misi dan impiannya sendiri.
4. Kemandirian: Memiliki rasa bangga karena dapat mandiri dalam segala hal, seperti permodalan, mandiri dalam pengelolaan/manajemen, mandiri dalam pengawasan, serta menjadi manajer terhadap dirinya sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa dengan berwirausaha seseorang termotiasi untuk memperoleh imbalan dalam bentuk laba, kebebasan, impian personal yang mungkin menjadi kenyataan, da kemandirian. Disamping memiliki peluang untuk mengembangkan usaha juga berpeluang untuk mengendalikan nasibnya sendiri, sebagaimana yang akan diuraikan pada subbab berikut ini. Wirausaha tidak menunggu hari atau tanggal gajian, tetapi setiap hari dapat memperoleh pendapatan secara rutin. Wirausaha akan berusaha agar sistem bisnisnya dapat dijalankan orang lain, sementara dirinya sendiri dapat melakukan aktivitas lain yang ia inginkan.

Tercatat bahwa wirausaha pada umumnya memiliki sejumlah bakat. Namun apakah keberhasilan wirausaha itu karena ia memiliki satu bakat tertentu atau gabungan dari beberapa bakat, atau karena bakatnya secara keseluruhan, para ahli belum mampu memastikannya. Para ahli hanya mencatat ada sejumlah bakat yang lazim dimiliki wirausaha, yang meliputi kemauan dan rasa percaya diri, berani mengambil tanggung ajwab, inovatif. Tabel berikut menunjukkan perbedaan esensial antara wirausaha dengan karyawan atau orang gajian.

**Tabel 5.1**  
Perbedaan antara Wirausaha dengan Karyawan

Wirausaha	Karyawan
1. Penghasilan bervariasi, tidak teratur, sehingga pada tahap awal sulit untuk megturnya. Akibatnya merasa tidak aman karena penghasilan yang tidak pasti itu	1. Memiliki penghasilan yang pasti dan teratur sehingga merasa aman, meskipun gajinya kecil
2. Memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi orang kaya. Penghasilan sebulan mungkin dapat menutupi biaya hidup satu tahun	2. Peluang kaya relative (sangat tergantung kemajuan karier)
3. Pekerjaan bersifat tidak rutin	3. Pekerjaan bersifat rutin
4. Kebebasan waktu yang tinggi (tidak terikat oleh jam kerja)	4. Waktu tidak bebas (terikat pada jadwal/jam kerja perusahaan)
5. Tidak ada kepastian (ketidakpastian tinggi) dalam banyak hal, termasuk meramalkan kekayaan	5. Ada kepastian (depot diprediksi) dalam banyak hal kekayaan dapat diramalkan/dihitung
6. Kreativitas dan inovasi dituntut setiap saat	6. Bersifat menunggu instruksi atau perintah dan atasan
7. Ketergantungan rendah	7. Ketergantungan tinggi
8. Berbagai resiko tinggi (asset dapat hilang bila dijadikan anggunan pinjaman dan usahanya bangkrut)	8. Resiko relatif rendah, bahkan dapat diramalkan
9. Terbuka peluang untuk menjadi bos	9. Menjadi bos relative sulit, apalagi bila bekerja pada perusahaan keluarga.
10. Tanggungjawab besar	10. Tanggung jawab relatif

Perlu digarisbawahi bahwa berkaitan dengan perbedaan dalam tabel di atas, hamper 75 persen yang termasuk dalam daftar orang terkaya di dunia (menurut majalah Forbes) merupakan wirausaha generasi pertama. Menurut hasil penelitian Thomas Stanley dan William

Danko, umlah pemilik perusahaan mencapai dua per tiga dari jutawan Amerika Serika. “Orang-orang yang bekerja dengan memiliki perusahaan sendiri memiliki peluang empat kali lebih besar untuk menjadi miliader dibanding orang-orang yang bekerja untuk orang lain atau menjadi karyawan perusahaan lain”.

1. Keuntungan dan Kelemahan Menjadi Wirausaha

Berbagai keuntungan menjadi wirausaha menurut Buchari Alma adalah sebagai berikut:

- a. Mendapat peluang untuk mencapai tujuan yang diinginkannya.
- b. Terbuka peluang untuk mendemonstrasikan potensi diri secara penuh
- c. Terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal
- d. Terbuka peluang untuk membantu masyarakat dengan usaha-usaha yang kongkret
- e. Terbuka peluang untuk menjadi bos, minimal bagi dirinya sendiri.

Selain keuntungan, ada pula kelemahan dengan menjadi wirausaha antara lain:

- a. Memperoleh pendapatan yang tidak pasti dan memikul berbagai resiko. Jika resiko ini telah diantisipasi secara baik, wirausaha itu akan mampu menggeser resiko tersebut.
- b. Harus bekerja keras dan dengan jam kerja yang mungkin lebih panjang
- c. Kualitas hidupnya mungkin masih rendah sampai usahanya berhasil. Pada tahap awal, wirausaha harus bersedia untuk berhemat.

- d. Memiliki tanggung jawab sangat besar. Banyak keputusan yang harus dibuat walaupun ia mungkin kurang menguasai permasalahan itu.

Saat ini tuntunan untuk menjadi wirausaha sangat besar, sebab jika hanya menandakan untuk memperoleh pekerjaan melalui perusahaan orang lain atau instansi pemerintah maka kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan sangatlah tipis. Bahkan paradigm orang tua sudah mulai bergeser. Banyak diantara mereka yang tidak lagi berpandangan negatif bila memperoleh calon menantu pengusaha/wiraswasta. Mereka tidak merasa turun gensi bila mendapatkannya. Dalam memilih menantu, para orang tua tidak lagi menuntut si calon sudah memiliki pekerjaan sebagai pegawai pemerintah maupun swasta. Sebaliknya, banyak anak muda yang baru lulus sekolah saat ini tidak malu berdagang atau berwiraswasta. Para artis pun banyak yang terjun di dunia bisnis.

Harian Kompas edisi Sabtu, 19 April 2009, menurunkan laporan hasil survey terhadap 316 pengusaha dengan judul "Saatnya dipimpin oleh Pengusaha". Menurut laporan tersebut, para pengusaha yang disurvei memandang bahwa terkait dengan persoalan ekonomi, sesungguhnya negeri kita sedang menghadapi masalah kepemimpinan. Dengan kata lain, bersangkutan paut dengan upaya keluar dari berbagai persoalan ekonomi, maka sudah seharusnya negeri ini dipimpin oleh seorang presiden yang berasal dari kalangan pengusaha. Survey Kompas tersebut juga memunculkan sejumlah nama kandidat pilihan para

pengusaha. Nama-nama yang muncul diantaranya adalah Yusuf Kalla (14,2%), Sandiaga S. Uno (7,3%), Muhammad Lutfi (3,8%), Surya Paloh (3,5%), Aburizal Bakrie (2,8%), Fadel Muhammad (2,5 %), Chaerul Tanjung dan Siswoyo Yudohusodo (1,9%) , dan masih ada 27 nama lagi (11,8%).

Laporan di atas jadi menarik karena jarang ada media masa yang mau mengeksplorasi potensi lahirnya pemimpin politik dari kalangan pengusaha atau wiraswastawan. Padahal ada keyakinan kuat di kalangan pengusaha bahwa akar masalah negara kita adalah kemiskinan, pengangguran, dan lemahnya sumber daya manusia. Jadi pas sekali kalau negara kita dipimpin oleh pengusaha atau wiraswatawan. Namun sejatinya apa yang ditulis oleh Kompas soal lahirnya pemimpin nasional berlatar belakang wiraswastawan itu sudah menjadi bagian dari imajinasi Bob Sadino sejak lama. Dalam imajinasinya yang sederhana, Bob Sadino, pemimpin yang berasal dari golongan wiraswastawan pertama-tama pasti akan berusaha keras supaya perekonomian nasional mampu berkembang lebih pesat.

Seorang pemimpin sejati yagn dari kalangan pengusaha akan berupaya sekuat tenaga untuk menggerakkan rakyatnya supaya bangkit dengan berwiraswasta. Ia juga tahu bahwa salah satu pangkal masalah pengangguran adalah pendidikan yang tidka berorientasi pada praktek. Bukan tidak mungkin bahwa pemimpin ini akan merevolusi sistem pendidikan agar lebih mengarah pada penguasaan ketrampilan dan keahlian.

2. Konsep Cash Flow Quadrant dari Robert T. Kiyosaki

Gambar di bawah ini diambil dari Cash Flow Quadrant yang ditulis oleh Robert T. Kiyosaki dalam bukunya yang berjudul *Panduan Auah Kaya Menuju Kebebasan Finansial*. Kiyosaki menawarkan konsep cemerlang sehubungan dengan cara seseorang memperoleh pendapatan. Dia mengelompokkan orang-orang dalam kuadran, yaitu:

E Anda punya Pekerjaan	B Anda memiliki sistem dan Orang bekerja untuk anda
S Anda memiliki pekerjaan	I Uang bekerja Untuk anda

**Gambar 5.3** Cash Flow Quandrnt

“E” (Pegawai). Kata “aman” atau “tunjangan” adalah ini mereka “Aman” adalah sebuah kaa yang sering digunakan untuk membeikan reaksi terhadap emosi takut. Jika seseorang yang merasa takut maka kebutuhan akan rasa aman adalah frasa yang sering digunakan, terutama, oleh mereka yang berasal dari kuadran “E”. Menyangkut uang atau pekerjaan banyak orang membenci perasaan takut yang mengiringi ketidakpastian ekonomi. Itulah sebabnya muncul hasrat akan rasa aman.

Kata “Tunjangan” berarti oran-orang juga menginginkan semacam imbalan tambahan yang disebut dengan jelas sebagai konpensasi ekstra yang sudah ditentukan dan dijamin, seperti jaminan kesehatan atau pension. Kuncinya adalah mereka ingin merasa aman.

Untuk itu mereka ingin melihatnya secara tertulis, hitam di atas putih. Ketidak pastian membuat mereka tidak bahagia. Kepastianlah yang membuat mereka bahagia. Cara berpikir mereka adalah, "Aku akan memberimu ini.. dan kau berjanji akan memberiku itu sebagai imbalannya."

Mereka ingin rasa takut mereka dipuaskan dengan beberapa derajat kepastian. Itu sebabnya mereka mencari keamanan dan perjanjian yang mengikat dalam hal pekerjaan. Memang tepat kalau mereka mengatakan "Aku tak terlalu tertarik pada uang." Bagi mereka, rasa aman bahkan lebih penting daripada uang. Seorang pegawai bisa merupakan presiden perusahaan atau tukang sapu perusahaan. Yang terpenting bukanlah apa yang mereka lakukan, tetapi perjanjian mengikat yang mereka miliki dengan orang atau organisasi yang mempekerjakan mereka.

"S" (pekerja lepas) Mereka adalah orang-orang yang ingin menjadi bos bagi diri mereka sendiri. Mereka ingin melakukan apa yang mereka mau. Mereka disebut "kelompok-melakukan-sendiri". Sering, jika menyangkut topik uang, seorang "S" sejati tidak suka jika penghasilannya tergantung orang lain. dengan kata lain, jika mereka bekerja keras, mereka berharap dibayar sesuai pekerjaan mereka. Mereka yang termasuk kelompok "S" tidak suka jika jumlah uang yang mereka hasilkan ditentukan orang lain atau oleh sekelompok orang yang mungkin tidak bekerja sekeras mereka. Jika mereka bekerja keras, bayarlah mereka dengan upah yang tinggi. Mereka juga mengerti bahwa jika tidak bekerja keras maka mereka tidak layak dibayar tinggi.



Kalau menyangkut masalah uang, mereka memiliki jiwa yang sangat independen atau sangat pribadi.

Jadi sementara orang-orang “E” atau pegawai sering bereaksi terhadap ketakutan tidak mempunyai uang dengan mencari “rasa aman” orang-orang “S” sering bereaksi dengan cara yang berbeda. Orang-orang dalam kuadran ini bereaksi terhadap rasa takut tidak dengan mencari rasa aman, tapi dengan mengambil alih kendali keadaan dan melakukannya sendiri. Itu sebabnya kelompok “S” disebut sebagai “kelompok-melakukan-sendiri”. Kalau menyangkut rasa takut dan risiko finansial. Mereka ingin “menaklukkan banteng dengan memegang tanduknya “. Dalam kelompok ini kita menemukan “professional” berpendidikan tinggi yang menghabiskan waktu bertahun-tahun di bangku kuliah, seperti misalnya dokter, pengacara, dan dokter gigi.

Dalam kelompok “S” juga terdapat orang-orang yang mengambil jalur pendidikan di luar, atau di samping aliran tradisional. Dalam kelompok ini termasuk wiraniaga komisi langsung, agen real estate, pemilik bisnis kecil seperti toko eceran, pemberih, pemilik restoran, konsultan, ahli terapi, agen perjalanan, montir mobil, tukang ledeng, tukang kayu, pengkhotbah, tukang listrik, dan artis.

Para pekerja lepas sering merupakan perfeksionis sejati. Mereka ingin melakukan segala sesuatu dengan sangat baik. Menurut pemikiran mereka, tidak ada orang lain yang bisa melakukan lebih baik daripada mereka. Jadi mereka benar-benar tak percaya orang lain bisa melakukan seperti yang mereka inginkan.... Dengan cara yang menurut mereka adalah “Cara terbaik “.

Dalam banyak segi, mereka adalah artis sejati yang memiliki gaya dan metode sendiri dalam melakukan berbagai hal. Itu menjadi alasan kita menyewa tenaga mereka. Jika mempekerjakan seorang ahli bedah otak, kita pasti ingin ahli yang sangat terlatih dan berpengalaman. Meski begitu, ini yang terpenting, kita ingin ia seorang perfeksionis. Demikian juga halnya dengan dokter gigi, penata rambut, konsultan pemasaran, tukang ledeng, tukang listrik, pengacara, atau pelatih korporat. Kita, sebagai klien yang menyewa orang ini menginginkan yang terbaik.

Bagi kelompok ini, uang bukanlah yang terpenting dalam pekerjaan mereka. Kemandirian mereka, kebebasan melakukan berbagai hal dengan cara mereka sendiri, dan dihargai sebagai ahli dalam bidang mereka, juga lebih penting daripada sekedar uang. Kalau memakai tenaga mereka, yang terbaik adalah mengatakan apa keinginan kita dan membiarkan mereka melakukannya sendiri. Mereka tidak memerlukan atau menginginkan pengawasan. Jika kita terlalu banyak ikut campur, mereka akan meninggalkan pekerjaan mereka begitu saja dan menyuruh kita menyewa orang lain. uang benar-benar bukan yang terpenting. Kemandirian merekalah yang penting.

Kelompok ini sering mengalami kesulitan saat mempekerjakan orang lain untuk melakukan tugas hanya karena, menurut mereka, tak ada yang sanggup melakukannya selain diri mereka sendiri. Hal ini membuat kelompok ini sering mengatakan: "Zaman sekarang sulit mencari pembantu yang baik." Jika kelompok ini melatih seseorang untuk melakukan tugas

mereka, orang yang dilatih itu seringkali akhirnya dibiarkan “melakukan keinginan sendiri” dan “menjadi bos diri mereka sendiri,” dan “bekerja dengan cara mereka sendiri”, mendapat kesempatan untuk mengekspresikan individualitas mereka sendiri.”

“B” (pemilik usaha). Kelompok ini nyaris bisa dikatakan sebagai lawan “S”. Seorang “B” sejati senang mengitari diri mereka sendiri dengan orang-orang pandai dari keempat kategori, “E,S,B, dan I.” Tidak seperti “S” yang tak suka mendelegasikan pekerjaan (Karena tidak ada yang bisa melakukannya dengan lebih baik), “B” sejati suka mendelegasikan pekerjaan. Moto sejati “B” adalah, “Mengapa melakukannya sendiri kalau kau bisa menyewa orang lain untuk melakukannya bagimu, dan mereka bisa melakukannya dengan lebih baik?”

Henry Ford cocok dengan kerangka ini. Seperti dikisahkan dalam sebuah cerita terkenal, sekelompok orang yang menyebut diri mereka sebagai cerdik pandai datang untuk menghakimi Ford karena ia “bodoh”. Mereka menyatakan bahwa Ford sebenarnya tidak tahu banyak. Oleh karena itu Ford mengundang mereka ke dalam kantornya dan menantang mereka untuk mengajukan pertanyaan apa saja dan ia akan menjawabnya. Dalam panel itu mereka duduk di sekeliling sang industrialis Amerika paling berkuasa, dan mulai mengajukan pertanyaan kepadanya. Ford mendengarkan pertanyaan mereka dan begitu mereka selesai, ia hanya meraih beberapa pesawat telepon di mejanya dan memanggil beberapa asistennya yang cerdas, serta meminta mereka memberikan jawaban yang diinginkan panel itu. Ia mengakhiri pertemuan itu

dengan memberitahu panel bahwa ia lebih suka menyewa orang-orang pandai berpendidikan untuk memberi jawaban yang dibutuhkan supaya ia bisa mengosongkan pikirannya untuk melakukan tugas-tugas yang lebih penting. Tugas-tugas seperti “berpikir”. Inilah salah satu kutipan yang berasal dari ucapan Ford” Berpikir adalah pekerjaan yang tersulit di dunia. Itu sebabnya hanya sedikit orang yang melakukannya”.

### 3. Kepemimpinan Membangkitkan Kemampuan Terbaik Orang

Tokoh idola Ayah Kaya dalam tulisan Robert T. Kiyosaki adalah Henry Ford. Ayah Kaya mendorong anaknya untuk membaca buku tentang orang-orang seperti Henry Ford dan John D. Rockefeller, pendiri Standard Oil. Dari mereka orang dapat mempelajari esensi kepemimpinan dan keterampilan teknis dsalam berbisnis. Banyak orang mungkin memiliki salah satu, tapi untuk menjadi seorang “B” yang berhasil, orang harus memiliki keduanya. Kedua ketrampilan itu bisa dipelajari.

Ada pendekatan ilmiah untuk mempelajari ilmu bisnis dan kepemimpinan, seperti juga ada pendekatan seni untuk mempelajari seni bisnis dan kepemimpinan. Keduanya adalah proses belajar seumur hidup. Orang dapat memulainya dengan membaca *Stone Soup* yang ditulis pada tahun 1947 oleh Marica Brown. Orang dapat membaca buku itu untuk mulai melatih diri sebagai pemimpin bisnis.

Kepemimpinan adalah kemampuan membangkitkan kemampuan terbaik orang. Ketrampilan teknis seperti membaca laporan keuangan, pemasaran, penjualan,

akuntansi, manajemen, produksi, dan negosiasi sangatlah penting. Untuk menjadi pemimpin bisnis, orang harus mempelajari cara bekerja sama dan memimpin. Keterampilan teknis bisnis lebih mudah dipelajari. Yang sulit adalah bekerja sama dengan orang lain dibutuhkan usaha keras untuk menguasainya.

#### 4. Perkembangan Keterampilan Wirausaha

Kita mungkin sering mendengar orang mengatakan keinginannya untuk memulai bisnisnya sendiri. Semakin banyak orang yang meyakinkan bahwa untuk mencapai keamanan finansial dan kebahagiaan adalah dengan “melakukan keinginan sendiri” atau “mengembangkan sebuah produk baru yang tidak dimiliki siapa pun”. Dalam banyak kasus, jalan itulah yang mereka ambil. Banyak yang akhirnya memulai bisnis jenis “S” dan bukan bisnis jenis “B”.

Yang satu tidaklah lebih baik daripada yang lain. Keduanya mempunyai kekuatan dan kelemahan sendiri-sendiri. Demikian juga risiko dan imbalannya. Kenyataannya, banyak orang ingin memulai bisnis jenis “B” namun berakhir dengan bisnis jenis “S”. Perjalanan mereka menuju sisi kanan kuadran mengalami kemacetan. Banyak wirausaha baru ingin melakukan sesuatu tetapi berakhir dengan melakukan hal lain lagi dan macet di sana. Mengapa? Karena ketrampilan teknis dan personalia yang diperlukan untuk berhasil pada masing-masing kuadrat sering berbeda. Anda harus mempelajari ketrampilan dan kerangka berpikir yang dibutuhkan dalam sebuah kuadran supaya bisa benar-benar berhasil di sana.

## 5. Perbedaan antara Bisnis Jenis “S” dan Bisnis Jenis “B”

Mereka yang merupakan individu “B” sejati bisa meninggalkan usaha selama satu tahun atau lebih dari pada saat kembali menemukan bisnis mereka ternyata lebih menguntungkan dan berjalan lebih baik daripada saat ditinggalkan. Dalam bisnis jenis “S” yang sejati, jika “S” pergi selama satu tahun atau lebih, kemungkinan besar sudah tidak ada lagi bisnis yang tersisa ketika ia kembali. Jadi apa yang menyebabkan perbedaan itu? Secara sederhana bisa dikatakan, seorang “S” memiliki sebuah pekerjaan. Sedang “B” memiliki sebuah sistem dan kemudian menyewa orang-orang yang berkompeten untuk menjalankan sistem itu. Dengan cara lain bisa dikatakan bahwa “S” adalah sistemnya, itu sebabnya dia tidak bisa pergi.

Kita ambil contoh seorang dokter gigi. Ia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk belajar menjadi sebuah sistem yang bisa melengkapi dirinya sendiri. Anda, sebagai sang klien, menderita sakit gigi. Anda berobat ke dokter gigi itu dan dia memperbaiki gigi anda. Setelah selesai, Anda kemudian membayar dan pulang. Anda senang dengan pelayanannya dan kemudian memberitahu semua teman anda tentang dokter gigi anda yang hebat. Dalam banyak kasus, dokter gigi bisa melakukan semua pekerjaannya seorang diri. Jadi jika ia pergi berlibur, demikian juga penghasilannya. Berbeda dengan pemilik bisnis “B” Ia bisa pergi berlibur selamanya karena ia memiliki sebuah sisten, bukan sebuah pekerjaan. Jika “B” sedang berlibur, uangnya masih akan terus mengalir ke koceknya.

Untuk berhasil sebagai “B” diperlukan kepemilikan atau pengendalian sistem dan kemampuan memimpin orang. Supaya “S” bisa berubah menjadi “B”, ia harus mengubah diri dan apa yang diketahuinya menjadi sebuah sistem. Banyak yang tidak bisa melakukannya, atau mereka sering terlalu saying kepada sistem mereka.

6. Bisakah Anda Membuat Hamburger yang Lebih Enak dari Hamburger MacDonal’d’s?

Banyak orang datang kepada Kiyosaki untuk meminta saran cara memulai sebuah perusahaan atau cara memperoleh uang untuk sebuah produk atau gagasan baru. Setelah sepuluh menit mendengarkan, Kiyosaki akan tahu dimana sebenarnya fokus mereka, apa pada produk atau gagasan baru. Banyak orang mengatakan, “Ini produk jauh lebih baik daripada yang dibuat perusahaan XYZ. “Aku sudah mencari kemana-mana, dan tidak ada yang menjual produk ini; yang aku akan memberikan gagasan pembuatan produk ini, yang aku inginkan hanya 25 persen dari keuntungannya.” Aku sudah bertahun-tahun merancang produk ini.”

Kata-kata seperti ini biasa beredar di sisi kira kuadran, sisi “E” atau “S”. Menurut Kiyosaki, untuk menghadapinya harus hati-hati. Kita sedang berhadapan dengan nilai inti dan gagasan yang sudah dipupuk selama bertahun-tahun, bahkan mungkin sudah diwariskan turun-temurun selama beberapa generasi. Jika tidak hati-hati atau tidak sabar, kita bisa merusak peluncuran gagasan yang mungkin saja rapuh dan sensitif itu. Yang lebih penting, dia sudah lama bersiap-siap untuk berkembang ke kuadran yang lain. pada

tahap percakapan ini Kiyosaki biasa menggunakan contoh “hamburger McDonald’s” sebagai penjelasan.

Semuanya menjawab, “Ya”. Mereka mengaku dapat menyiapkan, memasak, dan menghidangkan hamburger yang lebih baik daripada McDonald’s. Saat itulah Kiyosaki mengajukan pertanyaan berikut: “Lalu bisakah kau membangun sistem bisnis yang lebih baik daripada McDonald’s?”

Beberapa orang bisa langsung melihat perbedaan antara keduanya beberapa yang lain tidak. Dari keduanya, perbedaannya adalah apakah orang itu terpaku pada sisi kiri kuadran yang terpusat pada gagasan burger yang lebih baik, atau pada sisi kanan kuadran yang terpusat pada sistem bisnisnya. Orang harus tahu bahwa diluar sana ada banyak wirausaha yang menawarkan produk atau jasa yang jauh lebih superior daripada yang ditawarkan perusahaan multinasional superkaya, seperti juga ada miliaran orang bisa membuat burger yang lebih enak daripada McDonald’s. Tapi hanya McDonald’s yang mempunyai sistem yang telah menyajikan miliaran burger.

Jika orang mulai dapat melihat sisi yang lain, lebih baik ia pergi ke McDonald’s membeli sebuah burger dan kemudian memperhatikan sistem yang menghasilkan burger itu. Catat truk-truk yang mengantarkan burger mentah, peternah yang mengelola sapi penjual yang membeli daging sapi, dan iklan TB yang menampilkan Ronald McDonald’s. Perhatikan pelatihan orang-orang muda tanpa pengalaman untuk mengatakan hal yang sama. “Halo, selamat datang di McDonald’s, seperti juga dekorasi usaha waralaba itu, kantor-kantor perwakilan,



perusahaan roti yang memanggag roti-roti bulatnya, dan jutaan kilogram kentang goreng yang rasanya sama persis di seluruh dunia. Sertakan para pialang saham di Wall Street yang menghasilkan uang untuk McDonald's. kenyataannya adalah, terdapat gagasan baru yang tak terbatas jumlahnya, miliaran orang yang menawarkan jasa atau produk, jutaan produk, dan hanya beberapa orang yang tahu cara membangun sistem usaha yang hebat. Bill Gates dari Microsoft tidak membuat produk hebat, ia membeli produk orang lain kemudian membangun sistem global yang canggih.

*T (penanaman modal)*. Investor membuat uang dengan uang. Mereka tidak perlu bekerja karena uang mereka bekerja untuk mereka. Kuadran "I" adalah arena bermain golongan kaya. Di kuadran mana pun orang menghasilkan uang, jika berharap suatu hari akan kaya, mereka pada akhirnya harus memasuki kuadran "I". Di dalam kuadran "I" uang diubah menjadi kekayaan.

#### **E. Praktek Berwirausaha**

Untuk memulai suatu usaha bisnis diperlukan perencanaan dalam bentuk dokumen tertulis yang berisikan ide dasar dan pertimbangan pendirian perusahaan. Perencanaan usaha mempunyai empat tujuan dasar. Identifikasi lingkup dan kesempatan bisnis, pendekatan yang digunakan dalam memanfaatkan kesempatan, identifikasi faktor penentu keberhasilan usaham dan rencana permodalan. Perencanaan yang baik dapat menjembatani ide menuju realita yang diharapkan.

Dalam rencana bisnis perlu diproyeksikan aspek pemasaran, pengoperasian dan pembiayaan aktivitas yang

dilakukan selama antara tiga sampai lima tahun pertama. Pada saat mendirikan usaha kecil yang dioperasikan oleh tiga atau empat orang belum diperlukan perencanaan formal. Tetapi pada saat usaha berkembang, perencanaan harus dibuat dalam bentuk dokumen tertulis yang mencakup rencana jangka pendek, jangnan menengah, dan jangka panjang secara rinci dan cermat, tepat dan akurat.

Sebelum mendirikan suatu perusahaan wirausahawan menyusun perencanaan. Meskipun demikian perencanaan yang dibuat sering kali cenderung informal dan tidak sistematis. Kebutuhan yang sesungguhnya untuk perencanaan yang sistematis. Kebutuhan yang sesungguhnya untuk perencanaan yang sistematis. Bervariasi sesuai dengan sifat, ukuran, dan struktur perusahaan. Sebuah perusahaan yang dioperasikan oleh beberapa orang mungkin dapat berhasil dengan menggunakan perencanaan informal yang sederhana karena tidak banyak problem yang dihadapi. Tetapi ketika perusahaan berkembang dengan cepat, jumlah personel dan operasi pasar perlu ditingkatkan, pada saat itu perusahaan memerlukan perencanaan formal karena kompleksitas menjadi lebih besar.

Beberapa alasan lain menyebabkan wirausahawan perlu mengubah perencanaan informal menjadi formal sistematis. *Pertama*, tingkat ketidakpastian membangkitkan upaya mempertahankan keberadaan dan perkembangan perusahaan. Dengan tingkat ketidakpastian yang lebih besar, wirausahawan mempunyai tingkat kebutuhan yang lebih besar dalam upaya perencanaan yang lebih formal untuk mengantisipasi tantangan yang dihadapi perusahaan. *Kedua*, kekuatan persaingan bagi perusahaan baru akan meningkatkan makna perencanaan yang lebih sistematis agar

dapat memantau operasi dan tujuan perusahaan dengan lebih pasti. Ketiga, berbagai jenis pengalaman wirausahawan dapat menjadi faktor dalam menentukan arti perencanaan formal.

Perencanaan formal dibedakan dalam dua bentuk: strategis dan operasional. Perencanaan strategis berbicara tentang langkah-langkah antisipasi dalam menentukan arah perusahaan di masa depan. Perencanaan strategis banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya kemampuan wirausahawan, kerumitan perusahaan, dan sifat industry. Meskipun demikian, dalam situasi tertentu perencanaan strategis harus mengikuti lima tahapan dasar yang meliputi: (1) memahami perusahaan, (2) menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, (3) menentukan tindakan alternatif, (4) mengimplementasikan rencana tindakan, dan (5) menganalisis hasil dan melakukan tindakan selanjutnya. Dikatakan demikian, karena perencanaan merupakan transformasi visi kewirausahaan dan ide menjadi tindakan. Proses ini meliputi tiga tahapan dasar sebagai berikut:

1. *Tahapan 1: Komitmen untuk memulai proses perencanaan*

Wirausahawan pada umumnya tidak mudah percaya pada perencanaan. Mereka khawatir akan lepas kendali dan/atau fleksibilitas. Tidak jangan kekhawatiran tersebut menjadi kendala utama bagi keberhasilan di kemudian hari karena perasaan tersebut menghalangi mereka untuk menerima ide dari orang lain. Hal ini menjadi rintangan bagi timbulnya ide baru sehingga mereka tidak dapat memahami manfaat suatu proses perencanaan terbuka.

2. *Tahapan 2: Pertanggungjawaban berdasarkan kepercayaan*

Tahapan ini seringkali diwujudkan dalam bentuk lembaga penasihat, suatu bentuk yang efektif dari

pertanggungjawaban berdasarkan kepercayaan. Lembaga ini berbeda dengan dewan direktur karena pembentukannya tidak berdasarkan anggaran dasar atau peraturan dan tujuan utamanya adalah bentuk meningkatkan kepekaan pemilik terhadap hasil pengawasan yang lebih besar, dan meningkatkan pertanggungjawaban pemilik, meskipun berdasarkan rasa suka rela.

3. *Tahapan 3: Pembentukan pola partisipasi bawahan di dalam pengembangan perencanaan strategis*

Proses perencanaan dapat menciptakan potensi organisasi, khususnya apabila anggota yang menjadi panutan dalam organisasi memprakarsai terciptanya potensi tersebut. Tanpa keterlibatan mereka untuk membuat peta organisasi dan memantau perkembangan keberhasilan tindakan eksekutif cenderung berakibat kecilnya dukungan tersebut. Tanpa keterlibatan mereka untuk membuat peta organisasi dan memantau perkembangan keberhasilan tindakan eksekutif cenderung berakibat kecilnya dukungan terhadap perencanaan.

Ketiga tahapan tersebut dapat menjelaskan kepada wirausahawan yang berusaha menerjemahkan visinya menjadi suatu proses perencanaan.

1. *Mengembangkan Visi Rencana Perusahaan*

Pada umumnya kalangan investor sepakat bahwa rencana perusahaan yang dikembangkan dengan baik dapat memperoleh dukungan yang diperlukan untuk memperoleh dana modal. Rencana perusahaan harus dapat menerangkan perusahaan baru secara menarik dan akurat.

Memahami pihak yang akan membaca dan mempelajari rencana perusahaan merupakan suatu faktor yang penting. Tiga sudut pandang tersebut harus dapat dipahami dengan baik dalam penulisan rencana perusahaan.

Pertama, sudut pandangan wirausaha karena mereka adalah pihak yang mengembangkan perusahaan dan paling banyak mengetahui teknologi atau kreativitas yang dilibatkan. Ini merupakan sudut pandang yang paling umum dan penting dalam rencana perusahaan. Namun, banyak rencana perusahaan yang menekankan sudut pandang ini dan mengabaikan sudut pandang investor dan konsumen potensial.

Kedua, faktor yang lebih penting daripada teknologi atau kreativitas adalah kemampuan perusahaan baru untuk menembus pasar yang dikenal sebagai "dorongan pasar", jenis perusahaan ini menunjukkan manfaat kepada kelompok konsumen yang dituju. Sudut pandang ini merupakan faktor penting yang perlu ditekankan dalam penulisan rencana perusahaan. Meskipun nilai aktual informasi ini dipandang penting, banyak wirausahawan yang kurang memberikan penekanan pada informasi pemasaran dalam rencana perusahaan.

Ketiga, sudut pandang investor dipusatkan pada prakiraan finansial. Proyeksi keuangan menjadi penting apabila investor mengevaluasi nilai investasi mereka. Ini bukan berarti bahwa wirausahawan harus membeberkan angka dalam rencana bisnis yang diajukan. Banyak perusahaan yang hanya mencerminkan kepercayaan bahwa keberhasilan perusahaan baru diukur dengan

pencapaian kurang lebih 50 persen dari tujuan finansial yang diproyeksikan.

## 2. Kelemahan Perencanaan Strategis

Perusahaan baru mempunyai arti penting bagi perekonomian dalam inovasi, kesempatan kerja, dan penjualan. Perencanaan yang efektif dapat membantu perusahaan baru untuk bertahan dan berkembang. Meskipun demikian, riset menunjukkan kelemahan perencanaan perusahaan baru. Kelemahan perencanaan strategis tersebut didapati pada empat faktor sebagai berikut:

### a. Kelangkaan waktu

Manajer melaporkan bahwa mereka tidak mudah mengalokasikan waktu ketika berhadapan dengan problem operasi sehari-hari secara tetap.

### b. Kurang pengetahuan

Pemilik/manajer perusahaan kecil kurang menguasai pengetahuan tentang proses perencanaan. Mereka tidak mengetahui dengan tepat komponen laporan dan proses penyusunannya. Wirausahawan juga tidak mengetahui dengan baik tentang berbagai sumber informasi dan cara menggunakannya.

### c. Kurang memiliki keahlian khusus

Manajer perusahaan kecil biasanya orang yang tidak berpengalaman cukup dalam proses perencanaan.

### d. Sikap kurang terbuka dan tidak mudah percaya

Pemilik/manajer perusahaan kecil sangat sensitive dan menjaga setiap sesuatu yang dianggap rahasia perusahaan. Oleh karena itu, mereka ragu

untuk merumuskan rencana strategis yang memerlukan partisipasi karyawan dan/atau konsultan dari luar.

### 3. Implementasi Perencanaan Strategis

Sejumlah pendekatan dapat diterapkan oleh perusahaan baru. Implementasi perencanaan strategis diklasifikasikan menjadi tiga pendekatan: pendekatan manajemen kesempatan, pendekatan titik awal, dan pendekatan model strategis. Setiap pendekatan menawarkan suatu pendekatan komprehensif untuk perencanaan strategis sebagai berikut:

#### a. Pendekatan manajemen kesempatan

Pendekatan manajemen kesempatan didasarkan pada analisis lingkungan dengan mempertimbangkan (1) evaluasi sumber daya internal, (2) ramalan kondisi pasar eksternal, (3) evaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan, dan (4) formulasi tujuan perusahaan. Untuk membantu wirausahawan agar dapat mengetahui analisis yang rinci, sering kali dibuat lembar kerja formal. Dengan berdasarkan profil strategis, profil kesempatan dapat disusun. Langkah selanjutnya membuat desain untuk membantu perusahaan mencapai manfaat terbesar dari sumber daya yang dimilikinya. Dengan profil ini, program tindakan didefinisikan, sumber daya dialokasikan, dan hasil yang diinginkan diidentifikasi, kemudian diikuti dengan implementasi dan langkah-langkah pengendalian yang meliputi penyusunan personel, penyusunan anggaran, perumusan jadwal, dan analisis laporan keuangan.

Berdasarkan hasil dari prosedur tersebut profil strategi baru disusun, dan proses baru bermula.

Pendekatan manajemen kesempatan merupakan cara pendekatan yang populer karena mudah dipahami dan implementasinya dapat disesuaikan untuk menjawab perubahan kondisi.

b. Pendekatan perencanaan titik awal

Pendekatan perencanaan titik awal berdasarkan pencapaian tujuan pengembangan yang diperlukan sebuah perusahaan baru dari awal melalui reformulasi strategi. Langkah pada setiap tahapan yang penting diselesaikan sebelum melangkah ke tahapan berikutnya, dan semua tahapan terikat dalam satu kesatuan rencana strategi yang utuh. Pendekatan titik awal memiliki tiga manfaat utama: (1) penggunaan titik awal yang praktis dan logis, (2) terhindar dari kesalahan yang fatal karena kegagalan dalam mempertimbangkan bagian penting dari rencana, dan (3) metodologi untuk perencanaan kembali didasarkan pada umpan balik berkesinambungan dari lingkungan. Pendekatan perencanaan titik awal lebih sesuai untuk perusahaan baru yang bersifat teknis, mempunyai banyak tahapan, dan/atau melibatkan uang dalam jumlah besar.

c. Pendekatan model strategis

Beberapa perusahaan baru mengikuti pendekatan model strategis. Pendekatan ini sering dianggap normatif karena menggambarkan susunan yang dianjurkan oleh pakar perencanaan strategis. Problem paling besar dalam pendekatan ini terletak pada kecenderungannya menjadi lebih idealistis



daripada realistis. Banyak perusahaan baru mendapati bahwa pendekatan ini kurang fleksibel untuk kebutuhan mereka lebih dari itu, pendekatan cenderung lebih banyak nilai yang harus diaplikasikan. Meskipun demikian, analisis tahapannya penting untuk suatu pemahaman cara menggunakan perencanaan strategis.

1) Keputusan untuk perencanaan

Langkah awal dalam perencanaan strategis normatif adalah menetapkan waktu dan uang untuk merumuskan suatu perencanaan strategis. Bagi wirausahawan ini merupakan langkah umum karena mereka tidak banyak mengetahui perencanaan formal, dan sekarang harus mempelajari cara menggunakan proses tersebut. Pada tahap ini beban paling besar jatuh pada wirausahawan, karena yang lain mungkin lebih mengetahui masukan yang diperlukan untuk perencanaan. Keputusan untuk perencanaan selalu didasarkan pada antisipasi hasil positif. Wirausahawan percaya bahwa perusahaan akan mendapat keuntungan dari perencanaan.

2) Analisis situasi

Langkah ini memungkinkan wirausahawan untuk memperoleh pemahaman tentang perusahaan, strategi terkini, dan peningkatan potensi atau kesempatan. Analisis ini membantu dalam menetapkan kekuatan dan kelemahan yang dapat menyebabkan kelambatan finansial.

3) Tujuan perusahaan dan pribadi

Pada perusahaan kecil tujuan pribadi pemilik akan mempengaruhi tujuan perusahaan. Misalnya, jika seseorang ditunjuk untuk mengembangkan teknologi karena dia seorang ilmuwan/penemu, tujuan pribadi akan sangat berperan dalam menentukan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan ditentukan untuk memanfaatkan kekuatan perusahaan dan menghindari kelemahannya. Pertimbangan utama khususnya ditetapkan untuk tujuan-tujuan seperti pengembalian investasi, perkembangan penjualan, dan produktivitas.

4) Spesifikasi pokok persoalan

Dalam spesifikasi pokok persoalan wirausahawan meninjau kembali temuan-temuan pada analisis situasi yang berhubungan dengan tujuan pribadi dan tujuan perusahaan untuk menentukan luasnya persoalan. Perbandingan pelaksanaan rencana pada saat ini dan pada waktu yang lalu ditinjau, dan keputusan diambil berdasarkan pertimbangan perlu atau tidaknya untuk melanjutkan strategi pada saat ini.

5) Menciptakan opsi

Pada tahap ini wirausahawan mengidentifikasi alternatif-alternatif yang mungkin dapat memberikan solusi untuk persoalan yang sedang dihadapi. Dalam melakukan hal tersebut, pertimbangan ditujukan pada nilai, sumber daya, kompetensi dan kemampuan finansial perusahaan.

6) Evaluasi dan seleksi

Alternatif yang dibuat pada tahap menciptakan opsi sekarang dibandingkan dengan jangka keefektifan relative yang berkenaan dengan pokok persoalan strategis inti. Pertimbangan yang cermat diberikan pada tingkat yang sesuai pada setiap alternative yang sesuai dengan tujuan dengan sumberdaya dan kepentingan perusahaan, manfaat kompetitif relatif, dan semua tujuan manajemen. Faktor-faktor yang dinilai mengesampingkan arti diprioritaskan, kemudian dilakukan pengembalian keputusan.

7) Implementasi

Langkah berikutnya adalah membuat jadwal yang menyebutkan pelaksanaan dan waktu implementasi perencanaan. Tujuan strategis dibagi menjadi tujuan jangka pendek agar setiap orang mengetahui sesuatu yang harus dikerjakan. Focus operasi diarahkan pada mareri yang berorientasi efisiensi seperti pengendalian biaya dan laba, dan operasi yang berhubungan dengan aktivitas harian. menurut rencana.

8) Pengendalian dan umpan balik

Pengendalian dan umpan balik digunakan untuk menjamin bahwa segala sesuatu sedang dikerjakan menurut rencana. Realisasi hasil actual dibandingkan dengan harapan berdasarkan kesinambungan. Jika terjadi sesuatu yang serba salah, dilakukan upaya memperbaiki situasi. Kemudian dengan berdasarkan hasil, diformulasikan rencana baru.

#### 4. Sifat Perencanaan Operasional

Perencanaan operasional, juga mengaju pada perencanaan jangka pendek atau fungsional, terdiri dari praktek khusus yang dilakukan untuk mencapai tujuan perencanaan strategis. Rencana operasional merupakan perkembangan dari proses perencanaan strategis. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam strategis perlu dibentuk kebijaksanaan fungsional dalam bidang keuangan, pemasaran, produksi, dan manajemen.

Seluruh proses perencanaan menggabungkan semua faktor yang tercakup dalam perencanaan strategis dan sarana implementasi perencanaan operasional. Lebih dari itu, sarana yang diterapkan dalam cakupan fungsional perusahaan akan menjadi kunci bagi implementasi proses perencanaan. Sarana yang dikenal dan digunakan paling luas adalah anggaran, kebijaksanaan dan prosedur.

Anggaran merupakan sarana yang digunakan untuk menyusun rencana masa yang akan datang di bidang keuangan. Anggaran merupakan alat yang sangat penting dalam kebijaksanaan operasional karena anggaran memberikan tolok ukur sebagai alat evaluasi untuk perencanaan yang dilaksanakan. Penganggaran yang efektif didasarkan pada estimasi realistis dan alokasi yang sesuai.

Kebijaksanaan merupakan petunjuk utama untuk perusahaan secara keseluruhan. Tiap departemen atau bidang fungsional perlu membuat kebijaksanaan yang akan menjadi dasar panduan operasi harian. Misalnya, kebijaksanaan penjualan, kebijaksanaan keuangan, kebijaksanaan manufaktur yang menentukan arah

perusahaan. Kebijakan yang telah dibuat memberikan kebebasan kepada wirausahawan untuk bekerja berdasarkan strategi karena setiap problem fungsional yang spesifik tidak harus dianalisis. Kebijakan merupakan panduan pengambilan keputusan dan tindakan.

#### 5. Pengembangan Rencana Usaha

Rencana perusahaan merupakan dokumen tertulis yang merinci perusahaan yang diusulkan. Dokumen ini harus mengilustrasikan status sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat diajukan, kebutuhan yang diperlukan, dan proyeksi hasil perusahaan baru yang diusulkan. Setiap aspek perusahaan harus diterangkan: proyek, pemasaran, riset dan pengembangan, manajemen, risiko, pembiayaan, dan jadwal. Penjelasan tentang semua aspek perusahaan yang diusulkan harus menunjukkan gambaran yang jelas tentang jenis dan arah perusahaan, dan cara wirausaha mencapai target yang diusulkan. Rencana perusahaan merupakan peta perjalanan menuju keberhasilan perusahaan.

Rencana perusahaan berfungsi sebagai proposal untuk memperoleh modal yang berupa pinjaman atau investasi. Rencana perusahaan, apapun namanya, adalah dokumen yang merupakan syarat minimum yang diperlukan oleh penyandang dana atau modal usaha. Rencana usaha memberi peluang wirausahawan untuk mengikuti proses investasi.

Rencana perusahaan menerangkan kepada penyandang dsana atau investor semua kejadian yang mungkin dapat mempengaruhi perusahaan yang sedang

diusulkan. Rincian diperlukan untuk berbagai tindakan pendapatan dan biaya yang dikeluarkan. Hal ini penting untuk dinyatakan agar asumsi yang didasarkan pada rencana perusahaan dapat diketahui dengan pasti.

Rencana perusahaan harus selalu ditekankan pada implementasi akhir perusahaan. Dengan kata lain, rencana perusahaan bukan sekedar penulisan tentang arti penting rencana yang efektif, tetapi juga merupakan penterjemahan rencana tersebut menjadi perusahaan yang sukses.

#### 6. Manfaat Rencana Perusahaan

Seluruh proses perencanaan perusahaan mengharuskan wirausahawan untuk menganalisis semua aspek perusahaan dan menyiapkan strategi yang efektif berkenaan dengan ketidakpastian yang muncul. Dengan demikian rencana perusahaan akan dapat membantu wirausahawan menghindari kegagalan dalam pelaksanaan keputusan.

Penyiapan rencana perusahaan merupakan hal yang penting bagi wirausahawan. Jika suatu tim dilibatkan dalam penyusunan rencana perusahaan, kemudian semua anggota tim menulis rencana tersebut, pimpinan rencana perusahaan melibatkan konsultan, wirausahawan harus tetap berfungsi sebagai pengendali di balik rencana perusahaan. Dengan demikian rencana perusahaan yang harus dipertahankan karena perencanaan perusahaan merupakan tanggung jawab wirausahawan.

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari rencana perusahaan baik oleh wirausahawan maupun pihak

penyandang dana yang membacanya dan mengevaluasi perusahaan yang diusulkan.

- a. Waktu, usaha, riset, dan disiplin yang diperlukan untuk suatu rencana perusahaan mendorong wirausahawan untuk memandang usahanya secara kritis dan objektif.
- b. Analisis persaingan, ekonomi, dan finansial yang tercakup dalam rencana perusahaan mendorong wirausahawan untuk cermat dalam berasumsi tentang keberhasilan perusahaannya.
- c. Karena semua aspek perusahaan harus disusun dalam rencana, wirausahawan yang mengembangkan dan memperhatikan strategi operasi dan hasil yang diharapkan untuk dievaluasi oleh pihak luar.
- d. Rencana perusahaan menyatakan jumlah tujuan dan sasaran, yang memberikan kriteria yang dapat diukur untuk membandingkan prediksi dengan hasil nyata.
- e. Rencana perusahaan yang lengkap merupakan alat komunikasi antara wirausaha dengan sumber finansial dari pihak luar di samping juga dapat berfungsi sebagai sarana operasional untuk pedoman menuju keberhasilan.
- f. Manfaat sebagai berikut diperoleh dari rencana perusahaan;
- g. Sumber dana mendapat rincian tentang potensi pasar dan rencana untuk menjamin segmentasi pasar.

Dengan laporan keuangan yang prospektif, rencana perusahaan mengilustrasikan kemampuan

perusahaan untuk menjamin utang. Rencana perusahaan mengidentifikasi risiko yang serius dan kejadian penting dengan suatu bahasan tentang kemungkinan rencana yang memberikan kesempatan bagi keberhasilan perusahaan.

Dengan penyajian tinjauan yang komprehensif tentang seluruh operasi perusahaan, rencana perusahaan memberikan dokumen yang ringkas dan jelas yang berisikan informasi yang diperlukan untuk evaluasi secara menyeluruh.

Bagi sumber dana yang tidak mengetahui dari awal tentang wirausahawan atau perusahaan, rencana perusahaan dapat berfungsi sebagai pedoman yang bermanfaat untuk memberikan penilaian terhadap rencana individu dan kemampuan manajerial wirausahawan.

#### 7. Rencana Perusahaan yang Lengkap

Rencana perusahaan yang diajukan kepada investor harus lengkap, karena seluruh isi laporan akan menjadi bahan pertimbangan pada investor. Berikut disajikan ringkasan pokok-pokok persoalan penting yang perlu diperhatikan jika rencana perusahaan diharapkan berhasil.

Suatu rencana perusahaan memberi kesan pertama tentang manfaat perusahaan bagi pihak penyandang dana atau investor. Karena itu rencana perusahaan harus disusun dengan baik dengan memperhatikan beberapa faktor yang meliputi panjang uraian, jumlah halaman, penjelasan yang ringkas dan jelas tentang aspek perusahaan, dan ditulis dalam Bahasa yang ringkas dan jelas tentang aspek perusahaan, dan ditulis dalam Bahasa yang baik dan benar. Faktor-faktor yang perlu



diperhatikan dalam menyajikan rencana perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Tampilan fisik

Rencana perusahaan harus dicetak atau diketik dan dijilid dengan bersih dan rapih. Penjilidan dengan menggunakan spiral lebih baik daripada dengan stapler. Selain tampak rapi, penjilidan dengan menggunakan spiral plastik juga kelihatan rapi dan lebih kuat sehingga tidak mudah rusak.

b. Ketebalan

Suatu rencana perusahaan seyogianya tidak lebih dari 40 halaman. Ketentuan yang membatasi sebuah rencana perusahaan tidak lebih dari 40 halaman membuat penyusunan rencana harus berupaya agar rencana yang disusunnya dapat disajikan dengan efektif dan efisien namun menarik perhatian investor.

c. Sampul dan halaman judul

Sampul rencana perusahaan harus menunjukkan nama perusahaan alamat dan nomor telepon, bulan dan tahun penyusunan atau penerbitannya. Hal ini dimaksudkan untuk membuka peluang komunikasi antara pihak wirausahawan yang mengajukan rencana perusahaan dengan pihak investor yang tertarik untuk berinvestasi.

d. Ringkasan

Dua halaman tepat sesudah halaman judul berisi penjelasan ringkasan tentang status perusahaan, produk atau jasa yang dihasilkan, manfaat bagi konsumen, prakiraan keuangan, tujuan perusahaan

dalam tiga sampai tujuh tahun, jumlah modal yang dibutuhkan, dan manfaat yang diperoleh oleh investor.

e. Daftar Isi

Setelah halaman ringkasan, disajikan daftar isi yang disusun dengan rapih yang menyajikan daftar setiap bagian rencana perusahaan dan ditandai dengan nomor halaman untuk setiap bagian.

8. Panduan Menyusun Rencana Perusahaan

Berikut disajikan sejumlah rekomendasi para ahli dalam permodalan perusahaan dan pengembangan perusahaan baru. Panduan ini disajikan sebagai tip untuk mengembangkan rencana perusahaan yang baik.

a. Rencana pendek yang dapat diterima

Pembaca rencana perusahaan adalah orang penting yang sangat memperhitungkan waktu. Karena itu wirausahawan harus dapat menyampaikan penjelasan yang cermat, ringkas dan jelas. Rencana perusahaan seyogianya diupayakan tidak lebih dari 40 halaman, selain apendiks.

b. Susunan materi rencana perusahaan

Daftar isi, ringkasan, paendiks, gambar, grafik, Bahasa pengantar bernada formal dengan struktur dan tata bahasa yang baik dan benar, tata urutan materi kronologis, dan kerapihan penyajian rencana perusahaan.

1) Rencana perusahaan berorientasi ke masa depan

Wirausahawan, harus berusaha menciptakan gaya yang menarik dalam rencana perusahaan dengan mengembangkan arah dan ramalan yang menerangkan aktivitas perusahaan yang akan

dilakukan dan kesempatan untuk memanfaatkan produk dan jasa.

- 2) Menghindari pernyataan yang berlebihan  
Potensi penjualan, ramalan pendapatan, dan potensi perkembangan perusahaan harus dinyatakan secara jujur sebagaimana adanya. Dokumentasi dan riset merupakan faktor penting bagi kredibilitas perusahaan.
- 3) Menunjukkan bukti tint wirausaha yang efektif  
Segmen manajemen pada rencana perusahaan harus mengidentifikasi dengan jelas kecakapan setiap personal inti dan menunjukkan masing-masing akan bekerja sama dengan efektif sebagai sebuah tim dalam pengelolaan perusahaan.
- 4) Tidak menciptakan variasi yang berlebihan  
Pemusatan perhatian rencana pada satu kesempatan terpenting bagi perusahaan. Sebuah perusahaan seyogianya tidak menciptakan pasar berganda atau melakukan berbagai aktivitas usaha sebelum berhasil dengan mengembangkan satu kekuatan yang dapat menjadi tumpuan utama.
- 5) Menarik perhatian pembaca  
Banyak rencana perusahaan yang diajukan kepada investor, meskipun demikian tidak banyak yang berhasil memperoleh dana modal. Karena itu wirausahawan harus berusaha untuk menarik perhatian pihak yang membawa rencana perusahaan dengan menunjukkan perbedaan yang khas, dan unik. Hal ini dapat dilakukan dengan

halaman judul dan ringkasan sebagai kunci untuk menarik perhatian pihak yang membacanya.

## 9. Elemen Rencana Perusahaan

Suatu rencana perusahaan yang rinci umumnya terdiri atas 10 bab. Panjang yang ideal 40 halaman, meskipun menurut kebutuhan untuk rincian seluruh rencana dapat berkisar antara 10 sampai dengan 100 halaman termasuk apendiks. Berikut memberikan ikhtisar suatu rencana perusahaan.

### **Ikhtisar Rencana Perusahaan yang Lengkap:**

Bab 1 : Ringkasan

Bab 2 : Bagian Deskripsi Perusahaan

- A. Deskripsi umum tentang perusahaan
- B. Latar Belakang Industri
- C. Riwayat Perusahaan
- D. Tujuan Perusahaan
- E. Ciri khusus produk atau jasa

Bab 3 : Bagian Pemasaran

- A. Riset dan analisis
  1. Pasaran sasaran (konsumen)
  2. Ukuran dan trend pasar
  3. Persamaan
  4. Estimasi pangsa pasar
- B. Rencana pemasaran
  1. Strategi pasar: penjualan dan distribusi
  2. Penetapan harga
  3. Periklanan dan promosi

- Bab 4 : Segmen Riset, Desain, dan Pengembangan
  - A. Rencana pengembangan dan desain
  - B. Hasil riset teknis
  - C. Kebutuhan bantuan riset
  - D. Struktur biaya
- Bab 5 : Segmen Manufaktur
  - A. Analisis Lokasi
  - B. Kebutuhan produksi, fasilitas dan peralatan
  - C. Faktor transportasi/pemasok
  - D. Supplu tenaga kerja
  - E. Data biaya manufaktur
- Bab 6 : Segmen Manajemen
  - A. Tim manajemen personal inti
  - B. Struktur hukum: perjanjian saham, karyawan, pemilikan, dan sebagainya
  - C. Lembaga direktur, konsultan, penasihat dan sebagainya.
- Bab 7 : Segmen Risiko
  - A. Problem yang penting
  - B. Kendala dan risiko
  - C. Alternatif tindakan
- Bab 8 : Segmen Keuangan
  - A. Ramalan Keuangan
    - 1. Laba dan rugi
    - 2. Aliran kas
    - 3. Analisis titik impas
    - 4. Pengendalian biaya
  - B. Sumber dan penggunaan dana
  - C. Perencanaan anggaran
  - D. Tahapan pembiayaan

Bab 9 : Segmen Jadwal Batas Waktu

- A. Penetapan waktu dan tujuan
- B. Batas akhir waktu
- C. Hubungan peristiwa

Bab 10 : Apendiks dan/ atau Daftar Pusaka

**Keterangan:**

a. Ringkasan

Pihak yang membaca rencana perusahaan (banker, penyandang modal, investor) menyukai ringkasan rencana yang mengutamakan bagian-bagian yang paling penting. Ringkasan semacam ini menyajikan tinjauan umum tentang sesuatu yang perlu diikuti dan membantu menginformasikan perspektif dengan panjang uraian tidak lebih dari tiga halaman. Ringkasan ditulis setelah seluruh rencana perusahaan ditulis lengkap. Dengan demikian Deskripsi tertentu dari setiap segmen dapat diidentifikasi untuk dicantumkan dalam ringkasan. Karena ringkasan diletakkan pada bagian awal rencana yang dibaca, maka harus mampu menyajikan kualitas seluruh laporan. Ringkasan harus diupayakan agar merupakan uraian yang cerdas tentang rencana yang lengkap.

Pernyataan yang dipilih untuk segmen ringkasan harus secara ringkas menyentuh perusahaan itu sendiri, kesempatan pasar, kebutuhan finansial dan proyeksi, serta riset atau teknologi khusus mengenai perusahaan. Hal ini harus dilakukan sedemikian rupa agar investor tertarik untuk membacanya. Informasi ini harus disajikan dengan ringkas agar pembaca tidak

berkesimpulan bahwa proyek tersebut tidak mengamin pembiayaan.

b. Deskripsi perusahaan

Dalam deskripsi ini, pertama harus menyebutkan nama perusahaan. Kedua, latar belakang industri harus dinyatakan untuk *trend* masa sekarang dan masa yang akan datang. Ketiga, perusahaan baru harus menjelaskan secara menyeluruh tentang potensi yang diusulkan. Gambar atau foto dapat juga disertakan.

c. Segmen pemasaran

Dalam segmen laporan ini wirausahawan harus meyakinkan investor bahwa ada pasar, proyeksi penjualan akan tercapai, dan persaingan dapat dihadapi. Bagian ini seringkali menjadi bagian yang paling sukar untuk dipersiapkan, selain juga merupakan bagian yang paling penting karena hampir semua bagian rencana sesudahnya ditentukan oleh estimasi penjualan yang dikembangkan di bagian ini. Tingkat penjualan yang diproyeksikan didasarkan atas analisis dan riset pasar, pengaruh langsung ukuran operasi manufaktur, rencana pemasaran, dan jumlah utang dan modal ekuitas yang akan digunakan.

Wirausahawan pada umumnya menghadapi kesulitan dalam menyiapkan analisis dan riset pasar yang akan meyakinkan investor bahwa estimasi penjualan perusahaan akurat dan dapat dicapai. Berikut dikemukakan aspek pemasaran yang harus diarahkan pada pengembangan interpretasi pasar komprehensif.

1) Pasar homogeny dan segmen pasar

Pasar ini adalah kelompok homogen dengan ciri umum, yakni setiap orang yang membutuhkan produk atau jasa yang dirancang dengan cara baru. Dalam menjelaskan pasar ini, rencana harus disusun berdasarkan keputusan pembelian konsumsi: harga, kualitas, pelayanan, hubungan langsung, atau perpaduan dari faktor-faktor ini.

Selanjutnya, harus ada daftar konsumen potensial yang telah menyatakan tertarik pada produk atau jasa, bersama dengan keterangan minat mereka. Jika rencana ditujukan pada perusahaan yang telah ada konsumen yang paling dominan harus diidentifikasi dan *trend* penjualan dibahas. Penjelasan tentang seluruh potensi pasar merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan. Proyeksi penjualan harus dibuat minimal selama tiga tahun dan faktor-faktor yang paling berpengaruh pada perkembangan pasar (*trend* industri *trend* ekonomi sosial, kebijaksanaan pemerintah, dan perbedaan antara tingkat pertumbuhan tahunan dengan masa lalu harus diterangkan. Sumber semua data dan metode yang digunakan harus ditunjukkan. Kemudian, jika ada konsumen yang berkomitmen dengan menyatakan kesediaan untuk membeli harus ditunjukkan. Berdasar pada manfaat produk atau jasa, ukuran pasar dan *trend* konsumen, dan *trend* penjualan dalam tahun-tahun terdahulu, penyusun rencana untuk tiga tahun ke depan.



Perkembangan penjualan perusahaan dan pangsa pasar yang diestimasikan harus dihubungkan dengan industri basis konsumen.

2) Analisis persaingan

Suatu upaya harus dilakukan untuk memastikan kekuatan dan kelemahan produk atau jasa yang dipersaingkan. Setiap sumber yang dapat digunakan untuk mengevaluasi persaingan harus dihimpun. Dalam bahawannya ini harus ada perbandingan tentang produk atau jasa yang bersaing berdasarkan harga, jasa, atau pelayanan, dan ciri yang relevan. Harus ada pembahasan ringkas tentang manfaat mudarat pada saat sekarang pada produk atau jasa yang dipersaingkan dan alasan yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan konsumen. Setiap pengetahuan tentang tindakan pesaing yang dapat menyebabkan perbaikan produk dan perkembangan posisi juga harus dikemukakan. Tinjauan perusahaan pesaing harus dinyatakan. Setiap pangsa pasar pesaing, penjualan dan distribusi serta kemampuan produk harus dibahas. Perhatian difokuskan pada kemampuan dan *trend* laba setiap pesaing.

3) Kebijakan penetapan harga

Harga yang ditetapkan harus dipelajari agar dapat menembus pasar, menjaga posisi pasar, dan menghasilkan laba. Dalam bahasan ini sejumlah strategi penetapan harga harus dipelajari dengan cermat dan kemudian satu diantaranya dikemukakan dengan pasti. Kebijakan

penetapan harga ini harus dibandingkan dengan kebijaksanaan pesaing utama. Batas laba kotor antara manufaktur dan biaya penjualan akhir harus dibahas dan diberikan pertimbangan untuk mengetahui apakah batas tersebut cukup besar untuk memberi kemungkinan bagi distribusi, penjualan garansi dan biaya pelayanan, untuk amortisasi pengembangan dan biaya perlengkapan, serta untuk laba.

4) Rencana periklanan

Untuk produk manufaktur rencana partisipasi pameran perdagangan, periklanan melalui majalah dan agar periklanan harus disebutkan. Bahasan tentang periklanan dan kampanye promosi untuk mengenalkan produk dan jenis bantuan penjualan yang akan diberikan pada dealer harus terus dilakukan. Lebih dari itu, jadwal dan biaya promosi dan periklanan harus dikemukakan, dan jika periklanan akan menjadi bagian pengeluaran biaya yang penting, gambar yang menunjukkan cara dan waktu terjadinya pembiayaan harus disertakan.

5) Strategi pasar

Falsafah perusahaan dan strategi pemasaran harus diikhtisarkan. Kedua faktor ini dikembangkan dari riset dan data evaluasi yang harus disebutkan mencakup pembahasan tentang: (1) tipe kelompok konsumen yang dijadikan sasaran upaya penjualan intensif pertama kali (2) kelompok konsumen yang akan dijadikan sasaran upaya penjualan berikutnya

(3) metode indentifikasi dan hubungan dengan konsumen potensial dalam kelompok-kelompok ini; (4) ilustrasi tentang produk (kualitas, harga, pengiriman, garansi dan sebagainya) yang akan ditekankan untuk menghidupkan penjualan; dan (5) konsep pemasaran yang inovatif yang akan meningkatkan daya Tarik produk. Bab ini juga harus menunjukkan apakah produk atau jasa akan terlebih dahulu diperkenalkan secara nasional atau regional. *Trend* yang bersifat musiman juga harus dipertimbangkan dan tindakan peningkatan penjualan yang perlu dilakukan untuk menghadapinya dikemukakan. Kelima faktor segmen pemasaran tersebut di atas diperlukan untuk merinci seluruh rencana pasar, yang menjelaskan sesuatu yang harus dilakukan, cara melakukannya dan yang melakukan.

d. Segmen riset, desain, dan pengembangan

Cakupan riset, desain, dan perkembangan yang berhubungan dengan biaya harus terdapat dalam bab ini. Investor perlu mengetahui status proyek dalam bentuk asli dan jadwal yang tertunda. Agar bab ini komprehensif, wirausahawan perlu mencari bantuan teknis dalam menyiapkan bahasan yang rinci. Skema, sket, gambar, dan model seringkali merupakan faktor yang perlu disertakan.

e. Segmen manufaktur

Segmen ini harus selalu diawali dengan penjelasan lokasi perusahaan baru. Tempat yang dipilih harus sesuai dengan ketersediaan karyawan, tingkat upah, kedekatan dengan pemasok dan

konsumen, serta dukungan masyarakat. Lebih daripada itu, pajak lokal dan persyaratan wilayah harus dipisahkan, dan dukungan bank daerah untuk perusahaan baru harus dirintis.

Produksi yang diperlukan harus dibahas berkenaan dengan fasilitas yang diperlukan untuk menyelenggarakan perusahaan baru (pabrik, gudang, dan perkantoran) dan perlengkapan yang harus tersedia (peralatan khusus, komputer, mesin dan kendaraan).

Faktor lain yang mungkin perlu dipertimbangkan adalah pemasok, dan biaya transportasi yang termasuk dalam materi pengiriman. Selain hal itu, jumlah karyawan, tingkat upah dan jabatan yang memerlukan keterampilan harus dikemukakan.

Akhirnya, data biaya yang berhubungan dengan setiap faktor di atas harus dikemukakan. Informasi keuangan yang digunakan disini kemudian dapat diajukan pada proyeksi keuangan.

f. Segmen manajemen

Segmen ini harus mengidentifikasi personel inti, jabatan dan tanggungjawab mereka, dan pengalaman karir membedakan mereka menurut peran tertentu. Resume yang lengkap harus diberikan kepada setiap anggota tim manajemen. Bab ini juga harus mengikhtisarkan peran wirausahawan dalam perusahaan. Penasihat dan konsultan juga harus diidentifikasi dan dibahas dalam bab ini struktur pembayaran dan pemilikan harus diuraikan dengan jelas (perjanjian pemilikan

saham, biaya konsultasi, dan sebagainya). Dalam ringkasan pembahasan harus memadai sehingga investor dapat memahami setiap faktor penting yang telah dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Struktur organisasi
- 2) Tim manajemen dan personal inti
- 3) Pengalaman dan kecakapan teknis personel
- 4) Struktur kepemilikan dan perjanjian kompensasi
- 5) Lembaga direktur dan konsumtan luar serta penasihat

g. Segmen resiko

Dalam bab ini resiko yang potensial sebagai berikut harus diidentifikasi:

- 1) Akibat trend yang tidak mendukung dalam industri
- 2) Biaya manufaktur atau desain yang melampaui estimasi
- 3) Persaingan baru yang tidak terencanakan

h. Segmen keuangan

Segmen keuangan sebuah rencana bisnis harus menunjukkan kemampuan perkembangan pelaksanaannya. Pada bagian ini, tiga laporan keuangan dasar harus disajikan: pro forma neraca, laporan pendapatan, dan laporan aliran kas.

## 10. Proforma Neraca

Proforma neraca memproyeksikan kondisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Proforma neraca harus disajikan pada tahap awal, tengah tahunan selama tahun-tahun pertama, dan pada akhir setiap awal tiga tahunan. Neraca menyajikan

rincian asset diperlukan untuk mendukung tingkat operasi yang diproyeksikan dan menunjukkan cara pembiayaannya. Investor akan melihat proyeksi neraca untuk menetapkan apakah rasio utang, modal kerja, perputaran persediaan, dan sebagainya berada dalam batas yang dapat diterima yang diperlukan untuk menetapkan pembiayaan di masa mendatang yang diproyeksikan untuk perubahan.

#### 11. Laporan Pendapatan dan Laporan Arus Kas

Laporan pendapatan mengilustrasikan hasil operasi yang diproyeksikan berdasarkan laba dan rugi. Ramalan penjualan, yang dikembangkan dalam segmen pemasaran, berperan penting dalam dokumen ini. Sekali ramalan penjualan (proyeksi pendapatan) ditetapkan, biaya produksi harus dianggarkan berdasarkan atas tenaga kerja. Pelayanan/jasa, dan overhead manufaktur (tetap dan variabel) harus dipertimbangkan.

Dalam mendirikan perusahaan baru, laporan aliran kas merupakan dokumen yang paling penting. Bagian rencana perusahaan ini harus disusun dengan cermat.

Tingkat penjualan yang diproyeksikan dan pengeluaran modal selama jangka waktu tertentu, ramalan aliran kas akan menekankan kebutuhan dana tambahan dan akan menunjukkan persyaratan yang paling penting untuk modal kerja. Manajemen harus menetapkan cara pembayarannya kembali. Jumlah keseluruhan dana yang diperlukan mungkin dapat dipasok dari berbagai sumber. Bagian dari pendanaan, utang, dan bagian dari pinjaman bank. Informasi ini menjadi bagian ramalan aliran kas yang terakhir. Aliran

kas yang rinci, jika dipahami dengan baik, dapat mengarahkan perhatian wirausahawan kepada problem pengoperasian sebelum krisis kas yang serius terjadi.

Dalam segmen keuangan setiap asumsi yang digunakan untuk menyajikan angka penting untuk disebutkan. Dokumen akhir yang harus disertakan dalam segmen keuangan adalah bagian titip impas, yang menunjukkan tingkat penjualan (dan produksi) yang diperlukan untuk menutup semua biaya.

~oOo~

Copyright © 2020  
PENERBIT NEM

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahmad, 2018., Manajemen Pemberdayaan Pada Pendidikan Non Formal, Ideas, Publishing, Gorontalo
- BPS (Badan Pusat Statistik), 1999, Penduduk Miskin (Poor Population), Berita Resmi Penduduk Miskin, No.04/Th.II/9, July Jakarta: CBS.
- BPS/Badan Pusat Statistik dan Depsos/Departemen Sosial, 2002, Penduduk Fakir Miskin Indonesia, 2002, Jakarta BPS.
- Badan Pusat Statistik, 2018, Jumlah Penduduk Indonesia, Jakarta BPS.
- Botkins, J.W, at All, 1984., *No Limits To Learning : Bridging The Human Gap*, Nerw York, Pergamond Press.
- Dye, Thomas R, 1995, *Undestanding Public Policy*, Printice Hall, Englewood Cliffs, JN
- ELSAM, 2002, Statistik Kematian Buruh Migran di Singapura, Newsletter Edisi Mei-Juni.
- Fakih Mansour, 2002, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, Pustaka Pelajar, Yohjakarta.
- Geer, C.G., 1995, *Strategy and Humman Resources a General Managerial Perspectives*, NJ : Prinstice Hall, Englewood Slifft.



- Ife, Jim, 1995, *Communicaty Development : Creating Community alternatives, Vision, Analisis and Practice* Australia Longman.
- Malcolm S. Knowles, at all, 2019., *The Adult Learner : Definitve Classic In Adult Education And Human Resource Development*, Coppingright, Miami
- Nawawi Ismail, 2009, *Pembangunan dan Problema Masyarakat: Kajian Konsep, Model, Teori dari Aspek Ekonomi dan Sosiologi* CV. Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Pusat Statistik Nasional, Jakarta, September 2020
- Rahardjo, 1982, *Perkembangan Kota dan Beberapa Permasalahannya*, Seksi Penerbitan Fakultas Sosial dan Politik UGM.
- Stephen Brookfield., 1983., *Adult Learner : Adult Education and the Comunnity*, AS : Teacher College Press.
- Suharto Edi, 2009, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Turang (2002) *Perencanaan Pendidikan, Program Pascasarjana Unima Manado*, Sulut
- Wullur Mozes., 2010. *Perencanaan Pendidikan Luar Sekolah*, Cahaya Abadi Tulung Agung
- , 2011., *Analisis Sistem Pendidikan Luar Sekolah*, Cahaya Abadi, Tulung Agung
- , 2019, *Pendidikan Mata Pencahaian Bagi Masyarakat*, LP2AI UNIMA,

## Tentang Penulis



**Dr. Marien Pinontoan, M.Pd.** lahir di Desa Klabat, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa, sekarang Kabupaten Minahasa Utara. Saat ini penulis tinggal di Jln. Mandengan 2 Kelurahan Matani I, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, Sulawesi Utara.

Pendidikan tinggi ditempuh mulai dari Sarjana Muda (BA) di Jurusan Administrasi dan Supervisi Pendidikan FIP IKIP Manado lulus tahun 1981, S1 di jurusan dan fakultas yang sama lulus tahun 1983 (Dra). S1 kedua Jurusan Pendidikan IPS FPIPS IKIP Bandung, lulus tahun 1995 (SPd). Selanjutnya studi S2 Jurusan PLS di Pascasarjana UM Malang lulus tahun 2002 (M.Pd). Dan tahun 2009 Meraih gelar Doktor bidang studi Pendidikan Ekonomi S3 PPs UM Malang. Saat ini penulis aktif di kegiatan seminar nasional dan internasional, serta sejumlah Program Pengabdian kepada Masyarakat di antaranya Pelatihan Keterampilan Manisan Pala bagi Ibu-Ibu PKK, Pendidikan Mata Pencaharian bagi Pemuda Putus Sekolah di Kota Tomohon, serta Pendidikan Keterampilan bagi Ibu-ibu PKK Kota Tomohon. Penulis saat ini melayani perkuliahan dan pembimbingan mahasiswa S1 Program Studi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan FIP Unima, S2 Program Studi PGSD, dan S2 Program Studi Manajemen Pendidikan Pascasarjana Unima Manado. Untuk keperluan pengembangan buku, penulis dapat dihubungi melalui gmail: [marienpinontoan@unima.ac.id](mailto:marienpinontoan@unima.ac.id).



# Konsep Dasar Kemiskinan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat

## Suatu Kajian Teoretis, Pragmatis dan Holistik

Fenomena-fenomena kemiskinan dari aspek ekonomi di tengah-tengah kehidupan masyarakat menghadapi perubahan global yang semakin akseleratif. Fenomena ini mengisyaratkan semakin tingginya angka jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang ditandai gejala setiap keluarga terdiri dari suami istri dan 3 orang anak namun yang bekerja hanya suami atau istri untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan lima orang dalam keluarga tersebut. Setelah dikaji dalam konteks teoretis menurut pandangan ahli yang kemudian dituangkan dalam bentuk gagasan upaya pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah sosial yang tumbuh dalam masyarakat maka salah satu alternatif yang ditawarkan dalam buku ini ialah konsep Pendidikan Mata Pencaharian sebagai alternatif untuk memperkecil masalah kemiskinan. Dengan demikian buku ini telah membahas baik kajian konseptual teoretis, dan memaparkan kondisi pragmatis untuk dimunculkan solusi alternatif sebagai bagian pemecahan masalah secara holistik terkait dengan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, maka diharapkan para pembaca akan memperoleh pemahaman yang jelas melalui buku ini.